

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah mendapatkan hasil analisis pada level teks dan level konteks, kemudian peneliti menarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian ini terkait penyosokan terhadap 11 oknum anggota Kopassus dan empat tahanan titipan Polda DIY dalam kasus penyerbuan Lapas Cebongan pada media cetak lokal yaitu SKH Kedaulatan Rakyat, dan media cetak nasional ialah Harian Kompas. Pada pemberitaan edisi Maret-April 2013, di mana periode tersebut dibatasi oleh peneliti dari pasca kejadian penyerbuan Lapas Cebongan hingga penanganan kasus tersebut diserahkan oleh kepolisian kepada pihak TNI.

Sebagai media cetak lokal Yogyakarta, tentu SKH Kedaulatan Rakyat memiliki perhatian yang besar pada peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan. Hal yang paling mendasar dan terlihat jelas yaitu karena adanya nilai berita *proximity*, yang mana peristiwa tersebut terjadi di daerah Sleman, DI Yogyakarta, meskipun pada hasil analisis level teks dan konteks menunjukkan ada faktor-faktor lainnya yang membuat berita tersebut kemudian selalu menempati *headline* SKH Kedaulatan Rakyat pada periode Maret-April 2013. Berdasarkan *frame* berita SKH Kedaulatan Rakyat terkait peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan yang didapat peneliti dari keenam berita yang dianalisis, maka peneliti menemukan penyosokan terhadap 11 oknum anggota Kopassus dan empat tahanan titipan Polda DIY yang dilakukan media cetak lokal terbesar di Yogyakarta tersebut. Adapun *frame* berita SKH Kedaulatan Rakyat terkait peristiwa tersebut adalah

tindakan pelanggaran hukum yang didasari atas jiwa korsa yang membangkitkan rasa solidaritas 11 oknum anggota Kopassus untuk membela kehormatan kesatuannya yang dianggap telah dilecehkan dengan tewasnya Serka Heru Santoso oleh keempat tahanan titipan Polda DIY yang menjadi target sasaran penyerbuan dan ditembak mati diruangan selnya, yang mana penyerbuan tersebut bukan termasuk dalam pelanggaran HAM dan dibenarkan secara moral karena dinilai sebagai aksi pemberantasan premanisme.

Berdasarkan *frame* berita di atas kemudian peneliti mendapatkan penyosokan yang dilakukan SKH Kedaulatan Rakyat terhadap 11 oknum anggota Kopassus dan empat tahanan titipan Polda DIY. **Sebelum terungkapnya pelaku penyerbuan Lapas Cebongan (SKH KR)**, 11 oknum anggota Kopassus disosokkan sebagai ‘segerombolan pelaku bersenjata lengkap’ yang terlatih dan profesional dalam melakukan aksinya yang kejam untuk menewaskan keempat sasarannya. Sedangkan empat tahanan titipan Polda DIY sebagai target sasaran dalam penyerbuan Lapas Cebongan yang menjadi korban penembakan dengan cara yang sadis oleh pelaku. Sementara **setelah terungkapnya pelaku penyerbuan Lapas Cebongan (SKH KR)**, 11 oknum anggota Kopassus disosokkan sebagai para ‘prajurit ksatria’ yang telah berani mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab atas segala resiko dari aksi penyerbuan yang dilandasi oleh jiwa korsa yang membangkitkan rasa solidaritas membela kehormatan kesatuan Kopassus yang dianggap telah dilecehkan dari tewasnya rekan mereka, Serka Heru Santoso. Selain itu juga disosokkan sebagai ‘penyelamat’ masyarakat Yogyakarta dengan memberantas premanisme dalam

aksi penyerbuan Lapas Cebongan tersebut. Sedangkan keempat tahanan titipan Polda DIY disosokkan sebagai ‘empat tahanan preman’ yang menjadi korban penyerbuan yang ditembak mati diruangan selnya karena merupakan tersangka pembunuhan salah satu anggota Kopassus, Serka Heru Santoso, dengan keji dan brutal.

Peneliti melihat bahwa sebelum terungkapnya pelaku, 11 oknum anggota Kopassus dan empat tahanan titipan Polda DIY disosokkan sebagaimana adanya peristiwa tersebut yaitu antara pelaku dan korban. Sementara saat terungkap bahwa pelakunya adalah oknum Kopassus, kemudian peneliti melihat sikap yang berbeda yang dilakukan SKH Kedaulatan Rakyat dari berita yang diterbitkannya. *Frame* beritanya menggambarkan penyosokan yang dilakukan SKH Kedaulatan Rakyat terhadap 11 oknum anggota Kopassus disosokkan dengan *gentle*, sementara empat tahanan titipan Polda DIY disosokkan sebagai preman yang ‘pantas’ mendapatkan tindakan yang disebut ‘pemberantasan premanisme’. Hal ini ditunjukkan dengan teks berita yang didominasi narasumber yang mendukung oknum Kopassus.

Ketika peneliti melakukan konfirmasi terkait hal tersebut dengan wartawan SKH Kedaulatan Rakyat, Wahyu Priyanti, yang bertugas meliput berita kasus Cebongan, peneliti menemukan alasan yang mendasari adanya penyosokan tersebut selain adanya tarik menarik kepentingan di lingkungan organisasi medianya. Melalui analisis dengan menggunakan teori “*Media Organizational Performance*” milik Denis Mc Quail, *frame* berita yang membentuk penyosokan terhadap 11 oknum anggota Kopassus dan empat tahanan titipan Polda DIY yang

dilakukan SKH Kedaulatan Rakyat dipengaruhi oleh kebijakan redaksional. Sesuai dengan teori tersebut, suatu kebijakan redaksional untuk produksi berita penyerbuan Lapas Cebongan ini pun lahir dari tarik menarik kepentingan lokal baik internal maupun eksternal, yang hidup di sekitar organisasi media, seperti pemilik saham terbesar (*owners*), pengiklan (*advertisers*), masyarakat (*audiences*) pendukung oknum Kopassus yang disebut sebagai ‘pasar’ yang disasar untuk menjual berita tersebut, dan narasumber (*sources*). Kekuatan pengaruh dari kepentingan “pasar lokal” ini menunjukkan ideologi SKH Kedaulatan Rakyat yakni **Kapitalisme**. Hal ini diakui oleh Wahyu Priyanti sebagai wartawan yang cukup lama bekerja di SKH Kedaulatan Rakyat ketika berbicara tentang pengaruh *advertisers* juga *audiences* sebagai pasar lokal yang menjadi tujuan utama untuk ‘menjual’ berita terkait kasus Cebongan. Selain itu, pengetahuan Wahyu Priyanti atas *track record* tindak kejahatan yang dilakukan empat tahanan titipan Polda DIY yang dikenal sebagai Diki Cs, menjadi *background* dalam penonjolan fakta yang membentuk *frame* berita yang menghasilkan penyosokan di atas.

Sebagai media cetak nasional, Harian Kompas memiliki tanggung jawab menyebarkan berita kepada seluruh masyarakat luas. Untuk itu Harian Kompas memiliki sebuah pedoman yang berpegang pada norma dan etika jurnalistik dalam menyeleksi peristiwa untuk diangkat menjadi berita. Pedoman itu kemudian menjadi kebijakan Harian Kompas dalam pembentukan berita, yakni memilih peristiwa yang memiliki “nilai berita” yang harus berskala nasional, seperti memiliki tingkat pengaruh yang luas, berkaitan dengan kebijakan publik, memiliki nilai humanistik yang tinggi, menyangkut kredibilitas negara,

mempengaruhi harkat dan martabat rakyat banyak, berkaitan dengan tokoh yang kuat, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan sebagainya (hasil wawancara dengan Aloysius Budi Kurniawan – wartawan Harian Kompas).

Peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan memiliki nilai berita yang menjadi kriteria dalam penyeleksian fakta oleh Harian Kompas sehingga diberitakan dan yang menjadi objek penelitian ini yang terbit pada edisi Maret-April 2013. Peneliti memiliki enam berita untuk diteliti dari pemberitaan Harian Kompas. Dari hasil analisis level teks, peneliti menemukan *frame media* Harian Kompas dalam pemberitaan peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan adalah tindak kejahatan yang jika dilihat dari segi pelaku adalah 11 oknum anggota Kopassus dengan motif balas dendam (yang disebut bangkitnya jiwa korsak) merupakan sebuah ‘ironi’, yang memerlukan keterlibatan semua pihak khususnya aparat keamanan dan penegak hukum negara untuk menguatkan kepastian hukum agar tercipta penegakan hukum yang adil dan tegas untuk menangani kasus Cebongan tersebut. Dari frame berita tersebut, kemudian peneliti menemukan penyosokan yang dilakukan Harian Kompas terhadap 11 oknum anggota Kopassus dan empat tahanan titipan Polda DIY.

**Sebelum terungkapnya pelaku penyerbuan Lapas Cebongan (Harian Kompas)**, 11 oknum anggota Kopassus disosokkan sebagai ‘gerombolan penyerang bersenjata lengkap’ yang tidak menghormati penegakan hukum negara karena telah menewaskan empat tahanan dengan keji di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai simbol “rumah negara”. Sementara empat tahanan titipan Polda DIY disosokkan sebagai ‘korban dari sikap tidak patuh dan tidak hormat

oleh segerombolan penyerang bersenjata lengkap pada penegakan hukum negara', dan sebagai 'korban dari melemahnya penjagaan aparat negara pada tahanan'. Sedangkan **setelah terungkapnya pelaku penyerbuan Lapas Cebongan (Harian Kompas)**, 11 oknum anggota Kopassus disosokkan sebagai aparat hukum yang tidak menghargai penegakan hukum, dengan mencederai nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang besar hanya untuk kepentingan mikro (jiwa korsa terhadap satuan Kopassus), serta perlu ditindak dengan penegakan hukum yang tegas dan seadil-adilnya. Sementara keempat tahanan titipan Polda DIY disosokkan dari 'korban' menjadi 'preman' yang terbentuk dari tanggapan pihak Kopassus juga warga Yogyakarta, yang justru membuktikan tumbuhnya premanisme yang memperlihatkan kelemahan pemerintah dalam hal penegakan dan ketidakpastian hukum. Sehingga peneliti melihat, Harian Kompas dalam melakukan pembingkai berita untuk menyosokkan empat tahanan titipan Polda DIY sebagaimana adanya sosok itu dalam peristiwa Cebongan.

Baik sebelum maupun sesudah terungkapnya pelaku, 11 oknum anggota Kopassus dibentuk sosoknya sebagai pelanggar hukum yang tidak menghormati penegakan hukum, namun setelah terungkapnya pelaku memang penyosokan tersebut memiliki makna lebih dalam di mana sebagai aparat keamanan yang harusnya menjaga ketertiban dan menghormati hukum, justru melanggarnya dengan main hakim sendiri adalah sebuah 'ironi'. Sementara empat tahanan titipan Polda DIY, disosokkan Harian Kompas sebagaimana adanya sesuai dengan alur pengungkapan kasus Cebongan. Hal ini terbentuk karena Harian Kompas konsisten dalam frame beritanya dari awal hingga berita keenam yang menjadi

objek penelitian ini yaitu pada “aspek penegakan hukum”. Hasil temuan ini peneliti konfirmasi dengan mewawancarai wartawan Harian Kompas yang ditugaskan dalam meliput kasus Cebongan, yang memiliki inisial ABK. Dari hasil wawancara ini peneliti menemukan kunci dari terbentuknya frame media Harian Kompas yang peneliti lihat dengan menggunakan skema proses framing berita milik Dietram A. Scheufele yakni “*A Process Model Of Framing Research*” dalam jurnal penelitiannya berjudul “*Journal of Communication*” (1999).

Dengan proses model framing ini, peneliti dapat melihat bahwa bagian *inputs* yang terdiri dari ideologi wartawan, ideologi media, dan kepentingan elit politik dan ekonomi, sangat mempengaruhi alur *process* framing yang dimulai dari *frame building*, *frame setting*, *individual-level effects of framing*, dan *journalist as audience*, yang kemudian menghasilkan *media frames* sebagai *outcomes*. Tahapan ini akan terus berputar dari awal (*frame building*) kemudian kembali ke awal lagi secara terus menerus. Dalam Harian Kompas, pemberitaan kasus Cebongan tidak melibatkan kepentingan para elit politik dan ekonomi sebagai bagian *inputs*, tapi yang paling besar pengaruhnya adalah pandangan media dan wartawan sebagai ideologi dalam ‘melihat’ kasus ini. Pandangan wartawan mewakili pandangan media yang melihat kasus ini sebagai bentuk pelanggaran hukum ‘serius’, karena telah mencoreng wibawa hukum. Pandangan ini terbentuk dari fakta-fakta yang dilihat Aloysius Budi Kurniawan sebagai wartawan, bahwa kasus Cebongan ini bukan sekedar ‘aksi balas dendam’ semata, tapi ada berbagai kepentingan berlapis yang menungganginya. Hal ini memperlihatkan ideologi media dan para pekerja di dalamnya sebagai nilai dari

visi-misi Harian Kompas yakni '*Humanisme Transcendental*'. Ideologi Harian Kompas ini menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai menghargai manusia dan nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok (Santoso, 2004: 3). Kepentingan kelompok di sini ialah yang tertindas. Terlihat dari pemberitaan Harian Kompas khususnya terkait kasus Cebongan menunjukkan nilai menghargai manusia serta nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Frame media yang terbentuk dipengaruhi pandangan individu wartawan dan media (*inputs*) kemudian dikemas menjadi pemberitaan yang memiliki frame berita yang konsisten pada penegakan hukum, karena Harian Kompas berpegangan pada penyebaran informasi untuk kepentingan nasional. Dari analisis level teks dan konteks maka penyosokan yang dilakukan Harian Kompas terhadap 11 oknum anggota Kopassus cenderung negatif, sementara empat tahanan titipan Polda DIY disosokkan sebagai bukti dari melemahnya fungsi aparat keamanan dan penegakan hukum negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas terlihat perbedaan *frame* berita yang menghasilkan penyosokan terhadap 11 oknum Kopassus dan empat tahanan titipan Polda DIY dalam penyerbuan Lapas Cebongan antara media cetak lokal dan media cetak nasional. Media cetak lokal yang diwakili oleh surat kabar harian tertua di Yogyakarta, SKH Kedaulatan Rakyat dalam membentuk *frame* berita kasus Cebongan cenderung melihat pada kepentingan-kepentingan "pasar lokal", salah satunya pembelaan masyarakat Yogyakarta terhadap Kopassus dalam pemberantasan premanisme. Sehingga menempatkan SKH Kedaulatan Rakyat



sebagai media yang mengacu pada *profit oriented*. Sedangkan media cetak nasional yakni Harian Kompas mengemas fakta dan menampilkan *frame* berita yang cenderung pada kepentingan nasional, yaitu aspek penegakan hukum, pembelajaran pada masyarakat luas terkait fungsi aparat keamanan dan penegak hukum yang seharusnya menghormati wibawa penegakan hukum. Hal tersebut menunjukkan perbedaan ideologi kedua media, SKH Kedaulatan Rakyat dengan ideologi *Kapitalisme* dan Harian Kompas adalah *Humanisme Transcedental*, mempengaruhi perbedaan terbentuknya frame media yang menghasilkan penyosokan terhadap 11 oknum anggota Kopassus dan empat tahanan titipan Polda DIY dalam pemberitaan penyerbuan Lapas Cebongan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dengan perangkat *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, peneliti merasa model analisis tersebut sesuai untuk mengungkap perbedaan konstruksi atas realitas yang ditunjukkan dari *frame* berita yang menghasilkan penyosokan terhadap 11 oknum anggota Kopassus dan empat tahanan titipan Polda DIY dalam penyerbuan Lapas Cebongan pada SKH Kedaulatan Rakyat (media cetak lokal) dan Harian Kompas (media cetak nasional). Namun, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum bisa dikatakan sempurna, masih banyak kekurangan dalam proses penelitian yang melibatkan dua media sebagai objek penelitian. Dengan proses yang panjang dalam analisis *framing*, selain dibutuhkan data yang lengkap, juga dibutuhkan ketelitian, kesabaran, ketekunan, serta ketajaman berpikir dalam menganalisis baik level teks maupun konteks pada kedua media. Oleh karena itu, peneliti

menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mencoba menganalisis dengan objek yang beragam lainnya, misalnya meneliti *frame* berita terkait isu nasional antara media cetak lokal yang tertua dan termuda di suatu daerah, atau isu yang mempengaruhi kebijakan secara global antara media cetak nasional Indonesia dan media cetak luar negeri. Namun untuk pemilihan metode analisis *framing* dapat disesuaikan dengan pemberitaan dari media cetak yang dipilih untuk diteliti, karena tidak semua teks berita dari media cetak tertentu cocok dengan satu model *framing* seperti model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada perbedaan *frame* berita yang dikonstruksi dari pengemasan fakta atas realitas yang terjadi, menunjukkan kecenderungan arah penyosokan yang dilakukan oleh SKH Kedaulatan Rakyat dan Harian Kompas. Peneliti melihat SKH Kedaulatan Rakyat telah menjalankan fungsinya sebagai aspirasi suara masyarakat dengan memberitakan kasus penyerbuan Lapas Cebongan dari kepentingan lokal masyarakat yang menginginkan adanya pemberantasan premanisme, serta kepentingan lokal terselubung lainnya yang tidak dapat terungkap dari hasil wawancara pada wartawan SKH Kedaulatan Rakyat. Pandangan wartawan sebagai wakil SKH Kedaulatan Rakyat dalam mengkonstruksikan realitas di lapangan, terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan ini kemudian berpengaruh pada pemilihan narasumber yang didominasi oleh pihak yang “pro” terhadap tindakan oknum Kopassus tersebut. Peneliti berharap, baik wartawan maupun organisasi media SKH Kedaulatan Rakyat meskipun beralih pada penyesuaian dengan keinginan ‘pasar’ lokal, namun tetap dapat menampilkan berita yang seimbang. Hal itu

dapat dilakukan dengan menampilkan narasumber yang bersikap ‘netral’ pada kasus Cebongan, sehingga narasumber tersebut dapat menyeimbangkan arah wacana dan dapat memenuhi aspek *cover both sides* dalam pemberitaannya. Selain itu, ketika berpegang pada sebuah ‘citra’ sebagai surat kabar yang “wangi” sesuai budaya masyarakat Yogyakarta yang santun dengan tidak menampilkan berita yang terlalu tajam, keras, ataupun frontal, maka tunjukkanlah itu pada praktek produksi beritanya. Sebab apa yang peneliti lihat dalam pemberitaan kasus Cebongan tidak membuktikan hal yang dikatakan “wangi” tersebut, karena pemberitaannya memuat kutipan pernyataan-pernyataan narasumber yang cenderung mengandung “kontroversi” dan memancing “emosi” masyarakat baik yang pro maupun kontra dengan aksi oknum Kopassus dalam penyerbuan Lapas Cebongan. Contohnya saja komentar dari Ketua Tim Investigasi TNI AD pada berita ke-3 “Penyerang Lapas Siap Tanggung Jawab”, yang sering mengungkapkan tindakan keempat tahanan titipan Polda DIY yang disebut ‘keji dan sadis’. Menurut peneliti berita itu berpotensi mengundang emosi masyarakat pada keempat tahanan titipan Polda DIY tersebut. Selain itu juga berita ke-6 “Komnas HAM Tumpul Hadapi Preman”, peneliti mengamati berita itu sangat kontroversial sekali ketika mengangkat judul dengan menyudutkan kinerja Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan.

Sementara untuk Harian Kompas, meskipun sudah memenuhi aspek *cover all sides* dalam setiap pemberitaannya, namun kecenderungan pemberitaan yang menonjolkan suatu isu sangatlah nampak sebagai pandangan wartawan maupun

media. Upaya untuk menampilkan opini atas pendefinisian wartawan juga media terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan sangat menonjol. Upaya yang dimaksud terlihat dari setiap berita yang tidak pernah ketinggalan *sources* dari para pengamat yang komentar dan penjelasannya terlihat selalu mendukung arah wacana dari Harian Kompas. Hal itu tidak menjadi maslaha sejauh pada pemberitaan terhadap kasus lainnya hal tersebut dilakukan untuk memberikan pembelajaran bagi masyarakat, bukan justru nantinya bisa menjerumuskan pada suatu opini yang diusung Harian Kompas karena ada kepentingan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin, 2004, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuroto, Totok, 2000, *Manajemen Penerbitan Pers*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing*, Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.
- Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, (Cetakan V). Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.
- Hamad, Ibnu, 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Jakarta: Granit.
- Mc Quail, Denis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage Publication.
- Moleong, Lexy. J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Mondry, 2004, *Pemahaman Teori dan Praktik jurnalistik*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oliver, Sandra, 2001, *Strategi Public Relation*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ruslan, Rosady, 2005, *Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, F.A., 2004, *Buka Mata dengan Kompas: Sejarah, Organisasi, Visi dan Misi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Santoso, JB. 2005. *Seteguh Hati Sekolah Nurani*. Yogyakarta: PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat.
- Sobur, Alex, 2006, *Analisis Teks Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Vivian, John, 2008, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Kencana.

## **JURNAL ILMIAH**

Scheufele, Dietram A. 1999. *Framing as a Theory of Media Effects*. Journal of Communication. Winter.

## **SKRIPSI**

Davita, Emerita Rosalinda. 2014. *Perbandingan Komunikasi Krisis Oleh Media Massa dalam Insiden Kecelakaan Tur Penerbangan Sukhoi Superjet 200 di Indonesia. Analisis Framing dalam Surat Kabar Harian Koran Tempo dan Kompas*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Mahargyaningtyas, Yudit. 2010. *Polemik Pengusulan Hak Angket Kasus Bank Century Dalam Surat Kabar Harian Umum Jurnal Nasional. Analisis Framing Pemberitaan Polemik Pengusulan Hak Angket Kasus Bank Century dalam SKH Umum Jurnal Nasional edisi 13 November – 1 Desember 2009*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Patiung, Yosua Yanuard. 2012. *Profil Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Bingkai Berita The Jakarta Post. Analisis Framing Profiling BIN dalam Berita Mengenai Status dan Permasalahan BIN pada Halaman Headline dan Expose The Jakarta Post Periode 14-15 Maret 2011*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

## **INTERNET**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diunduh dari: [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id).

**Analisis Teks Berita 1 (SKH Kedaulatan Rakyat)**

**Judul : 4 Tahanan Tewas (Lapas Cebongan Sleman Diserbu)**

**Edisi : Minggu, 24 Maret 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b> Penyerbuan Lapas Cebongan oleh segerombolan pria bersenjata api laras panjang yang menewaskan empat tahanan titipan Polda DIY.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Gerombolan Pelaku Penyerbuan Lapas Cebongan</b> Pihak yang melakukan aksi penyerbuan ke Lapas Cebongan, sekitar 20 pria dengan bersenjata api laras panjang dan menembak mati empat tahanan titipan Polda DIY.</li> <li>➤ <b>Empat Tahanan Titipan Polda DIY</b> Empat tahanan yang dititipkan oleh Polda DIY ke Lapas Cebongan ini ialah tersangka pembunuh</li> </ul>	<p><b>Jenis Wacana</b> <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 1)</b> Segerombolan pria bersenjata api laras panjang, Sabtu (23/3) dini hari menyerbu Lembaga Permasalahatan (Lapas) Kelas II B Sleman yang terletak di Cebongan Sleman. ....</li> <li><b>(kalimat 2; paragraf 1)</b> ..... meminta menunjukkan ruang tahanan empat tersangka pembunuh anggota Kopassus .....Sertu Santosa (31).</li> <li><b>(pada paragraf 2)</b> Dalam waktu 5 menit, empat tahanan Polda DIY ini pun tewas diberondong tembakan.</li> <li><b>(pada paragraf 3)</b> Tragisnya, penembakan disaksikan 31 tahanan lain yang berada di blok yang sama dengan tersangka, .....</li> </ul>	<p><b>Placement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita ini tertulis dalam SKH Kedaulatan Rakyat edisi Minggu, 24 Maret 2013. Berita ini ditempatkan menjadi <i>headline</i> dengan judul yang besar dan gambar grafis sebuah ilustrasi kejadian yang cukup besar, sehingga membuat berita ini menjadi “<i>point of interest</i>” pada halaman.</li> <li>➤ <b>Judul:</b> 4 Tahanan Tewas (Sub Judul: Lapas Cebongan Sleman Diserbu). <b>FUNGSI:</b> Pemilihan judul ini menggambarkan tewasnya 4 tahanan lapas karena adanya aksi penyerbuan terhadap Lapas Cebongan.</li> </ul>	<p><b>Metaphors</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“segerombolan”</b> Kata tersebut berasal dari kata gerombol, yang dalam KBBI ge-rom-bol atau ge-rom-bol-an, berarti kelompok, kawan-an, kawan-an pengacau, pasukan, penjahat-penjahat ~ sepuluh sampai lima belas orang. Kata ini mengacu pada sebuah kelompok yang mengarah pada hal negatif. Kata ini terdapat pada <i>lead</i> berita yang menunjukkan adanya sebuah kelompok pengacau yang menyerbu Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>“diseret”</b> Istilah ini digunakan pada paragraf 3 dan 5. Hal ini menunjukkan arti yang sebenarnya yaitu membawa dengan paksa yang mengacu pada pelaku yang memaksa</li> </ul>

<p>Sertu Santosa, Empat tahanan tersebut adalah Adrianus Candra alias Dedi, Hendrik Benyamin Sahetapi alias Dicky, Gameliel Yermianto alias Adi Lado, dan Yohanes Juan Mambait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Sertu Santosa</b> Anggota Kopassus Grup II Surakarta, yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh empat tahanan Polda DIY.</li> <li>➤ <b>31 Tahanan Lapas Cebongan di Blok Anggrek</b> Tahanan lain yang berada dalam satu blok dengan empat tahanan yang menjadi sasaran dan menyaksikan penembakan mati oleh gerombolan pelaku penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Sipir Lapas Cebongan</b> Bertugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan tahanan yang berada dalam Lapas Cebongan dan saat kejadian berusaha melindungi tahanan. Namun dua sipir ditodong dan diseret hingga tempat penyimpanan CCTV dan ke ruang empat tahanan yang menjadi target</li> </ul>	<p><b>(kalimat 2; paragraf 3)</b> ..... pelaku diperkirakan berjumlah 20 orang dan memakai penutup wajah.....</p> <p><b>(pada paragraf 4)</b> ..... Sambil menodong dengan senjata laras panjang, mereka kemudian meminta sipir menunjukkan ruang tahanan keempat tersangka yang dititipkan Polda DIY.....</p> <p><b>FUNGSI:</b> Melalui paragraf 1 sampai 4, menggambarkan dengan cukup jelas ciri-ciri pelaku penyerbuan Lapas Cebongan. SKH KR mencoba mengarahkan identitas pelaku dengan menuliskan senjata yang digunakan dan cara yang memakan waktu tidak lama dalam menyelesaikan aksi penyerbuannya serta dengan target yang jelas yaitu empat tahanan titipan Polda DIY yang dituliskan dalam paragraf 1 dan 2. Melalui keempat paragraf tersebut juga SKH KR menunjukkan kekejaman yang terjadi dalam aksi penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 9)</b> Kapolda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pen Yosokan terhadap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan masih seputar identifikasi awal siapakah pelaku, yang tersebar dari awal hingga akhir berita dengan menuliskan fakta yang menggambarkan alur peristiwa terjadinya penyerbuan Lapas Cebongan. Sementara, penyosokan terhadap empat tahanan yang tewas dalam aksi penyerbuan Lapas Cebongan ini, hanya terdapat sebagian kecil di bagian awal berita.</li> <li>➤ Dari <i>lead</i> berita hingga paragraf empat membahas tentang pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang merupakan segerombolan pria berpenutup wajah dengan senjata api laras panjang dan juga membawa granat, memaksa masuk lapas serta menembak mati empat tahanan titipan Polda DIY di depan 31 tahanan yang lain dalam waktu yang singkat, 5 menit.</li> <li>➤ Pada paragraf pertama dan</li> </ul>	<p>Sipir Lapas Cebongan untuk menunjukkan ruang tahanan targetnya dan ruang penyimpanan kaset CCTV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“menyerbu”</b> Kata ini berasal dari kata serbu, yang artinya mendatangi beramai-ramai dengan maksud melawan atau menyerang. Kata ini terdapat masih pada <i>lead</i> berita yang merujuk pada situasi di mana Lapas Cebongan diserang oleh segerombolan pria bersenjata api laras panjang.</li> <li>➤ <b>“menembak mati”</b> Kalimat ini terdapat pada paragraf dua yang menggambarkan situasi di mana pelaku melepaskan peluru dari senjata api laras panjangnya terhadap targetnya. Menembak mati mengacu pada situasi target langsung meninggal karena tembakan tanpa ada perlawanan.</li> <li>➤ <b>“tewas diberondong tembakan”</b> Kalimat ini terdapat pada paragraf 2 yang mengacu pada kondisi korban yang tak</li> </ul>
--	--	--	--



<p>dan delapan sipir lainnya disekap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Kepala Keamanan Lapas Cebongan, Widiatmono</b> Penanggung jawab keamanan Lapas Cebongan yang menemui dan menolak keinginan pelaku penyerbuan untuk memasuki Lapas, juga sekaligus menghubungi Kepala Lapas Cebongan yaitu Sukmato.</li> <li>➤ <b>Kapolda DIY, Brigjen Pol Drs. Sabar Rahardjo</b> Pimpinan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan keprihatinannya dan menyesalkan kejadian tersebut. Sekaligus menegaskan alasan penitipan empat tahanan ke Lapas Cebongan.</li> </ul> <p><b>Pelantun Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Wartawan</b> Pihak yang mengisahkan fakta dengan memberitakan kronologi terjadinya penyerbuan Lapas Cebongan yang menewaskan empat tahanan titipan Polda DIY oleh gerombolan pria bersenjata.</li> <li>➤ <b>Kepala Lapas Sleman,</b></li> </ul>	<p>DIY Brigjen Pol Drs. Sabar Rahardjo menyatakan ikut prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut, meningat para korban adalah tahanan titipan Polda DIY yang dititipkan ke Lapas Sleman. ..... <b>(kalimat 3; paragraf 9)</b> Terkait penitipan tahanan tersebut, Kapolda menegaskan hal itu dikarenakan sedang ada renovasi ruang tahanan Polda. ...., juga ada tujuh tersangka lain juga dititipkan ke Lapas. <b>FUNGSI:</b> Berita ini ditutup dengan turut prihatinnya Kapolda DIY. Keprihatinan ini ingin menunjukkan adanya penyesalan dari pihak kepolisian yang terpaksa menitipkan tahananannya ke Lapas Cebongan karena ruang tahanan Polda DIY sedang direnovasi. Penegasan Kapolda DIY yang ditunjukkan lewat kalimat terkahir dalam paragraf ke-9, yaitu tidak hanya 4 tahanan tewas tersebut yang dititipkan, tapi ada tujuh lainnya, ingin</p>	<p>kedua terselip penjelasan mengenai target dari penyerbuan Lapas Cebongan ini, yaitu empat tahanan Polda DIY dengan kasus pembunuhan anggota Kopassus, Sertu Santosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Paragraf lima sampai delapan berisi tentang kronologis peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan yang dijelaskan oleh Kalapas Sleman, Sukamto. Ia menggambarkan dengan cukup detail peristiwa yang terjadi dan menjelaskan tentang tindakan apa yang segera dilakukannya setelah mendapat kabar dari Widiatmono, Kepala Keamanan, saat peristiwa penyerbuan terjadi.</li> <li>➤ Berita ini ditutup (paragraf 9) dengan keprihatinan Kapolda DIY yang juga menyesalkan kejadian tersebut. Dalam paragraf ke-9 ini juga dijelaskan penegasan Kapolda DIY terhadap alasan dari dititipkannya empat tahanan Polda DIY yang tewas dalam</li> </ul>	<p>bernyawa lagi karena ditembak bertubi-tubi, dihujani peluru dengan beruntun oleh pelaku penyerbu Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“tragisnya”</b> Istilah ini menggambarkan sebuah peristiwa yang amat menyedihkan. Terdapat pada paragraf 3 yang menunjukkan situasi yang amat menyedihkan karena penembakan disaksikan oleh 31 tahanan lain yang berada pada blok yang sama dengan target.</li> <li>➤ <b>“berbadan kekar”</b> Pada paragraf 4, istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu ciri-ciri para pelaku yang berbadan tegap dan kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku adalah sekelompok orang yang badannya terjaga dan terlatih secara fisik sehingga menghasilkan badan kekar.</li> <li>➤ <b>“memberondongnya dengan tembakan”</b> Kalimat ini terdapat pada paragraf 5 yang menjelaskan bagaimana pelaku melakukan</li> </ul>
--	--	--	---

<p><b>Sukamto</b> Pimpinan Lapas Cebongan yang memberikan keterangan seputar kejadian penyerbuan lapas.</p>	<p>memastikan bahwa ruang tahanan Polda DIY benar-benar dalam keadaan sedang direnovasi.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Kepala Lapas Sleman, Sukamto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> “... Ada sekitar 20 pelaku, namun saya yakin ada pelaku lain menunggu di luar Lapas,” jelas Ka Lapas Sleman Sukamto. .....</li> <li><b>(pada paragraf 6)</b> “Penembakan disaksikan 31 tahanan lainnya. Ada sekitar 30 selongsong dan sisa peluru aktif ..... Peristiwanya terjadi sangat cepat, hanya 15-20 menit,” tutur Sukamto.</li> <li><b>(pada paragraf 7)</b> Ia menambahkan, tahanan lain ..... shock.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Penuturan Sukamto, Kepala Lapas Sleman, menegaskan tentang adanya peristiwa penyerbuan Lapas cebongan yang telah menewaskan empat tahanan titipan Polda DIY. Pemaparan peristiwa yang dituturkan oleh sang Kepala Lapas Sleman ini seolah ingin memperjelas</p>	<p>aksi penyerbuan di Lapas Cebongan.</p>	<p>aksinya dalam menewaskan keempat korbannya.</p> <p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Lapas Cebongan diserbu</b></li> <li>➤ <b>Segerombolan pria bersenjata api laras panjang</b></li> <li>➤ <b>Empat tahanan titipan Polda DIY</b></li> <li>➤ <b>Tersangka pembunuh anggota Kopassus, Sertu Santoso</b></li> </ul> <p><b>Visual Images</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Visual image</i> yang digunakan dalam berita ini adalah sebuah gambar grafis. Grafis tersebut menggambarkan peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan.</li> </ul>
---	---	---	---

	<p>tindakan kejam pelaku, yang tidak hanya melukai para sipir lapas dalam melakukan aksinya, juga melakukan penembakan di depan 31 tahanan lain di ruang tahanan yang sama terhadap target penyerbuan, dengan meninggalkan 30 selongsong dan sisa peluru aktif di lokasi kejadian. Penjelasan dari Sukamto ini juga mengarah pada pelaku yang sudah terlatih dengan penuturannya yang mengungkapkan bahwa aksi penyerbuan yang berakibat seperti itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Kepala Lapas Cebongan Sleman sebagai narasumber tunggal yang memberikan keterangan langsung dalam berita ini menguatkan informasi yang didapatkan oleh SKH Kedaulatan Rakyat mengenai kronologis peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan. Tidak adanya informasi mendalam seputar 4 tahanan yang tewas baik dari pihak keluarga maupun rekan korban misalnya kuasa hukum keempat tersangka, membuat berita ini terlihat lebih fokus menguraikan kronologis peristiwa penyerbuan yang terjadi.</p>		<p style="text-align: center;"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Penempatan informasi dalam teks berita ini yang didominasi oleh aksi penyerbu Lapas Cebongan, serta penggunaan istilah metafor yang banyak menyudutkan pelaku, menempatkan pelaku penyerbuan Lapas Cebongan sebagai pihak yang kejam dalam melakukan aksinya.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEDIA FRAME</b></p> <p>SKH Kedaulatan Rakyat menempatkan pelaku penyerbu Lapas Cebongan yang kejam melakukan aksinya sebagai pihak yang lebih perlu mendapat perhatian dari masyarakat sebagai pembaca. Informasi yang lebih dominan terkait pelaku penyerbu Lapas Cebongan dalam kronologis kejadiannya ini mengarahkan masyarakat untuk lebih fokus pada siapa pelaku berdasarkan ciri dan caranya dalam melakukan aksinya tersebut.</p>			

**Analisis Teks Berita 2 (SKH Kedaulatan Rakyat)**

**Judul : 31 Peluru di Tubuh 4 Korban (Penyerbu Lapas Cebongan Belum Teridentifikasi)**

**Edisi : Senin, 25 Maret 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b> Penyelidikan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang belum teridentifikasi, di mana menewaskan empat tahanan titipan Polda DIY dengan meninggalkan 31 peluru bersarang ditubuh korban.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Wacana ini muncul pada hari kedua pasca peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan. Berita ini menginformasikan tentang belum terungkapnya pelaku penyerbuan yang menembak mati empat tahanan titipan Polda DIY dan meninggalkan 31 peluru di tubuh keempat korban. Kedaulatan Rakyat memaparkan kronologis kejadian untuk memperlihatkan aksi pelaku penyerangan Lapas Cebongan sebagian besar dalam berita ini berdasarkan keterangan</p>	<p><b>Jenis Wacana</b> <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 1)</b> Pihak kepolisian belum berhasil mengidentifikasi pelaku penyerbuan..... empat tahanan tewas. .... 31 peluru bersarang di tubuh mereka. .... cara diberondong, mengingat waktu eksekusi dilakukan sangat cepat.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 2)</b> ..... “Di tubuh keempat tersangka ada 31 peluru,” ungkap Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Raharjdo di Mapolda, Minggu (24/3).</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Wacana di atas seolah ingin menggambarkan bagaimana sadisnya aksi penembakan yang dilakukan oleh pelaku penyerbuan yang dilakukan dengan sangat cepat.</p>	<p><b>Placement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita ini tertulis dalam SKH Kedaulatan Rakyat edisi Senin, 25 Maret 2013. Berita ini ditempatkan di bagian atas pada halaman pertama. Berita ini menjadi <i>headline</i> dengan judul yang besar dan foto yang berukuran cukup mencolok di atas judul berita, sehingga membuat berita ini menjadi “<i>point of interest</i>” pada halaman paling depan dari SKH Kedaulatan Rakyat ini.</li> <li>➤ <b>Judul:</b> 31 Peluru di Tubuh 4 Korban (Sub Judul: Penyerbu Lapas Cebongan Belum Teridentifikasi).</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Pemilihan judul ini menunjukkan belum terungkapnya siapa pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang menembak mati empat</p>	<p><b>Metaphors</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“eksekusi”</b> Pada pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan. Sementara pada berita ini, istilah “eksekusi” digunakan dalam paragraf 1 untuk merujuk pada penembakan yang dilakukan dalam aksi penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>“empat tersangka”</b> Pada berita edisi sebelumnya, SKH KR masih menuliskan 4 tahanan tewas sebagai “korban”, namun pada edisi kali ini SKH KR telah menempatkan para korban tersebut dalam sepanjang teks beritanya sebagai keempat tersangka. Hal ini menunjukkan</li> </ul>

<p>dari seorang narasumber yang disembunyikan identitasnya dan disebut sebagai <i>SUMBER KR</i>.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Empat Tahanan Titipan Polda DIY</b> Menjadi target yang ditembak mati oleh penyerbu Lapas Cebongan. Dalam wacana ini, jenazah dari keempat tahanan diotopsi di RSUP Sardjito.</li> <li>➤ <b>Gerombolan Penyerbu Lapas Cebongan</b> Pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang menembak mati empat tahanan titipan Polda DIY. Dalam wacana ini, gerombolan pelaku tersebut masih belum teridentifikasi.</li> <li>➤ <b>Sertu Santosa</b> Anggota Kopassus Grup II Surakarta, korban pembunuhan yang dilakukan oleh empat tahanan Polda DIY.</li> <li>➤ <b>Kabid Humas Polda DIY, AKBP Anny Pudjiastuti</b> Dalam wacana ini, sebagai Kabid Humas Polda DIY, AKBP Anny Pudjiastuti menginformasikan tentang</li> </ul>	<p>Keterangan ini diperkuat KR dengan memasukkan pernyataan Kapolda DIY yang menegaskan bahwa terdapat 31 peluru di tubuh keempat korban. Namun dalam berita ini, keempat korban (yang tertulis dalam judul berita), ditulis bukan lagi sebagai <i>4 korban</i> tapi <i>empat tersangka</i>. Hal ini menarik, karena KR menempatkan korban penembakan dalam beritanya tidak sebagai korban, namun target sasaran pelaku penyerbuan yang merupakan tersangka pembunuhan Sertu Heru Santoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 3 kalimat 5)</b> ..... apakah motif kasus itu terkait perbuatan keempat tersangka yang membunuh Sertu Santosa, Anny Pudjiastuti menegaskan masih dalam penyelidikan.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> KR meminta keterangan dari Kabid Humas Polda DIY mengenai motif kasus penyerbuan Lapas Cebongan. Hal ini menunjukkan adanya dugaan KR terhadap keterkaitan</p>	<p>tahanan titipan Polda DIY dengan meninggalkan 31 peluru bersarang di tubuh keempat korban tersebut. Sub judul yang dipilih menunjukkan bahwa pihak kepolisian masih belum berhasil mengidentifikasi pelaku. Sedangkan dari judul yang dipilih, menggambarkan bahwa dari proses hasil otopsi jenazah empat korban, sudah ada hasil yang menguatkan bahwa pelaku melakukan aksinya dengan sangat cepat, menembak empat targetnya dengan cara diberondong, sehingga meninggalkan 31 peluru di tubuh empat korban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penzosokan terhadap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan dalam berita ini tersebar dari awal hingga akhir berita melalui informasi terkait aksi penyerbuan pelaku ke Lapas Cebongan. Informasi mengenai hasil otopsi yang menunjukkan tertinggalnya 31 peluru di tubuh keempat korban penembakan mati di Lapas Cebongan</li> </ul>	<p>arti sebenarnya yaitu tersangka dalam pembunuhan Sertu Santoso. Menariknya di sini ialah SKH KR mulai menyosokkan korban sebagai target penyerbuan karena merupakan tersangka pembunuhan salah satu anggota Kopassus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“enggan memaparkan”</b> Dalam KBBI, kata “enggan” berarti tidak mau; tidak sudi; tidak suka. Kalimat tersebut terdapat pada paragraf 3 yang menunjukkan ketidakmauan atau ketidakbersediaan Kapolda memaparkan upaya yang dilakukan kepolisian dalam pengungkapan kasus penyerbuan Lapas Cebongan kepada publik melalui media.</li> <li>➤ <b>“motif”</b> Penggunaan kata “motif” pada paragraf 3 hendak mengacu pada keterkaitan latar belakang, tujuan, maupun alasan penyerbuan Lapas Cebongan dengan kasus keempat tahanan tewas yang ditanyakan wartawan SKH KR pada Kabid Humas Polda DIY.</li> <li>➤ <b>“eksekutor”</b></li> </ul>
---	--	---	---

<p>hasil olah TKP dan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Petugas Inafis Polda DIY</b> Tim <i>Indonesia Automatic Fingerprint Identification System</i> (Inafis) yang bertugas melacak dan mengumpulkan data tentang sidik jari yang tertinggal di TKP. Dalam wacana ini petugas Inafis Polda DIY melakukan olah TKP.</li> <li>➤ <b>Penyidik Polda DIY</b> Pihak kepolisian dari Polda DIY yang bertugas dalam penyelidikan kasus penyerbuan Lapas Cebongan. Dalam wacana ini, tim penyidik masuk ke Lapas Cebongan diduga untuk memeriksa saksi-saksi.</li> </ul> <p><b>Pelantun Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Wartawan</b> Sebagai pihak yang memiliki peranan besar dalam menyajikan informasi terkait belum teridentifikasinya pelaku penyerbuan Lapas</li> </ul>	<p>penyerbuan Lapas Cebongan dengan kasus empat korban yang disebut sebagai empat tersangka yaitu pembunuhan Sertu Heru Santosa. Melalui keterangan Kabid Humas ini maka KR ingin menegaskan bahwa pelaku penyerbuan Lapas Cebongan dan keterkaitan kasus di atas masih dalam tahap penyelidikan.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Kapolda DIY, Brigjen Pol Drs. Sabar Rahardjo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 2)</b> “..... ada 31 peluru,” ungkap Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo di Mapolda, Minggu (24/3).</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 3)</b> ..... penyelidikan belum mengarah ke pelakunya. Kapolda enggan memaparkan upaya yang dilakukan ..... dengan alasan untuk keperluan penyelidikan.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Kapolda DIY dalam berita ini menegaskan hasil otopsi jenazah. Namun, Kapolda DIY belum bersedia memaparkan pada masyarakat melalui media mengenai upaya yang dilakukan dalam</p>	<p>menggambarkan betapa sadisnya aksi yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, penyosokan terhadap pelaku penyerbuan juga tersirat dalam kronologi kejadian penyerbuan Lapas Cebongan yang disampaikan oleh seorang <i>SUMBER KR</i> yang tidak diinformasikan oleh KR identitas sang narasumber. Sementara penyosokan terhadap empat tahanan titipan Polda DIY dalam berita ini digambarkan sebatas sebagai tersangka pembunuh Sertu Santosa (anggota Kopassus) pada awal dan akhir berita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dari paragraf pertama hingga terakhir yaitu paragraf 12, menggambarkan penyosokan pelaku penyerbuan Lapas Cebongan melalui informasi hasil otopsi korban penembakan dan kronologi penyerbuan Lapas Cebongan dari narasumber KR yang disebut sebagai <i>SUMBER KR</i>.</li> <li>➤ Penyosokan terhadap empat tahanan titipan Polda DIY</li> </ul>	<p>Istilah ini digunakan dalam paragraf 5 untuk merujuk pada pelaku yang melakukan penembakan (“eksekusi” pada paragraf 1) terhadap keempat tahanan titipan Polda DIY.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“dieksekusi mati”</b> Kalimat ini dipakai pada paragraf 5 untuk menggambarkan kondisi yang mana empat tahanan tewas karena ditembak mati oleh pelaku penyerbuan.</li> </ul> <p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Penyerbuan Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>Pelaku penyerbu Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>4 Tahanan titipan Polda DIY tewas</b></li> <li>➤ <b>31 Peluru bersarang di tubuh 4 korban</b></li> <li>➤ <b>Pelaku penyerbuan belum teridentifikasi</b></li> <li>➤ <b>SUMBER KR</b></li> </ul> <p><b>Catchphrases</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Di tubuh keempat tersangka ada 31 peluru”</b> Pernyataan yang dilontarkan oleh Kapolda DIY pada</li> </ul>
--	--	--	--

<p>Cebongan yang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polda DIY.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Kapolda DIY, Brigjen Pol Drs. Sabar Rahardjo</b> Sebagai pimpinan kepolisian tertinggi di Polda DIY yang mengungkapkan hasil otopsi dari jenazah keempat tahanan yang tewas ditembak mati.</li> <li>➤ <b>Sumber KR</b> Informan yang dirahasiakan dan oleh KR namanya disebut sebagai <b>SUMBER KR</b>, memberikan informasi detail mengenai peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan. Selain itu juga mengungkapkan hal-hal yang menunjukkan para pelaku sangat terlatih dan profesional.</li> </ul>	<p>penyelidikan kasus tersebut. Hal ini menunjukkan kehati-hatian pihak kepolisian dalam fokus penyelidikan kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p><b>Pelantun Wacana: SUMBER KR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 6)</b> “Hanya satu pelaku yang menembak mati empat tersangka titipan Polda DIY tersebut,” ungkap sumber <i>KR</i> di Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 7)</b> ....., ada empat pelaku bersenjata laras panjang ..... mereka langsung memanggil-manggil nama keempat tersangka.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 9)</b> “..... ..” diberondong dengan tembakan dan tewas seketika. ....” ungkap sumber tersebut.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 10 kalimat 2)</b> ....., proses pencarian hingga penembakan keempat tersangka, dilakukan dengan sangat cepat.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 11)</b> ....., gerombolan pelaku berpenutup muka ..... Mereka menodong seluruh petugas Lapas dengan senjata laras panjang.</li> </ul>	<p>yang menjadi korban penyerbuan Lapas Cebongan dapat dilihat dalam paragraf 1-2 dan 7-10, di mana dalam semua paragraf yang disebutkan di atas empat tahanan yang menjadi korban dijelaskan sebagai target penyerbuan Lapas Cebongan karena merupakan tersangka pembunuhan salah satu anggota Kopassus yaitu Sertu Heru Santosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informasi yang dituliskan <i>KR</i> dari <b>SUMBER KR</b> mengenai kronologi kejadian penyerbuan Lapas Cebongan, dituliskan dalam porsi yang cukup dominan (ditulis sebanyak 7 dari 12 paragraf dalam berita ini, dimulai dari paragraf 5-12). Informasi tersebut menegaskan pada paragraf terakhir bahwa pelaku penyerangan Lapas Cebongan sangat terlatih dan profesional.</li> </ul>	<p>paragraf 2 menjelaskan mengenai hasil otopsi dari keempat jenazah tahanan yang tewas. Ditemukannya 31 peluru di badan keempat korban menguatkan informasi terkait cara pelaku menembakan senjata dengan memberondong tembakan ke tubuh korban dalam waktu yang cepat, dan itu adalah hal yang sadis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Jelas terlihat kalau para pelaku sangat terlatih dan profesional”</b> Pernyataan <b>SUMBER KR</b> pada paragraf akhir dari berita ini menunjukkan pelaku yang terlatih dan profesional terarah pada identitas pelaku yang berasal dari kelompok suatu institusi tertentu.</li> </ul> <p><b>Visual Images</b></p> <p>Dalam teks berita ini terdapat dua foto ratusan warga yang berkumpul pada waktu yang sama di dua tempat yang berbeda dengan tujuan yang sama yaitu demi kedamaian Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Pertama</b>, ratusan warga yang</li> </ul>
--	---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 12)</b> “Jelas terlihat pelaku sangat terlatih dan profesional,” ungkap sumber <i>KR</i> tersebut. <b>FUNGSI:</b> informasi yang disampaikan oleh <i>SUMBER KR</i> tersebut sangat detail, terlihat dari penjelasan yang dipaparkan <i>SUMBER KR</i> merupakan orang yang mengetahui dan mungkin saja menyaksikan peristiwa penyerbuan. Namun, <i>KR</i> melindungi identitas narasumber. Dari pemaparan yang disampaikan <i>SUMBER KR</i> ingin mengarahkan pada siapakah pelaku penyerbuan dengan memberikan analisisnya terhadap pelaku yang terlatih dan profesional serta menggunakan senjata api laras panjang.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 7 kalimat 2)</b> ... langsung mencari dengan memanggil-manggil nama keempat tersangka.</li> <li>➤ <b>(paragraf 9)</b> “Mungkin karena secara fisik tubuh tersangka beda dengan tahanan lain, ... mudah ditemukan ... <b>FUNGSI:</b> <i>SUMBER KR</i></li> </ul>		<p>tergabung dalam “Solidaritas Kemanusiaan” di Bundaran HI Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Kedua,</b> masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat anti Kekerasan Yogyakarta di Tugu Yogya.</li> </ul>
--	---	--	--



	<p>menjelaskan bahwa target sasaran dari pelaku penyerbuang Lapas Cebongan sangat jelas terarah pada empat tahanan titipan Polda DIY. <i>SUMBER KR</i> juga menyebutkan keempat korban sebagai keempat tersangka, hal ini berupaya menunjukkan bahwa korban ditembak mati karena merupakan tersangka pembunuhan Sertu Heru Santoso (anggota Kopassus). <i>SUMBER KR</i> ini juga menambahkan perbedaan fisik keempat korban untuk menunjukkan ciri-ciri keempat korban yang mencolok di antara kesemua tahanan yang berada dalam blok Anggrek 5 di Lapas Cebongan.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Minimnya narasumber yang dipilih SKH Kedaulatan Rakyat menempatkan berita ini mengarah pada sebuah fakta tertentu. Keterangan Kapolda DIY mengenai hasil otopsi jenazah keempat korban, menguatkan informasi kekejaman pelaku menembak keempat tahanan yang diuraikan <i>SUMBER KR</i>. Berita ini lebih mengarah pada fakta pelaku penyerbuang Lapas Cebongan yang belum teridentifikasi.</p>		<p style="text-align: center;"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Informasi yang didominasi dari keterangan <i>SUMBER KR</i>, membuat berita ini lebih menonjolkan pada fakta-fakta yang mengungkap pelaku penyerbu Lapas Cebongan.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEDIA FRAME</b></p> <p>Fakta ditemukannya 31 peluru di tubuh korban, menjadi dasar berita ini menunjukkan kejamnya pelaku dalam “mengeksekusi” keempat targetnya, tersangka pembunuhan Sertu Santoso, serta mengungkapkan identitas pelaku melalui informasi dari <i>SUMBER KR</i>.</p>			

**Analisis Teks Berita 3 (SKH Kedaulatan Rakyat)**

**Judul : Penyerang Lapas Siap Tanggung Jawab (Oknum Kopassus Turun Gunung, Akui Eksekusi Preman)**

**Edisi : Jumat, 5 April 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur SSKH KRiptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b> Identitas pelaku dan motif penyerangan Lapas Cebongan telah berhasil diungkap oleh Tim Investigasi bentukan TNI AD.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Setelah beberapa hari sebelumnya Kedaulatan Rakyat (SKH KR) mengangkat berita tentang peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan yang belum jelas siapa pelaku dan motif penyerangan Lapas, maka pada edisi ini SKH KR menampilkan berita yang memuat informasi tentang hal tersebut. Keterangan Ketua Tim Investigasi TNI AD dalam keterangan pers, digunakan SKH KR sebagai landasan informasi tentang terungkapnya pelaku penyerbuan yang merupakan</p>	<p><b>Jenis Wacana</b> <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 1)</b> Teka-teki ..., ... terjawab sudah. Tim investigasi ... mengungkap pelaku dan motif ... .., pelaku yang menewaskan empat tahanan preman ...</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 2)</b> “..., ... Grup 2 Kopassus yang mengakibatkan terbunuhnya empat tahanan preman,” tegasnya.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Kedaulatan Rakyat (SKH KR) melalui paragraf ini ingin menginformasikan pada masyarakat luas bahwa teka-teki mengenai pelaku dan motif penyerangan Lapas Cebongan telah terungkap oleh Tim Investigasi TNI AD. Terungkapnya pelaku penyerangan Lapas Cebongan ini didasari dari keterangan Ketua Tim Investigasi TNI AD dalam jumpa pers, yang dituangkan dalam paragraf kedua, di mana pelaku</p>	<p><b>Placement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita ini tertulis dalam SKH Kedaulatan Rakyat edisi Jumat, 5 April 2013. Berita ini ditempatkan di bagian atas pada halaman pertama. Berita ini menjadi <i>headline</i> dengan judul yang besar dan gambar grafis yang melukiskan kejadian penyerbuan oleh 11 oknum anggota Kopassus dan dua mobil yang dipakai dalam aksi tersebut, dan ada satu grafis cukup besar dengan gambar seorang anggota Kopassus berpenutup wajah dengan senjata api laras panjang yang mencolok di samping kiri berita, sehingga membuat berita ini menjadi “<i>point of interest</i>” pada halaman paling depan dari SKH Kedaulatan Rakyat ini. Selain gambar grafis yang besar dan mencolok di bagian sebelah kiri, pada bagian kanan berita</li> </ul>	<p><b>Metaphors</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“eksekusi preman”</b> Kata “eksekusi” berarti melaksanakan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati. Sementara kata “preman” merupakan sebutan untuk orang jahat. Itu artinya eksekusi preman memiliki makna melaksanakan hukuman yang berdasar pada putusan hakim atau badan peradilan terhadap preman/pelaku kejahatan. Ada unsur legalitas. Sementara kalimat ini digunakan wartawan SKH SKH KR pada sub judul merujuk pada pelaku yang telah mengakui perbuatannya, yang mana perbuatannya disebutkan</li> </ul>

<p>11 oknum anggota Grup 2 Kopassus yang menewaskan empat tahanan titipan Polda DIY, yang disebut dalam wacana ini sebagai “empat tahanan preman”.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Pelaku Penyerangan Lapas Cebongan</b> Pelaku penyerangan Lapas Cebongan adalah anggota pasukan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dari Grup 2 Kartosuro yang berjumlah 11 orang. Dalam berita ini dijelaskan bahwa mereka mengakui perbuatannya pada Tim Investigasi TNI AD dan siap mempertanggung-jawabkan perbuatannya.</li> <li>➤ <b>Tim Investigasi bentukan TNI AD</b> Tim investigasi ini dibentuk untuk menyelidiki kasus Penyerangan Lapas Cebongan sejak tanggal 29 Maret 2013. Tim investigasi ini pada hari Kamis 4 April 2013 melakukan konferensi pers di Jakarta untuk</li> </ul>	<p>adalah 11 oknum anggota Kopassus TNI AD dari Grup 2 Kartosura. Selain pengungkapan pelaku, dalam paragraf ini juga SKH KR merubah sebutannya terhadap empat korban penembakan, jika berita sebelum pengungkapan siapa pelaku penyerangan, korban disebut sebagai “empat tersangka pembunuh Sertu Santosa”, maka dalam berita ini ditulis sebagai “empat tahanan preman”. Hal ini juga diperkuat dengan memasukkan pernyataan Ketua Tim Investigasi TNI AD dalam paragraf kedua yang menyampaikan siapa pelaku penyerangan lengkap dengan korban tewas yang disebut sebagai empat tahanan preman. Hal ini dilakukan SKH KR seolah ingin menunjukkan bahwa 11 oknum anggota Kopassus melakukan aksi penyerangannya dengan target empat tahanan yang merupakan preman, bukan tahanan yang sama dengan tahanan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 3)</b> ..., telah mendapat pengakuan langsung secara ksatria dari para pelaku penyerangan ...</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 4)</b> ..., dengan ksatria siap</li> </ul>	<p>terdapat foto Ketua Tim Investigasi TNI AD, Brigjen TNI Unggul K Yudhoyono (saat memberi keterangan pers di Jakarta).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Judul:</b> Penyerang Lapas Siap Tanggung Jawab (Sub Judul: Oknum Kopassus Turun Gunung, Akui Eksekusi Preman).</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Pemilihan judul ini menunjukkan telah terungkapnya pelaku penyerbuan Lapas Cebongan dari pengakuan para pelaku sendiri. Judul ini seolah ingin membuat publik melihat bahwa pelaku dengan berani telah mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab. Sementara korban penembakan mati disebut sebagai preman, untuk menegaskan bahwa target para pelaku adalah seolah tahanan yang berbeda dari tahanan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita ini seolah menjawab kecurigaan bahwa memang ada aksi balas dendam dari oknum</li> </ul>	<p>SKH SKH KR sebagai sebuah eksekusi terhadap preman. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh pelaku adalah benar dan wajar saja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“empat tahanan preman”</b> Pada paragraf 1, kalimat ini digunakan untuk menunjukkan empat tahanan titipan Polda DIY yang tewas ditembak pelaku penyerbu Lapas Cebongan. Pada berita ini, SKH SKH KR menempatkan keempat korban tersebut sebagai preman.</li> <li>➤ <b>“ksatria”</b> Kata ini bermakna sebagai orang yang gagah berani (prajurit;perwira) pemberani. Istilah ini digunakan pada paragraf 3 untuk menggambarkan tindakan pelaku yang mengakui perbuatannya dengan berani.</li> <li>➤ <b>“prajurit”</b> Kata ini mengacu pada anggota sebuah kesatuan</li> </ul>
---	---	---	--

<p>mengumumkan hasil investigasi mereka tentang pelaku dan motif penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>Empat Tahanan Titipan Polda DIY</b> Korban dari aksi penyerbuan Lapas Cebongan. Dalam wacana ini, dijelaskan bahwa motif pelaku melakukan aksinya, karena keempat korban adalah tersangka pembunuhan salah satu rekan pelaku yaitu Serka Heru Santoso (anggota Kopassus).</p> <p>➤ <b>Serka Heru Santoso</b> Salah satu anggota Kopassus yang dibunuh oleh keempat tahanan titipan Polda DIY. Pembunuhan terhadapnya di Hugos Cafe yang dianggap keji dan sadis oleh pelaku penyerangan Lapas Cebongan menjadi motif yang mendasari terjadinya aksi penembakan mati keempat korban dalam peristiwa penyerbuan Lapas</p>	<p>mempertanggungjawabkan ...</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> ..., karena ingin membela kehormatan satuan yang menurut mereka telah dilecehkan para preman ... <b>FUNGSI:</b> Dari ketiga paragraf di atas, pihak Kedaulatan Rakyat ingin menginformasikan pada masyarakat bahwa pelaku memiliki jiwa ksatria hanya karena mau mengakui perbuatannya, dan melakukan aksi penyerbuan dengan dasar membela sebuah kehormatan yang dirasa telah dilecehkan.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 7 kalimat 2)</b> ... tewasnya rekan mereka Serka Heru Santoso yang dikeroyok preman ...</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 8)</b> ... melakukan balas dendam atas perbuatan para preman itu. <b>FUNGSI:</b> Kedaulatan Rakyat menempatkan empat tahanan yang menjadi korban penyerbuan Lapas Cebongan sebagai preman. Seolah-olah SKH KR ingin agar publik yang membaca berita ini tidak menilai negatif terhadap pelaku, melainkan positif karena apa yang dilakukan para pelaku telah tepat sasaran.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 9)</b> ... dilakukan secara spontan dan tidak</p>	<p>Kopassus atas peristiwa tewasnya Serka Santoso dalam pengeroyokan di Hugos Café. Tapi, dalam berita ini aksi penyerbuan Lapas Cebongan tidaklah dipandang sebagai aksi balas dendam, namun sebagai ksatria yang memiliki jiwa korsa yang tinggi.</p> <p>➤ Penyosokan terhadap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan dalam berita ini tersebar dari awal hingga akhir berita melalui informasi terkait pengakuan mereka atas aksi penyerbuan ke Lapas Cebongan. Mulai dari judul, lead berita, hingga akhir, penyosokan terhadap pelaku penyerbuan tersusun rapi dan positif. Sementara penyosokan terhadap empat tahanan titipan Polda DIY dalam berita ini terselip di beberapa paragraf dengan nada yang negatif.</p> <p>➤ Dari paragraf pertama hingga terakhir yaitu paragraf 16, penyosokan terhadap pelaku penyerbuan, yaitu 11 oknum anggota Kopassus, sangat positif. Berdasarkan informasi</p>	<p>angkatan darat maupun udara. Istilah ini digunakan SKH SKH KR pada paragraf 3 untuk menyebut pelaku penyerbu Lapas Cebongan. Kata prajurit seolah menunjukkan pelaku masih memiliki kehormatan meski telah melakukan pelanggaran hukum.</p> <p>➤ <b>“kehormatan satuan”</b> Kalimat ini bermakna sebagai suatu kehormatan atau harga diri sekelompok tentara. Pada paragraf 5 digunakan kalimat ini untuk menggambarkan motif pelaku demi membela harga diri mereka (satuan Kopassus).</p> <p>➤ <b>“dilecehkan”</b> Kata yang bermakna direndahkan, dihina, tidak dihargai. Kata ini digunakan pada paragraf 3 untuk menggambarkan perasaan pelaku terhadap kehormatan satuannya. Merasa direndahkan;dilecehkan.</p>
---	---	---	---

<p>Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Sertu Sriyono</b> Mantan anggota Kopassus yang menjadi korban pembacokan pada 20 Maret 2013 oleh beberapa preman di Yogyakarta, yang juga menjadi dasar pelaku penyerbuan Cebongan melakukan aksinya.</li> <li>➤ <b>Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono</b> Sebagai Kepala Negara Republik Indonesia, Presiden SBY dalam wacana ini diinformasikan mengapresiasi hasil kerja Tim Investigasi TNI AD dan mendorong agar temuan ini segera diproses secara hukum, yang disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan.</li> </ul> <p><b>Pelantun Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Wartawan</b> Pihak yang berperan dalam mengemas berbagai informasi menjadi sebuah berita terkait pengakuan pelaku penyerangan Lapas Cebongan yang siap</li> </ul>	<p>direncanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 10)</b> Indikasi bahwa penyerangan itu kurang persiapan, bisa dilihat dari senjata yang digunakan ...</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Kedaulatan Rakyat begitu detail dalam mengemas informasi yang didapat dari Ketua Tim Investigasi dalam keterangan pers. SKH KR mengolah informasi yang mengarah positif untuk para pelaku penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Brigjen TNI Unggul Yudhoyono</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 3)</b> “Para pelaku secara ksatria telah mengakui perbuatannya ...,” jelasnya.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 4)</b> “Pelaku siap mempertanggungjawabkan apapun risiko atas dasar kehormatan prajurit ksatria,” ujarnya.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Sebagai Ketua Tim Investigasi bentukan TNI AD Brigjen TNI Unggul Yudhoyono, dalam jumpa pers tidak hanya mengungkap pelaku dan motif penyerbuan, tapi juga mengapresiasi apa yang diperbuat para pelaku dari pernyataannya mengungkap motif pelaku serta</p>	<p>dari jumpa pers Tim Investigasi bentukan TNI, pelaku digambarkan dengan berani mengakui dan bersedia bertanggung jawab. Motif penyerbuan dianggap sebagai hal yang ksatria demi membela rekan yang terbunuh oleh keempat tahanan titipan Polda DIY.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sementara penyosokan terhadap empat tahanan titipan Polda DIY, dari judul telah disebut sebagai preman. Kemudian terselip pada beberapa paragraf awal sampai paragraf 9, di mana empat tahanan ini dinilai telah melakukan perbuatan yang sangatlah tercemar.</li> <li>➤ Pada akhir berita, ditutup oleh apresiasi Presiden SBY, dan permintaannya untuk menindaklanjuti hasil temuan Tim Investigasi TNI pada proses hukum yang adil untuk menjaga rasa aman masyarakat yang disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan. Kemudian juga Pihak Kepolisian yang masih terus melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“balas dendam”</b> Istilah ini terdapat pada paragraf 8, yang menggambarkan ada emosi, amarah, rasa benci; dendam, yang ingin dibalas. Hal ini menggambarkan motif pelaku menyerang Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>“mengapresiasi”</b> Kata ini berarti memberikan penilaian (penghargaan) terhadap suatu hasil. Pada paragraf 11, kata ini digunakan untuk menggambarkan seorang Presiden SBY memberikan penilaian tinggi; mengapresiasi, hasil temuan Tim Investigasi TNI AD.</li> </ul> <p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>11 Oknum anggota Kopassus dari Grup 2 Kartosuro sebagai pelaku</b></li> <li>➤ <b>4 Tahanan preman</b></li> <li>➤ <b>Eksekusi preman</b></li> <li>➤ <b>Tim Investigasi TNI AD ungkap pelaku dan motif</b></li> </ul>
--	---	--	--

<p>bertanggung jawab atas perbuatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Brigjen TNI Unggul Yudhoyono</b> Ketua Tim Investigasi TNI AD yang menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa pelaku penyerangan Lapas Cebongan adalah 11 oknum anggota Kopassus.</li> <li>➤ <b>Julian Aldrin Pasha</b> Juru Bicara Kepresidenan yang menyatakan apresiasi Presiden SBY terhadap hasil kerja tim investigasi TNI AD.</li> <li>➤ <b>DiresSKH KRimum Polda DIY, Kombes Pol SKH KRis Erlangga</b> Direktur Reserse dan SKH KRiminal Umum Polda DIY menjelaskan tentang masih berjalannya penyelidikan oleh pihak kepolisian terhadap kasus penyerangan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>AKBP Anny Pudjiastuti</b> Kabid Humas Polda DIY yang berfungsi untuk menyalurkan berbagai informasi dari pihak</li> </ul>	<p>pengakuan pelaku yang dianggapnya sebagai suatu perbuatan yang jantan dengan kata “ksatria”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> “Motif tindakan karena rasa korsa terhadap Kopassus, terutama setelah rekan mereka Serka Heru Santoso dibunuh secara keji dan sadis oleh preman,” ungkapnya.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 9)</b> “Penyerangan adalah tindakan seketika ..... pembunuhan tragis dan brutal ....,” katanya. <b>FUNGSI:</b> Brigjen TNI Unggul Yudhoyono dalam pernyataannya tersebut seakan melindungi perbuatan para pelaku dengan berulang kali menjelaskan motif pelaku yang disebut karena pembunuhan yang dilakukan empat tahanan terhadap rekan para pelaku dengan cara yang menurutnya sadis, keji, tragis, dan brutal.</li> </ul> <p><b>Pelantun Wacana: Julian Aldrin Pasha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 11)</b> “Tegakkan hukum, jangan sampai mengusik rasa aman masyarakat,” ujarnya. <b>FUNGSI:</b> Juru bicara Kepresidenan ini menyampaikan</li> </ul>	<p>penyelidikan kasus penyerbuan Lapas Cebongan tersebut dan akan mulai melakukan koordinasi dengan pihak TNI.</p>	<p><b>penyerbuan Lapas Cebongan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Polri</b></li> <li>➤ <b>Prajurit</b></li> <li>➤ <b>Ksatria</b></li> </ul> <p><i>Depiction</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Penyerangan (Lapas Cebongan) dilakukan oknum TNI AD, dalam hal ini Grup 2 Kopassus yang mengakibatkan terbunuhnya empat tahanan preman”</b> Pernyataan dari Ketua Tim Investigasi (pada paragraf 2) yang mengumumkan pelaku penyerbu Lapas Cebongan, menempatkan korban terbunuh sebagai empat tahanan preman. Seolah ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa korban bukanlah orang yang perlu untuk dibela kehidupannya, karena keempat korban merupakan preman;orang jahat. Sehingga sepertinya ingin menunjukkan bahwa aksi penyerbuan yang</li> </ul>
---	---	--	---

<p>Kepolisian terhadap masyarakat luas. Dalam wacana ini, AKBP Anny menjelaskan bahwa akan melakukan koordinasi dengan tim investigasi TNI AD terkait temuan tentang pelaku penyerangan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>Kabareskrim Polri, Komjen Pol Sutarman</b> Kepala Badan Reserse dan SKH KRiminal Polri ini mengungkapkan hasil temuan terhadap beberapa barang bukti yaitu selongsong peluru dengan kode tertentu yang diperuntukkan bagi senjata api laras panjang.</p>	<p>apresiasi Presiden SBY atas hasil kerja Tim Investigasi TNI. Sekaligus meminta hasil temuan tersebut dilanjutkan ke proses hukum, agar masyarakat tetap merasa aman.</p> <p><b>Pelantun Wacana: AKBP Anny Pudjiastuti</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 14)</b> "... koordinasi bersama tim investigasi TNI," kata Anny. <b>FUNGSI:</b> Setelah terungkapnya pelaku dari hasil temuan Tim Investigasi TNI, pihak kepolisian melalui Kabid Humas angkat bicara untuk memulai koordinasi dengan pihak TNI.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Komjen Pol Sutarman</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 16)</b> "Ada 8 butir selongsong peluru ....., ini masih kita analisa bersama," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Sutarman. <b>FUNGSI:</b> Meskipun pelaku telah terungkap oleh Tim Investigasi TNI, namun Kabareskrim Polri ini menyatakan bahwa pihak Kepolisian masih terus melanjutkan penyelidikan. Sehingga sampai</p>	<p>dilakukan pelaku merupakan aksi yang patut diberikan apresiasi karena telah membasmi para preman.</p> <p>➤ <b>"pelaku siap mempertanggung-jawabkan apapun risiko atas dasar kehormatan prajurit ksatria"</b> Pernyataan ini kembali terlontar oleh Ketua Tim Investigasi TNI AD. Jika pada paragraf 2, telah menyebutkan korban sebagai preman, kemudian pada paragraf 4, menggambarkan pelaku sebagai sosok pemberani yang bertanggung jawab. Ada ketimpangan fakta dalam penyampaian pengungkapan pelaku penyerbu dalam konferensi pers. Di mana korban seolah disebut sebagai preman yang pantas dibunuh, sementara pelaku merupakan prajurit pemberani, tangguh, yang siap bertanggung jawab demi kehormatan</p>
--	---	---

	<p>pada hari diumumkan bahwa pelaku oleh Tim Investigasi TNI pada masyarakat melalui keterangan pers di Jakarta, pihak Kepolisian masih melakukan analisa terhadap sejumlah barang bukti. Hal ini ingin menunjukkan bahwa pihak Kepolisian tidak begitu saja menyerahkan semuanya pada TNI, namun masih melakukan tugas dan kewajibannya dalam penyelidikan kasus tersebut.</p>		<p>kesatuannya layaknya prajurit ksatria, bagai pahlawan.</p> <p><b>Visual Images</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Foto</b>, ketua Tim Investigasi TNI AD Brigadir Jenderal TNI Unggul Yudhoyono yang memberikan keterangan pers terkait temuan pelaku penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Gambar grafik</b>, yang menggambarkan 11 oknum anggota Kopassus menyerang Lapas Cebongan.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Brigjen TNI Unggul Yudhoyono sebagai aktor tunggal dalam penentuan arah wacana dalam berita ini. Keterangannya dalam mengungkap hasil temuan Tim Investigasi TNI AD, sangat dominan dalam berita ini yang menekankan pada pengungkapan pelaku dan motif yang membentuk penyosokan terhadap pelaku dan keempat tahanan titipan Polda DIY.</p>	<p style="text-align: center;"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Dari keterangan Brigjen TNI Unggul yang dominan dalam berita ini, fakta yang ditonjolkan ialah sosok positif pelaku yang disebut prajurit berjiwa ksatria berani bertindak demi kehormatan satuan dan bertanggung jawab atas tindakannya, serta sosok negatif keempat tahanan Polda DIY yang merupakan preman karena melakukan pembunuhan terhadap anggota Kopassus dianggap dengan keji dan sadis.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>MEDIA FRAME</b></p> <p>SKH Kedaulatan Rakyat mengangakat sosok pelaku penyerbu Lapas Cebongan dengan positif, sementara keempat tahanan titipan Polda DIY dengan negatif, dari sudut pandang Ketua Tim Investigasi TNI AD.</p>			



**Analisis Teks Berita 4 (SKH Kedaulatan Rakyat)**

**Judul : 7 Penganiaya Santoso Masih Bebas (Anak Buah Serbu Lapas, Danjen Kopassus Tanggung Jawab)**

**Edisi : Sabtu, 6 April 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b> Tanggapan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo yang siap bertanggung jawab atas perbuatan para pelaku penyerbuan Lapas Cebongan, 11 oknum anggota Kopassus, yang merupakan anggotanya.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Wacana ini memberikan informasi mengenai respon Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo atas perbuatan 11 anggotanya. Dalam wacana ini, Agus Sutomo nampak tegas untuk memproses para anggotanya pada hukum militer.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b> ➤ <b>Pelaku Penyerangan Lapas Cebongan, 11 Oknum Anggota Kopassus</b> Dalam wacana ini, para pelaku penyerbuan Lapas Cebongan</p>	<p><b>Jenis Wacana</b> <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b> ➤ <b>(pada paragraf 1)</b> ... Sebagai komandan, ia paling bertanggung jawab. "... 11 orang itu adalah anak buah saya dan sayalah atasannya, Mayjen TNI Agus Sutomo," katanya ...</p> <p><b>FUNGSI:</b> Berita ini diawali oleh Kedulatan Rakyat dengan pernyataan dari Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo yang siap mempertanggungjawabkan perbuatan anak buahnya. Menarik di sini karena berita dengan judul "7 Penganiaya Santoso Masih Bebas" diawali oleh pernyataan yang terkesan heroik dari atasan para pelaku penyerbuan Lapas Cebongan. ➤ <b>(pada paragraf 4)</b> Agus</p>	<p><b>Placement:</b> ➤ Berita ini tertulis dalam SKH Kedaulatan Rakyat edisi Sabtu, 6 April 2013. Berita ini ditempatkan di bagian atas pada halaman pertama. Berita ini menjadi <i>headline</i> dengan judul yang besar. Terdapat foto yang cukup besar di samping kiri berita, tepat di bawah judul yang menjadi <i>headline</i> dari SKH Kedaulatan Rakyat edisi ini. Foto tersebut mengisi 2/3 halaman (ke samping) dari berita tersebut, yaitu foto Tugu Yogyakarta, kemudian juga ada foto spanduk yang terdapat di Jalan Magelang Raya KM 4,5 Yogyakarta, yang bertuliskan "SEJUTA PREMAN MATI RAKYAT YOGYA TIDAK RUGI". Foto tersebut tentu melengkapi judul besar yang menjadi</p>	<p><b>Metaphors</b> ➤ <b>"11 tersangka"</b> Pada paragraf pertama. SKH KR menyebut pelaku penyerbuan Lapas Cebongan sebagai 11 tersangka. Hal tersebut menunjukkan pada berita ini SKH KR telah menempatkan pelaku sebagai yang terbukti bersalah. ➤ <b>"hukum militer"</b> Penggunaan istilah ini pada paragraf 3 mengacu pada proses peradilan hukum yang akan dihadapi pelaku sesuai UU peradilan militer. ➤ <b>"4 tahanan preman titipan Polda DIY"</b> Istilah ini tersebar di beberapa paragraf dalam berita. Pada berita ini, SKH KR telah membunuh karakter keempat tahanan yang menjadi korban penyerbuan Lapas, dengan</p>

<p>akan diproses melalui hukum di militer seperti yang diungkapkan oleh Komandan Jenderal Kopassus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Empat Tahanan Titipan Polda DIY</b> Sejak terungkapnya pelaku penyerbuan Lapas Cebongan, empat tahanan titipan Polda DIY yang menjadi korban, tidak lagi disebut sebagai korban atau empat tahanan tersangka pembunuhan Serka Santoso, melainkan empat tahanan preman. Pihak yang menjadi sasaran terjadinya penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Serka Heru Santoso</b> Korban pembunuhan oleh empat tahanan titipan Polda DIY di Hugos. Aksi pembunuhan terhadapnya, dijadikan motif pelaku penyerbuan Lapas Cebongan untuk balas dendam.</li> <li>➤ <b>Sertu Sriyono</b> Menjadi korban pembacokan beberapa waktu yang lalu sebelum terjadinya aksi penyerbuan Lapas Cebongan. Dalam wacana ini, terbunuhnya Sertu Sriyono</li> </ul>	<p>Sutomo juga berjanji memberi sanksi tegas bagi 11 oknumnya... menewaskan 4 tahanan preman titipan Polda DIY di selnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> Namun secara pribadi, ia memahami emosi yang dirasakan pelaku penyerangan Lapas Cebongan itu.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Berdasarkan pernyataan Danjen Kopassus, wartawan KR menuliskan janji Agus Sutomo yang akan menindak tegas anak buahnya yang melakukan aksi penyerbuan Lapas Cebongan. Sekali lagi hal ini nampak sekali untuk meyakinkan pembaca bahwa pihak TNI khususnya Kopassus sangatlah bertanggung jawab atas aksi penyerbuan Lapas Cebongan yang menewaskan empat korban yang disebut sebagai preman. Meski begitu, tidak tertinggal informasi seperti yang ada pada paragraf 5 yaitu emosi pelaku yang tersulut karena jiwa korsa yang tinggi, di mana seolah-olah motif ini (ada jiwa korsa yang tinggi)</p>	<p><i>headline</i> berita KR edisi ini, sehingga membuat berita ini menjadi “<i>point of interest</i>” pada halaman paling depan dari SKH Kedaulatan Rakyat ini. Selain itu juga di bawah foto dicantumkan oleh KR isi kolom “SMS Suara Rakyat” yang berisi sms-sms pendukung Kopassus. Selain itu, tepat di bawah foto dimuat berita dengan judul berbeda yang terbaca jika melihat foto tersebut dengan judul berita “Dukung Pemberantasan Premanisme” (sub judul: Ribuan SMS Diterima KR).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Judul:</b> 7 Penganiaya Santoso Masih Bebas (Sub Judul: Anak Buah Serbu Lapas, Danjen Kopassu Tanggung Jawab)</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Pemilihan judul ini seperti ingin menunjukkan bahwa pelaku penyerangan Lapas Cebongan telah mengakui perbuatannya, bahkan Danjen Kopassus ikut bertanggung jawab atas aksi anak buahnya (dilihat dari Sub Judul). Sementara pelaku lain yang</p>	<p>menyebut mereka sebagai empat tahanan preman titipan Polda DIY. Karena istilah “preman” bermakna sebutan untuk orang jahat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“oknum prajurit Kopassus TNI-AD”</b> Kalimat ini ditemukan pada paragraf 8 yang merujuk pada pelaku penyerbu Lapas Cebongan yang merupakan anggota elite pasukan khusus TNI AD, Kopassus.</li> </ul> <p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Penyerbuan Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>11 Oknum Anggota Kopassus pelaku penyerbuan Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>4 tahanan preman titipan Polda DIY</b></li> <li>➤ <b>Danjen Kopassus tanggung jawab</b></li> <li>➤ <b>Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo</b></li> <li>➤ <b>7 Penganiaya Serka Santoso masih bebas</b></li> </ul> <p><b>Catchphrases</b></p>
--	---	---	--

<p>ditegaskan oleh penasihat hukum tersangka kasus pengeroyokan anggota Intel Kodim Yogya Sertu Sriyono, tidak ada keterkaitannya dengan kasus Serka Santosa di Kafe Hugos.</p> <p>➤ <b>7 orang pelaku pengeroyokan Sertu Heru Santoso dan 10 orang Pelaku Penyerangan Asrama NTT</b> Masih ada 7 orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan Serka Santoso masih dalam proses pengembangan dan penyelidikan. Dalam wacana ini, 7 orang tersebut dan 10 orang pelaku penyerangan asrama NTT menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut.</p> <p><b>Pelantun Wacana:</b></p> <p>➤ <b>Wartawan</b> Pihak yang memiliki tanggung jawab cukup besar dalam penyusunan fakta menjadi sebuah berita terkait kasus penyerbuan Lapas Cebongan ini. Dalam wacana ini, wartawan cenderung melihat kasus ini dari sudut pandang</p>	<p>menjadi tameng yang selalu dituangkan KR saat menginformasikan tentang aksi pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang tidak dapat dibenarkan.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 12)</b> Adi Wijaya menyatakan, saat ini masih ada pelaku .... Yang belum tertangkap.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 13)</b> Adi Wijaya mengatakan, untuk tujuh orang ..., Polda DIY ... pengembangan dan penyelidikan.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Dari 15 paragraf yang ada dalam berita ini, informasi yang berkaitan dengan judul dari berita ini hanya terdapat dalam dua paragraf yaitu paragraf 12 dan 13, diangkat dari pernyataan Brigjen TNI Adi Wijaya. Dari paragraf 12 maupun 13, informasi didapat dari pihak TNI bukan pihak kepolisian, yang menyatakan bahwa masih ada tujuh pelaku yang diduga terlibat dalam pengeroyokan Serka Santoso yang masih dalam proses pengembangan dan</p>	<p>diduga terlibat dalam pengeroyokan Serka Santoso yang menjadi motif pelaku penyerang Lapas Cebongan melakukan aksinya masih menghirup udara bebas. Seperti ingin menunjukkan tanggung jawab yang besar dari pihak TNI AD khususnya Kopassus, sedangkan pelaku penganiayaan Serka Santoso lainnya belum mempertanggungjawabkan perbuatannya.</p> <p>➤ Penyosokan terhadap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan tersebar dari awal hingga akhir berita ini. Masih sama seperti berita pada edisi sebelumnya, sosok pelaku penyerangan Lapas Cebongan masih tergambar positif. Terlihat dari narasumber yang diambil dalam berita ini, meski tidak membenarkan aksi pelaku dalam penyerbuan Lapas Cebongan, namun memahami latar belakang pelaku yang menjadi motif penyerbuan yang dianggap positif karena</p>	<p>➤ <b>“Yang jelas 11 orang itu adalah anak buah saya dan sayalah atasannya, Mayjen TNI Agus Sutomo”</b> Pernyataan yang diungkapkan Danjen Kopassus yang dimuat pada <i>lead</i> berita ini menunjukkan adanya pengakuan yang menguatkan fakta bahwa pelaku penyerbuan Lapas Cebongan memang berasal dari anggota Kopassus dibawah kepemimpinan Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo.</p> <p>➤ <b>“Saya orang paling terdepan bertanggung jawab”</b> Pernyataan ini diangkat SKH pada paragraf 2 untuk menunjukkan sikap tanggung jawab dari atasan atas tindakan pelanggaran yang dilakukan anak buah pada sebuah institusi aparat keamanan negara, Kopassus.</p> <p><b>Depiction</b></p> <p>➤ <b>“Saya sesalkan itu, bagaimanapun tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam negara</b></p>
--	--	---	---

<p>pihak TNI, baik Danjen Kopassus, pihak Mabes TNI, serta Komandan Korem 072/Pamungkas Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo</b> Atasan para pelaku penyerbuan Lapas Cebongan ini, mengaku paling bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya yaitu 11 oknum Anggota Kopassus, karena memiliki tanggung jawab tertinggi dalam institusi Kopassus.</li> <li>➤ <b>Kapolri Jenderal Timur Pradopo</b> Setelah terungkapnya pelaku penyerbuan Lapas Cebongan oleh pihak TNI, pimpinan tertinggi kepolisian Republik Indonesia dalam wacana ini menyatakan bahwa akan menghentikan proses penyelidikan kasus penyerbuan Lapas Cebongan dan menyerahkan barang bukti ke penyidik militer.</li> <li>➤ <b>Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul</b> Kepala Pusat Penerangan TNI,</li> </ul>	<p>penyelidikan. Hal ini tertulis sebagai permintaan pihak TNI agar pihak kepolisian dapat menuntaskan kasus pengeroyokan yang menewaskan Serka Santosa, setelah seluruh pelaku penyerbuan Lapas Cebongan telah mengakui dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Mayjen TNI Agus Sutomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 2)</b> “Grup I itu Serang, ..., itu semua organisasi saya, anak buah saya. Maka sayalah yang paling bertanggung jawab di institusi Kopassus ini. .... paling terdepan bertanggung jawab,” tegas Agus ...</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Melalui pernyataan ini, Agus Sutomo menegaskan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas aksi penyerbuan Lapas Cebongan yang dilakukan 11 oknum anggota Kopassus adalah dia, sebagai Pimpinan tertinggi dari institusi Kopassus, yaitu Komandan Jenderal Kopassus</p>	<p>merupakan rasa solidaritas yang tinggi. Selain itu, informasi dalam berita ini sebagian besar dari sudut pandang TNI AD, antara lain informasi tentang proses penyelidikan dan pengembangan kasus pengeroyokan Serka Santoso di Hugos oleh kepolisian, dalam berita ini informasinya disampaikan oleh Komandan Korem 072/Pamungkas Yogyakarta, bukan dari pihak kepolisian sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyosokan terhadap empat tahanan yang menjadi korban dalam aksi penyerbuan Lapas Cebongan tidak banyak dalam berita ini, hanya saja yang menonjol adalah penyebutan korban menjadi preman. Foto spanduk yang dimuat dalam berita ini pun cukup menggambarkan bahwa KR menempatkan empat tahanan titipan Polda DIY yang menjadi korban sebagai preman yang memang tepat diberantas.</li> </ul>	<p><b>hukum”</b> Pernyataan di atas merupakan tanggapan dari Kepala Negara RI, Presiden SBY pada paragraf 8 yang menunjukkan kekecewaannya pada aparat keamanan negara yang melakukan pelanggaran hukum, aksi main hakim sendiri di dalam negara yang memiliki hukum sebagai aturan dasar bernegaranya.</p> <p><b>Visual Images</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Foto</b> Tugu Yogyakarta.</li> <li>➤ <b>Foto</b> sejumlah kendaraan yang melintasi spanduk bertuliskan “SEJUTA PREMAN MATI RAKYAT YOGYA TIDAK RUGI”.</li> </ul> <p><b>Dua foto</b> ini seolah dipasang SKH KR dengan maksud memperlihatkan adanya sebagian warga Yogyakarta yang mendukung aksi pelaku menyerang Lapas Cebongan, karena dianggap telah membunuh para preman. Foto Tugu Yogyakarta menggambarkan bahwa spanduk tersebut berada di jalanan yang berada di Kota</p>
---	--	--	--

<p>dari Markas Besar TNI, dalam wacana ini memastikan bahwa tidak ada perwira yang terlibat dalam aksi Penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono</b>      Dalam wacana ini, menyampaikan rasa sesalnya pada para pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang aksinya dianggap tidak benar apapun alasannya karena main hakim sendiri.</p> <p>➤ <b>Kapolda DIY Brigjen Pol Sabar Rahardjo</b>      Ada issue yang berredar bahwa sebenarnya pihak kepolisian Yogyakarta sudah mengetahui lebih dulu aksi penyerbuan Lapas Cebongan. Dalam berita ini, Pimpinan Kepolisian Polda DIY membantah akan issue tersebut.</p> <p>➤ <b>Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X</b>      Dalam wacana ini mengapresiasi kinerja Tim Investigasi TNI, dan menantikan konsistensi hukum di pengadilan militer.</p> <p>➤ <b>Komandan Korem</b></p>	<p>Mayjen TNI Agus Sutomo.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 4)</b> “Tindakan itu tak bisa dibenarkan ... dipicu rasa solidaritas yang tinggi dan rasa hormat .... yang tewas dikeroyok preman itu,” tegasnya.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> “Itulah prajurit yang jiwanya bangkit. Ditambah lagi ... nyaris mati karena preman itu,” katanya.  <b>FUNGSI:</b> Satu sisi Agus Sutomo memang tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh 11 oknum anggota Kopassus, pelaku penyerangan Lapas Cebongan. Namun di sisi lain, dari pernyataannya, tetap tersirat sedikit pembelaan terhadap anak buahnya tersebut dengan mengungkap motif penyerbuan yang menewaskan korban yang disebutnya sebagai preman yaitu bangkitnya jiwa prajurit yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi.</p>	<p>➤ Uniknya dari berita ini adalah dari 15 paragraf, hanya dua paragraf yaitu paragraf 12 dan 13 yang berkaitan dengan judul berita yang diangkat. Sementara 13 paragraf lain sebagian besar membahas pelaku penyerbuan Lapas Cebongan dan apresiasi terhadap kinerja Tim Investigasi TNI AD dari beberapa pihak. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian informasi antara judul berita dengan isi dari berita.</p>	<p>Yogyakarta.</p>
---	--	---	--------------------

<p><b>072/Pamungkas Yogyakarta Brigjen TNI Adi Wijaja</b> Memastikan bahwa Yogyakarta akan tetap aman, tanpa ada lagi aksi balas dendam. Sekaligus meminta pihak kepolisian menuntaskan kasus pengeroyokan Serka Santoso dan 10 pelaku penyerangan Asrama NTT.</p> <p>➤ <b>Hillarius Ngaji Merro, S.H.</b> Selaku penasihan hukum tersangka kasus pengeroyokan anggota Intel Kodim Yogya Sertu Sriyono, dalam wacana ini membantah adanya keterkaitan kasus Sertu Sriyono dengan kasus pengeroyokan Serka Santosa.</p>	<p><b>Pelantun Wacana: Kapolri Jenderal Timur Pradopo</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 6)</b> “Tak akan dilanjutkan. Kita akan serahkan barang bukti .... ke penyidik militer,” kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo. <b>FUNGSI:</b> Mewakili pihak kepolisian, setelah adanya pengakuan dari pelaku dan adanya pertanggungjawaban dari Pimpinan tertinggi institusi Kopassus, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menginformasikan bahwa akan menghentikan penyelidikan kasus. Karena pelaku adalah dari pihak militer TNI AD (anggota Kopassus), maka akan melalui proses peradilan militer, sehingga kepolisian akan menyerahkan barang bukti pada penyidik militer.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 7)</b> “Semua pelaku tidak ada yang lebih tinggi dari bintanga dan tamtama,” kata Kapuspen TNI</p>		
--	--	--	--

	<p>Laksamana Muda Iskandar Sitompul ...</p> <p><b>FUNGSI:</b> Sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI AD, Laksamana Muda Iskandar Sitompul meyakinkan pada masyarakat melalui pernyataannya di Mabes TNI Cilangkap, bahwa tidak ada perwira yang terlibat dalam aksi penyerbuan Lapas Cebongan. Hal ini diungkapkan untuk memastikan pada masyarakat bahwa hanyalah prajurit sekelas bintanga dan tamtama yang merupakan pelaku aksi penyerbuan Lapas Cebongan tersebut.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 8)</b> “Saya sesalkan itu, ... tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam negara hukum. Meskipun .... karena ada jiwa korsa dan perilaku sekelompok orang ... sadis melakukan pembunuhan terhadap seorang bintanga Kopassus,” tegasnya ...</p>		
--	---	--	--

	<p><b>FUNGSI:</b> Sebagai Pimpinan tertinggi negara Republik Indonesia yang memiliki aturan hukum, Presiden SBY angkat bicara pada hari yang sama dengan Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo. Presiden menyatakan penyesalannya atas terjadinya penyerbuan Lapas Cebongan. Meskipun mengetahui motif pelaku, Presiden SBY tetap menegaskan bahwa aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Brigjen Pol Sabar Rahardjo</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 9)</b> “Demi Allah tidak tahu, ... tenang-tenang saja waktu memindah tahanan ke Lapas,” kata Kapolda usai Salat Jumat di Mapolda.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Beredar issue bahwa pihak kepolisian telah mengetahui akan adanya aksi penyerbuan Lapas Cebongan. Pernyataan Kapolda DIY pada paragraf di atas guna membantah adanya issue tersebut.</p>		
--	---	--	--



	<p><b>Pelantun Wacana: Sri Sultan Hamengku Buwono X</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 10)</b> “TNI patut diapresiasi. ... konsistensi aspek hukum di pengadilan militer,” kata Sultan di DPRD DIY.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Sebagai Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X ikut mengapresiasi kinerja Tim Investigasi TNI AD. Namun melalui pernyataan ini juga, tersirat harapan besar Sultan pada konsistensi proses hukum yang akan dilalui para pelaku di pengadilan militer.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Brigjen TNI Adi Wijaja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 11)</b> “Saya pastikan Yogya tetap aman,” ungkapnya.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 12)</b> “Pengeroyokan ..... tidak hanya dilakukan empat pelaku yang tewas di Lapas Cebongan. Masih ada tujuh pelaku lain bebas berkeliaran. Tugas polisi untuk menuntaskan kasus ... 10 orang pelaku yang menyerang</li> </ul>		
--	--	--	--

	<p>asrama NTT,” katanya.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 13)</b>  “Penyelidikan tidak saja berhenti ..... menuntaskan pelaku pengeroyokan Heru Santosa ....menghirup udara bebas. Ini tugas kepolisian,” katanya.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Sebagai Komandan Korem 072/ Pamungkas Yogyakarta, Brigjen TNI Adi Wijaja tidak hanya memastikan keamanan wilayah Yogyakarta akan terjaga, tapi melalui pernyataannya juga meminta pihak kepolisian untuk menuntaskan tugasnya dalam proses penyelidikan kasus pengeroyokan terhadap Serka Heru Santosa yang diduga masih ada tujuh orang terlibat yang belum ditagkap, juga dengan 10 orang pelaku penyerang asrama NTT.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Hillarius Ngaji Merro, S.H.</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 15)</b>  “Peristiwa ..... jelas tidak ada hubungannya. Kalau Hugos Café itu berawal dari</p>		
--	--	--	--

	<p>senggolan. Sedangkan di Jalan Dr Sutomo dari permasalahan sepeda motor,” ujar Hillarius.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Saat jumpa pers, Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen Unggul K Yudhoyono sempat menyebutkan bahwa motif pelaku melakukan aksinya karena tewasnya Serka Santoso di Hugos, dan pembacokan terhadap Sertu Sriyono pada hari yang berbeda. Sebagai penasihat hukum tersangka kasus pengeroyokan anggota Intel Kodim Yogya Sertu Sriyono, Hillarius membantah adanya keterkaitan antara dua kasus tersebut. Melalui pernyataan dalam paragraf 15, Hillarius memaparkan tentang penyebab dua kasus yang terjadi adalah berbeda, sehingga tidak ada keterkaitan antara kedua kasus tersebut.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Keterlibatan narasumber yang didominasi dari pihak TNI AD, yaitu Komandan Jenderal Kopassus, Kapuspen TNI, dan Komandan Korem 072/Pamungkas Yogyakarta, membuat pesan dalam berita ini juga didominasi dari informasi yang disampaikan TNI AD. Perihal yang menjadi sorotan adalah tanggung jawab TNI AD khususnya Kopassus</p>		<p style="text-align: center;"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Informasi yang disampaikan beberapa narasumber dari pihak TNI AD menjadi fakta yang lebih ditonjolkan dalam berita ini. SKH KR menampilkan pihak TNI AD khususnya Kopassus, yaitu Danjen Kopassus sebagai pimpinan tertinggi Kopassus ikut mempertanggungjawabkan perbuatan anak buahnya, sementara 7 orang</p>	

terkait terlibatnya 11 anggota Kopassus dalam penyerbuan Lapas Cebongan.

lainnya yang diduga ikut dalam penganiayaan Serka Santoso masih menghirup udara bebas. Adanya kondisi kontras yang ditonjolkan tersebut, mengangkat nilai positif Kopassus.

**MEDIA FRAME**

SKH Kedaulatan Rakyat menempatkan Kopassus sebagai aktor dalam berita ini, di mana pimpinan tertinggi, Danjen Kopassus pun ikut bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya.

**Analisis Teks Berita 5 (SKH Kedaulatan Rakyat)**

**Judul : Bukti Proyektil Diserahkan ke TNI (Polda Resmi Hentikan Kasus Cebongan)**

**Edisi : Sabtu, 13 April 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b> Polda DIY menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan kasus penyerbuan Lapas Cebongan, secara resmi dengan menyerahkan barang bukti pada penyidik TNI.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Wacana ini ditampilkan Kedaulatan Rakyat untuk menginformasikan pada masyarakat bahwa kasus penyerbuan Lapas Cebongan tidak lagi diproses oleh Polda DIY, tapi telah resmi dilimpahkan ke penyidik TNI. Penyerahan barang bukti dari Polda DIY kepada pihak penyidik TNI sebagai tanda resminya Polda DIY menghentikan penyidikan dan penyelidikan kasus.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b> ➤ <b>Polda DI Yogyakarta</b></p>	<p><b>Jenis Wacana</b> <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b> ➤ <b>(pada paragraf 1)</b> Polda DIY secara resmi menyerahkan ... ke penyidik TNI, ... .., Polda menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan ...</p> <p><b>FUNGSI:</b> Berita ini langsung diawali oleh paragraf yang menjelaskan maksud dari judul berita tersebut. Adanya informasi dari paragraf satu ini menunjukkan keputusan Polda DIY yang sebelumnya telah disampaikan saat hasil temuan tim investigasi TNI AD diumumkan pada publik, yaitu menyerahkan kasus sepenuhnya pada penyidik TNI agar pelaku diadili sesuai dengan peradilan di militer.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 3)</b> Terkait kasus pengeroyokan terhadap</p>	<p><b>Placement:</b> ➤ Berita ini tertulis dalam SKH Kedaulatan Rakyat edisi Sabtu, 13 April 2013. Meski tidak lagi menjadi <i>headline</i> dalam SKH Kedaulatan Rakyat, berita mengenai kasus penyerbuan Lapas Cebongan sampai edisi ini masih ditempatkan di halaman pertama. Berita ini terletak di tengah-tengah halaman dengan porsi 3 kolom dan 28 baris, kemudian bersambung pada halaman 7 yang memenuhi satu kolom saja dengan 25 baris, berita yang cukup singkat. Berita ini dilengkapi dengan foto salah satu narasumber berukuran kecil di tengah berita (kolom ke-2).</p> <p>➤ <b>Judul:</b> Bukti Proyektil Diserahkan ke TNI (Sub Judul:</p>	<p><b>Metaphors</b> ➤ <b>“menyerahkan penanganan kasus”</b> Kalimat yang terdapat pada paragraf 1, mengarah pada situasi di mana pihak kepolisian tidak lagi menangani kasus penyerangan Lapas Cebongan dan diserahkan kepada penyidik TNI AD.</p> <p>➤ <b>“serah terima”</b> Istilah ini terdapat pada paragraf 2, untuk menggambarkan adanya peristiwa penyerahan barang bukti dari pihak kepolisian yang diterima oleh pihak TNI AD untuk melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyerangan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>“gelar perkara”</b> Dalam paragraf 3, istilah ini</p>

<p>Institusi Kepolisian yang awalnya menangani kasus penyerbuan Lapas Cebongan. Namun, dalam wacanan ini pihak Polda DIY menyerahkan barang bukti secara resmi pada penyidik TNI untuk secara resmi menghentikan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Penyidik TNI</b> Pihak yang menerima barang bukti kasus penyerbuan Lapas Cebongan dari Polda DIY, yang akan melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut.</li> <li>➤ <b>Letkol CPM Jefridin Adrian</b> Komandan Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta, sebagai pihak yang mewakili penyidik TNI di Mapolda DIY menerima barang bukti yang diserahkan oleh pihak Polda DIY.</li> <li>➤ <b>Pelaku penyerbuan Lapas Cebongan</b> 11 oknum anggota Kopassus yang dalam wacana ini masih dalam pemeriksaan oleh penyidik TNI.</li> <li>➤ <b>Empat Tahanan Titipan</b></li> </ul>	<p>Serka Heru Santoso ..., Polda tetap meyakini pelaku hanya 4 orang. .... Dengan meninggalnya keempat tersangka, dalam waktu dekat Polda akan menghentikan kasusnya.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Menariknya, informasi berbeda yang meskipun berkaitan ini dihadirkan dalam satu berita oleh Kedaulatan Rakyat. Seolah ingin memperlihatkan pelaku penyerbuan Lapas Cebongan masih harus melanjutkan proses penyidikannya dalam peradilan militer, sementara kasus empat tahanan yang tewas dihentikan. Wacana ini seolah menjawab wacana pada berita edisi sebelumnya berjudul “7 Penganiaya Santoso Masih Bebas”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 5 kalimat 2)</b> Menhan tetap menganggap kasus Cebongan bukan kategori pelanggaran HAM.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 6)</b> Politisi senior PDI Perjuangan mengkritik pernyataan Menhan.</li> </ul>	<p>Polda Resmi Hentikan Kasus Cebongan).</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pemilihan judul ini menggambarkan kelanjutan proses hukum yang akan dijalani pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang tidak lagi ditangani Polda DIY, namun telah diserahkan secara resmi kepada pihak TNI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyosokan terhadap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan dan empat tahanan titipan Polda DIY yang tewas dalam aksi penyerbuan Lapas Cebongan tidak begitu menonjol seperti berita-berita sebelumnya. Hanya saja pada bagian akhir berita KR menampilkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak penting pemerintahan dan politisi mengenai pelanggaran HAM, yang mana dari pendapat tersebut dapat menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ Dari paragraf pertama hingga paragraf empat menginformasikan tentang</li> </ul>	<p>menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pihak kepolisian sebelum menghentikan proses penyidikan terhadap kasus pengeroyokan terhadap Serka Santoso di Hugos Café. Gelar perkara sendiri merupakan kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan Penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu secara tuntas untuk masuk pada tahap berikutnya misalnya pengajuan pada Penuntut Umum. Namun dalam teks berita ini gelar perkara dilakukan untuk penghentian proses hukum pada kasus pembunuhan Serka Santoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)”</b> Istilah yang biasa digunakan pihak penyidik kepolisian terkait surat yang berisi tentang penghentian penyidikan suatu kasus. Dalam paragraf 3, SP3 ini dikeluarkan untuk penghentian penyidikan kasus Serka Santoso karena</li> </ul>
--	---	--	--

<p><b>Polda DIY</b> Korban dari aksi penyerbuan Lapas Cebongan. Dalam wacana ini, dijelaskan bahwa hanya mereka sebagai tersangka pembunuhan Serka Santoso di Hugos Cafe.</p> <p>➤ <b>Serka Heru Santoso</b> Salah satu anggota Kopassus yang dibunuh oleh keempat tahanan titipan Polda DIY di Hugos Cafe. Kasus pembunuhan terhadapnya dalam wacana ini juga akan dihentikan oleh Polda DIY, karena 4 tersangka pembunuhnya telah tewas dalam aksi penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>Siti Noor Laila</b> Ketua Komnas HAM, yang dalam wacana ini dijelaskan bahwa pihak Komnas HAM belum selesai dalam melakukan investigasi terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p><b>Pelantun Wacana:</b></p> <p>➤ <b>Wartawan</b> Memiliki peranan besar dalam menyusun informasi menjadi</p>	<p>➤ <b>(pada paragraf 7)</b> Sedang Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila mengaku belum selesai melakukan investigasi. Namun ... sudah disimpulkan sebagai pelanggaran HAM. <b>FUNGSI:</b> Kedaulatan Rakyat pada 3 paragraf terakhir dari wacana ini, yaitu paragraf 5 sampai 7, menampilkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang punya peran dalam Pemerintahan maupun Politik di Indonesia tentang termasuk atau tidaknya aksi penyerbuan Lapas Cebongan ke dalam pelanggaran HAM.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Kombes Pol Kris Erlangga</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 2)</b> “Barang bukti yang diserahkan antara lain proyektil dan selongsong peluru yang dilengkapi hasil uji balistik,” kata Kris Erlangga. <b>FUNGSI:</b> Kombes Pol Kris Erlangga mengungkapkan barang bukti apa saja yang diserahkan kepada penyidik TNI untuk dilanjutkan kasusnya dalam peradilan di</p>	<p>penyerahan barang bukti dari Polda DIY ke TNI, yang menandakan bahwa proses hukum dilanjutkan oleh TNI.</p> <p>➤ Sementara dari paragraf 5 sampai 7 masuk dalam perbedaan suara mengenai pelanggaran HAM pada kasus penyerbuan Lapas Cebongan oleh beberapa pihak pemerintahan dan politisi di Indonesia.</p>	<p>keempat tersangka telah meninggal dalam insiden penyerangan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>“belum bisa membeberkan”</b> Dalam paragraf 4, kalimat ini menunjukkan bahwa pihak TNI AD belum bisa memaparkan seluruh hasil penyelidikan terhadap pelaku penyerbu Lapas Cebongan kepada publik melalui media.</p> <p>➤ <b>“tidak akan mengintervensi”</b> Kalimat ini terdapat dalam paragraf 4 yang menunjukkan adanya janji dari Wakil Kepala Staf TNI AD, untuk tidak campur tangan dalam proses penyelidikan terhadap 11 oknum anggota Kopassus oleh pihak penyidik TNI AD.</p> <p>➤ <b>“mempersilahkan”</b> Kata ini bermakna memberikan jalan. Kata ini digunakan dalam paragraf 5 yang menunjukkan Menteri Pertahanan mempunyai wewenang untuk ‘mempersilahkan’ aparat melakukan penyelidikan hingga tingkat atas. Dalam artian lain tidak menghalang-halangi proses</p>
---	---	--	--

<p>sebuah berita yang berkaitan dengan penghentian proses penyidikan dan penyelidikan oleh Polda DIY terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan, yang ditandai dengan serah terima barang bukti dari Polda DIY kepada penyidik TNI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Kombes Pol Kris Erlangga</b> Direktur Reserse Kriminal dan Umum (Direskrim) Polda DIY, sebagai pihak yang mewakili Polda DIY menyerahkan barang bukti pada TNI sebagai tanda resminya Polda DIY menghentikan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Letjen TNI Moeldoko</b> Sebagai Wakil Kepala Staf TNI AD, melalui wacana ini menyampaikan pada publik bahwa pihak TNI tidak akan mengintervensi kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Purnomo Yusgiantoro</b> Menteri Pertahanan (Menhan) dalam berita ini mengungkapkan pendapatnya tentang tidak adanya</li> </ul>	<p>militer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 3)</b> “Demi hukum kasusnya akan dihentikan,” ujarnya. <b>FUNGSI:</b> Pernyataan ini menegaskan tentang penghentian proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Serka Santoso. Dari pernyataan tersebut Kombes Pol Kris Erlangga menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan tugas dan kewajibannya dalam kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang ada.</li> </ul> <p><b>Pelantun Wacana: Letjen TNI Moeldoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 4)</b> “Saya percayakan pada proses hukum,” katanya di Markas Yonif 403 di Kentungan, Sleman. <b>FUNGSI:</b> Sebagai Wakil Kepala Staf TNI AD, melalui pernyataan tersebut ingin menegaskan pada publik bahwa meskipun anggotanya yaitu 11 oknum Kopassus saat ini sebagai tersangka</li> </ul>		<p>penyelidikan pada pihak tertinggi sekalipun.</p> <p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Penyerbuan Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>Polri serahkan kasus ke TNI AD</b></li> <li>➤ <b>Kasus Pengeroyokan Serka Santoso dihentikan</b></li> <li>➤ <b>11 Oknum anggota Kopassus pelaku penyerbu Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>Menteri Pertahanan</b></li> <li>➤ <b>Pelanggaran HAM</b></li> <li>➤ <b>Komnas HAM</b></li> </ul> <p><b>Catchprasses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Pasalnya Kementerian Pertahanan tidak berwenang menyimpulkan apakah terjadi pelanggaran atau tidak”</b> Pernyataan ini diungkapkan oleh Politisi Senior PDI Perjuangan (paragraf 6) dengan maksud merespon penilaian Menhan yang menganggap penyerbuan Lapas Cebongan bukanlah sebuah pelanggaran HAM. Pernyataan tersebut dengan</li> </ul>
---	---	--	--



<p>pelanggaran HAM dalam aksi penyerbuan Lapas Cebongan dengan memaparkan alasan yang melatarbelakangi pendapatnya tersebut.</p> <p>➤ <b>Pramono Anung</b> Sebagai seorang politisi senior PDI Perjuangan, angkat bicara soal pernyataan Kementerian Pertahanan mengenai pelanggaran HAM terkait kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</p>	<p>penyerbuan Lapas Cebongan sedang dalam pemeriksaan, para petinggi TNI tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus tersebut, menyerahkan sepenuhnya pada hukum yang berlaku.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Purnomo Yusgiantoro</b></p> <p>➤ (pada paragraf 5) “Sudah seperti yang saya katakan, berpegang pada UU HAM, ... pelanggaran HAM berat adalah penghilangan nyawa tingkat etnis, ras dan orang banyak. Dalam kasus ini prajurit melakukan aksi secara spontan dan tidak terencana,” ucapnya.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Menhan melalui pernyataannya ini menunjukkan keberpihakannya kepada 11 oknum Kopassus pelaku penyerbuan Lapas Cebongan. Dengan dasar UU HAM, Menhan menilai aksi pelaku penyerbuan Lapas Cebongan tidak termasuk dalam pelanggaran HAM.</p>		<p>tegas bermaksud menilai bahwa Menhan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam insiden Cebongan tersebut.</p> <p><i>Exemplaars</i></p> <p>➤ “...berpegang pada UU HAM, yang dimaksud pelanggaran HAM berat adalah penghilangan nyawa tingkat etnis, ras, dan orang banyak. Dalam kasus ini prajurit melakukan aksi secara spontan dan tidak terencana”</p> <p>Pernyataan dari Purnomo Yusgiantoro (Menhan) pada paragraf 5, memaparkan tentang pandangannya yang menilai insiden Cebongan tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM mengacu pada UU HAM dan tindakan pelaku yang menurutnya spontan dan tidak terencana. Pemaparan ini seolah digunakan untuk membela posisi pelaku yang terbukti melakukan kesalahan, namun tidak ingin terlalu disudutkan</p>
---	---	--	--

	<p><b>Pelantun Wacana: Pramono Anung</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 6)</b>          “Pernyataan Menhan itu terlalu dini. Pasalnya Kementerian Pertahanan tidak berwenang menyimpulkan apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak,” tegasnya.  <b>FUNGSI:</b> Kritik yang disampaikan Politisi Senior PDI Perjuangan terhadap Menhan jelas menunjukkan adanya perbedaan suara dari Pramono Anung tentang pelanggaran HAM dari kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</p>		<p>sehingga diangkatlah pendapat yang suaranya lebih pro pada pelaku penyerbuan, 11 oknum anggota Kopassus.</p> <p><b>Visual Images</b></p> <p>➤ Berita ini dilengkapi dengan <b>foto</b> Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan, yang dalam keterangannya terlihat sangat membela pelaku dalam kasus pelanggaran HAM terkait insiden Cebongan. SKH KR menampilkan narasumber yang pendapatnya lebih ingin ditonjolkan oleh SKH KR kepada publik.</p>
<p style="text-align: center;"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Penjelasan dari Direskrimum Polda DIY Kombes Pol Kris Erlangga terkait penyerahan barang bukti kasus Cebongan kepada penyidik TNI AD, menandakan adanya penyerahan penanganan kasus Cebongan ke peradilan militer. Kemudian pemaparan dari Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan, yang memunculkan isu baru yaitu pelanggaran HAM terkait kasus Cebongan.</p>		<p style="text-align: center;"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Kepolisian dalam penyerahan kasus pada TNI AD, juga terkait dengan penghentian kasus pengeroyokan terhadap Serka Santoso, diangkat sebagai aparat keamanan negara yang melakukan tugasnya sesuai prosedur hukum. Kemudian isu baru yang dimunculkan, kasus penyerbuan Lapas Cebongan tidak termasuk dalam pelanggaran HAM, diberitakan SKH KR pada masyarakat berdasarkan pemaparan dari Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEDIA FRAME</b></p> <p>SKH Kedaulatan Rakyat melalui berita ini menunjukkan aparat keamanan negara, pihak kepolisian khususnya Polda DIY telah menjalankan tugasnya dalam penanganan kasus Cebongan dan kasus pengeroyokan terhadap Serka Santoso sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta pihak TNI AD yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI AD bersikap profesional dengan tidak mengintervensi proses hukum yang berjalan. Kemudian SKH Kedaulatan Rakyat memunculkan isu baru dan menunjukkan pada masyarakat bahwa kasus penyerbuan Lapas Cebongan bukanlah pelanggaran HAM berdasarkan pemaparan UU HAM yang disampaikan Menteri Pertahanan.</p>			

**Analisis Teks Berita 6 (SKH Kedaulatan Rakyat)**

**Judul : Komnas HAM Tumpul Hadapi Preman (Priyo Budi Santoso Anggap Tak Adil)**

**Edisi : Rabu, 17 April 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai tidak adil oleh Wakil Ketua DPR RI dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan. Selain Wakil Ketua DPR RI, juga mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) juga memberikan respon yang sama terhadap kinerja Komnas HAM.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Berita ini diangkat untuk memberikan informasi tentang kritik dari beberapa pihak atas kinerja Komnas HAM dalam kasus penyerbuan Lapas Cebongan, khususnya Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso. Respon negatif dilontarkan oleh Priyo Budi Santoso karena Komnas HAM dianggap tidak berlaku adil terhadap seluruh pihak yang</p>	<p><b>Jenis Wacana</b> <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 1)</b> ... pembelaan dan perlindungan terhadap HAM, Priyo terang-terangan menilai Komnas HAM hanya menyoroti pelanggaran HAM yang dilakukan TNI.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 2)</b> .... Komnas HAM justru sebaliknya dengan bersikap abai terhadap kemungkinan pelanggaran HAM yang dilakukan preman.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 3)</b> ..., Komnas Ham seharusnya berlaku adil terhadap seluruh pihak ...., tanpa kecuali.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Dari paragraf 1 dan 2 yang ditulis wartawan di atas, menunjukkan bahwa adanya kritik dari Wakil Ketua DPR RI terhadap kinerja Komnas HAM. Priyo menilai</p>	<p><b>Placement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita ini tertulis dalam SKH Kedaulatan Rakyat edisi Rabu, 17 April 2013. Pada edisi kali ini, berita yang berkaitan dengan peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan masih ditempatkan di halaman utama (halaman pertama), tapi tidak lagi menjadi headline. Jika biasanya berita mengenai peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan menjadi "point of interest" dengan menempati hampir setengah halaman koran dan memenuhi semua kolom yang dilengkapi foto maupun grafis gambar yang mencolok, berbeda dengan edisi ini. Meski masih ditempatkan di halaman pertama, namun berita ini terletak di tengah-tengah halaman dengan porsi 3 kolom</li> </ul>	<p><b>Metaphors</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“tumpul hadapi preman”</b> Kalimat ini dituliskan SKH KR pada judul berita untuk menggambarkan sikap Komnas HAM yang dianggap tumpul hadapi preman. Tumpul dalam arti sebenarnya adalah tidak tajam, sementara dalam makna lain seperti pandangan atau pikiran, tumpul berarti tidak mempertimbangkan dengan baik. sementara dalam judul, kalimat tersebut mengandung kedua makna sekaligus, makna konotatif dan denotatif.</li> <li>➤ <b>“bersuara keras”</b> Kalimat di atas memiliki arti mengeluarkan suara dengan volume yang keras. Namun kalimat tersebut pada paragraf 1 dalam berita ini digunakan untuk menggambarkan Wakil</li> </ul>

<p>diduga melakukan pelanggaran HAM. Sementara, Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, mengungkapkan bahwa Komnas HAM dalam kasus ini terlalu menyudutkan Kopassus.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)</b> Lembaga negara yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dalam wacana ini, Komnas HAM menjadi sorotan oleh wakil ketua DPR RI dan mantan Kepala BIN, di mana dianggap tidak adil dalam melihat kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Pelaku Penyerangan Lapas Cebongan</b> 11 oknum anggota pasukan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dari Grup 2 Kartosura. Menjadi fokus dalam wacana ini, yang dianggap benar secara moral atas aksi</li> </ul>	<p>Komnas HAM tidak adil karena hanya memandang pelanggaran HAM dari satu pihak saja yaitu yang dilakukan oknum TNI. Ketidakadilan itu ditekankan lagi oleh wartawan dalam paragraf 3 yang kembali menurut Priyo, Komnas HAM seharusnya menjamin perlindungan HAM kepada seluruh pihak tanpa kecuali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 3 kalimat 2)</b> Secara hukum, aksi penyerangan Lapas Cebongan Sleman, tetap tak bisa dibenarkan.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 4)</b> ... yang perlu diluruskan adalah latar belakang para prajurit melakukan pelanggaran, yakni aktivitas premanisme yang tak terbendung.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 4 kalimat 2)</b> ..... secara moral, prajurit Kopassus itu telah menjawab kekusaran masyarakat Yogyakarta dalam pemberantasan premanisme di sana.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> ... Priyo mengajak semua elemen</li> </ul>	<p>berita, 32 baris, dan dilengkapi foto kecil Priyo Budi Santoso yang menjadi narasumber dalam berita ini di kolom kedua dari berita ini, kemudian bersambung ke halaman 7. Sambungan berita di halaman 7 pun diisi dengan foto para anggota Kopassus yang membawa tumpeng buah-buahan dalam perayaan HUT Ke-61 Kopassus yang cukup mencolok.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Judul:</b> Komnas HAM Tumpul Hadapi Preman (Sub Judul: Priyo Budi Santoso Anggap Tak Adil) <b>FUNGSI:</b> Judul dan sub judul dari berita ini menunjukkan adanya pejabat pemerintahan yang saling bertentangan dalam melihat pelanggaran HAM pada kasus penyerbuan Lapas Cebongan, yaitu Wakil Ketua DPR RI yang menilai kinerja Komnas HAM tidaklah adil. KR dalam berita ini jelas ingin menunjukkan pihak-pihak yang mendukung Kopassus sebagai institusi yang beberapa</li> </ul>	<p>Ketua DPR RI yang mengkritik dengan keras terhadap kinerja Komnas HAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“menyoroti”</b> Kata ini terdapat pada paragraf 1 merujuk pada Komnas HAM yang hanya fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku Penyerbu Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>“bersikap abai”</b> Kalimat ini digunakan pada paragraf 2 yang mengacu pada makna bersikap tidak peduli.</li> <li>➤ <b>“aktivitas premanisme”</b> Kalimat ini terdapat pada paragraf 4 yang menunjukkan tindakan yang dilakukan keempat tahanan titin Polda DIY sebagai korban. Kata aktivitas seolah menggambarkan sebuah kegiatan yang terus dilakukan berkaitan dengan tindak kejahatan (premanisme).</li> <li>➤ <b>“tak terbendung”</b> Kalimat ini ditemukan pada paragraf 4 yang bermaksud menyampaikan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang disebut dalam</li> </ul>
---	---	--	---

<p>penyerangan Lapas Cebongan oleh Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Partai Golkar dan oleh mantan Kepala Badan Intelegen Negara.</p> <p>➤ <b>Empat Tahanan Titipan Polda DIY</b> Tewas ditembak mati oleh pelaku penyerangan Lapas Cebongan, dan dalam artikel berita ini dipandang oleh Wakil Ketua DPR RI dan Mantan Kepala Badan Intelegen Negara sebagai kelompok preman yang meresahkan masyarakat Yogyakarta.</p> <p>➤ <b>Sertu Heru Santosa</b> Anggota Kopassus Grup II Surakarta, yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh empat tahanan Polda DIY di Hugos Cafe. Dalam wacana ini, pembunuhan terhadap Sertu Santoso dianggap oleh mantan Kepala Badan Intelegen Negara sebagai sebuah pelanggaran HAM.</p> <p><b>Pelantun Wacana:</b></p>	<p>masyarakat memberikan respek tinggi terhadap 11 prajurit muda Kopassus tersebut.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Kedaulatan Rakyat dalam beberapa paragraf di atas sangat menonjolkan pendapat Priyo yang sangat jelas tergambar mendukung aksi yang diperbuat pelaku penyerbuan Lapas Cebongan secara moral, dengan dasar memberantas aktivitas premanisme. Bahkan pada paragraf 5, Kedaulatan Rakyat ikut mengajak rakyat dengan menuliskan apa yang disampaikan Priyo sebagai ajakan untuk respek terhadap para pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang dalam wacana ini begitu disanjung.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 6)</b> Pada kesempatan berbeda, mantan Kepala Badan Intelegen Negara (BIN) Hendropriyono ... respon yang sama terhadap kinerja Komnas HAM. .... tidak berimbang dan terlalu menyudutkan Kopassus.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Wartawan dalam berita ini memilih narasumber</p>	<p>anggotanya telah melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ Dalam wacana ini, lebih dominan dituliskan penyosokan terhadap pelaku penyerbuan lapas Cebongan yaitu 11 oknum anggota Kopassus. Penyosokan terhadap pelaku tersebar dari awal hingga akhir melalui pernyataan maupun tanggapan dua narasumber yang bernada positif dalam mendukung aksi pelaku. Sementara penyosokan terhadap keempat korban tewas yaitu empat tahanan titipan Polda DIY tersirat (negatif) dari tanggapan narasumber yang memaparkan latar belakangnya dalam mendukung aksi pelaku.</p> <p>➤ Penutup dari wacana ini adalah tanggapan dari mantan Kepala Badan Intelegen Negara (BIN) seusai menghadiri acara HUT ke-61 Kopassus. Tanggapan itu mengenai ketidakejuannya terhadap kinerja Komnas</p>	<p>berita ini sebagai ”preman” sudah sangat banyak, hingga tak terkontrol lagi.</p> <p>➤ <b>“kegusaran”</b> Pada paragraf 4, istilah ini digunakan untuk menggambarkan rasa kemarahan masyarakat.</p> <p>➤ <b>“pemberantasan premanisme”</b> Kalimat ini ditemukan pada paragraf 4 yang menyebutkan bahwa aksi penyerbuan Lapas Cebongan sebagai sebuah tindakan pemberantasan premanisme. Hal ini membenarkan tindakan Kopassus yang dituliskan SKH KR benar secara moral.</p> <p>➤ <b>“respek tinggi”</b> Kalimat ini berarti memberikan hormat setinggi-tingginya. Kalimat ini terdapat pada paragraf 3 yang ditujukan untuk pelaku penyerbu Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>“11 prajurit muda Kopassus”</b> Pelaku penyerbu Lapas Cebongan dalam berita ini disebut sebagai 11 prajurit muda Kopassus, seolah</p>
--	--	--	---

<p>➤ <b>Wartawan</b> Berperan dalam mengemas fakta menjadi sebuah berita yang disuguhkan kepada masyarakat terkait pandangan Wakil Ketua DPR RI dan mantan Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) terhadap Komnas HAM yang dianggap tidak adil dalam menyikapi kasus Penyerangan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso</b> Juga selaku Ketua DPP Partai Golkar, angkat bicara terhadap kinerja Komnas HAM yang dianggap tumpul hadapi premanisme dalam menyikapi kasus Penyerangan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>Mantan Ketua Badan Inteligen Negara (BIN), Hendropriyono</b> Pihak yang memiliki tanggapan yang sama dengan Wakil Ketua DPR RI, yaitu memandang Komnas HAM tidak adil dalam menilai peristiwa penyerangan Lapas Cebongan.</p>	<p>yang lebih pro pada pihak TNI, terbukti selain Priyo Budi Santoso, wartawan juga mengangkat tanggapan keras dari mantan Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) yang juga mengkritik kinerja Komnas HAM. Pada paragraf di atas jelas ditulis bahwa Hendropriyono juga menilai Komnas HAM terlalu menyudutkan Kopassus. Hal ini tentu menunjukkan bahwa KR dalam mengemas informasi ini lebih melihat dari sudut pandang narasumber yang pro terhadap oknum Kopassus yang melakukan aksi penyerbuan Lapas Cebongan dan menilai Komnas HAM tidak adil.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Priyo Budi Santoso</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 2)</b> “Jangan tajam untuk menindak para prajurit-prajurit muda, tapi tumpul terhadap orang-orang yang justru meresahkan masyarakat. Ini yang tidak benar,” kata Priyo ...</p> <p><b>FUNGSI:</b> Priyo</p>	<p>HAM yang dianggap terlalu menyudutkan Kopassus.</p> <p>➤ Menarik dari wacana ini adalah Kedaulatan Rakyat menampilkan sebuah wacana yang mana ada beberapa pihak yang tidak satu suara dengan Komnas HAM dalam menilik kasus pelanggaran HAM yang ada pada peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, sementara dari awal hingga akhir wacana tidak ada sama sekali konfirmasi dari pihak Komnas HAM yang diangkat untuk menanggapi hal tersebut. Sehingga masyarakat hanya disuguhkan dengan informasi yang mana adanya dukungan terhadap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan dari pihak yang cukup memiliki kuasa dalam jajaran pemerintahan bangsa ini, Republik Indonesia.</p>	<p>mereka masih memiliki harga diri sebagai prajurit meski telah melakukan pelanggaran hukum.</p> <p>➤ <b>“penyerangan brutal”</b> Kalimat ini menggambarkan pada sebuah aksi kekerasan yang sangat kasar;kejam;biadab;kurang ajar (menurut KBBI, berkaitan dengan perilaku). Kalimat ini terdapat pada paragraf 7 yang mengarah pada pembunuhan Serka Santoso disebut sebagai penyerangan brutal.</p> <p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Komnas HAM</b></li> <li>➤ <b>Preman</b></li> <li>➤ <b>11 Prajurit Muda Kopassus</b></li> <li>➤ <b>Wakil Ketua DPR RI menilai Komnas HAM tumpul terhadap ‘preman’</b></li> <li>➤ <b>Pemberantasan Premanisme</b></li> <li>➤ <b>Kopassus</b></li> <li>➤ <b>Mantan Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) anggap Komnas HAM sudutkan Kopassus</b></li> </ul> <p><b>Catchprasses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Komnas HAM suruh</b></li> </ul>
--	---	--	--

	<p>mengungkapkan penilaiannya terhadap kinerja Komnas HAM yang dianggapnya tidak adil dalam menangani kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> "... salah, iya. Tetapi, ... langkah yang diyakini secara moral itu benar. ...., saya meminta kita semua harus adil," ujar Priyo.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Priyo sangat yakin bahwa motif yang melatarbelakangi pelaku penyerbuan Lapas Cebongan melakukan aksinya, dinilai secara moral, menjadi alasan yang kuat untuk mendukung pelaku. Pernyataannya ini jelas dapat terlihat bahwa meski Priyo menilai tindakan pelaku salah secara hukum, namun Priyo tetap tegas mengajak seluruh pihak untuk mendukung pelaku atas perbuatannya dari motifnya yang secara moral baginya menjawab kegusaran masyarakat Yogyakarta.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Hendropriyono</b></p>		<p><b>belajar dulu!"</b></p> <p>Pernyataan ini dikeluarkan oleh Mantan Kepala BIN (pada paragraf 6) sebagai reaksinya terhadap Komnas HAM yang dinilainya terlalu menyudutkan Kopassus. Pada pernyataan ini seolah menggambarkan bahwa Komnas HAM kurang tepat dalam menilik kasus Cebongan tersebut, dan masih perlu untuk membenahi pikirannya dengan banyak belajar lebih jauh.</p> <p><i>Depiction</i></p> <p>➤ <b>"Jangan tajam untuk menindak para prajurit-prajurit muda, tapi tumpul terhadap orang-orang yang justru meresahkan masyarakat"</b></p> <p>Pernyataan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR RI ini dimuat pada paragraf 2. Pernyataan ini menunjukkan bahwa menurutnya kinerja Komnas HAM kurang tepat dalam penanganan kasus penyerbuan Lapas Cebongan. Komnas HAM dianggap</p>
--	---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 6)</b> “Komnas HAM suruh belajar dulu! Saya enggak percaya Komnas HAM berpikiran seperti itu. Kita prajurit dan dikirim ke medan pertempuran, ... salah di mana-mana ...,” kata Hendropriyono ...</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 7)</b> “... orang bebas masuk ke mana saja, kok malah digebukin? Sampai mati pun diseret. Itu pelanggaran HAM. Kopassus secara hukum salah, tapi secara moral saya setuju,” ujarnya. <b>FUNGSI:</b> Setali tiga uang dengan Priyo Budi Santoso, Hendropriyono pun menilai Komnas HAM tidak adil dan menganggap Kopassus benar secara moral meskipun jika dinilai secara hukum memang salah. Bahkan dari pernyataannya dalam paragraf 6, Hendropriyono nampak gusar terhadap Komnas HAM yang menyudutkan Kopassus, padahal menurutnya Kopassus rela mengorbankan nyawa dalam medan perang, namun malah di salahkan atas aksi penyerbuan Lapas Cebongan.</li> </ul>		<p>terlalu menyoroti pelanggaran yang dilakukan pelaku penyerbu Lapas Cebongan dibanding pelanggaran yang dilakukan keempat tahanan titipan Polda DIY.</p> <p><b>Visual Images</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada halaman pertama, berita ini dilengkapi <b>foto</b> dari Priyo Budi Santoso sebagai narasumber dalam berita tersebut.</li> <li>➤ <b>Foto kedua</b> berada pada halaman 7, sambungan berita, yang menggambarkan anggota Kopassus yang membawa tumpeng buah dalam perayaan HUT Ke-61 Kopassus.</li> </ul>
--	---	--	---



<p style="text-align: center;"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Keterlibatan Priyo Budi Santoso sebagai aktor tunggal dalam wacana ini, dan didukung pernyataan Hendropriyono, mengarahkan wacana ini pada kinerja Komnas HAM yang tidak berimbang dalam menangani kasus Cebongan, karena menyudutkan 11 oknum anggota Kopassus yang tindakannya dinilai benar secara moral.</p>	<p style="text-align: center;"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Penempatan fakta yang didominasi oleh Komnas HAM yang dinilai tidak adil dan menyudutkan Kopassus menjadi objek yang lebih ditonjolkan dalam berita ini. Tindakan anggota Kopassus yang dibenarkan secara moral karena dinilai narasumber sebagai tindakan yang memberantas aktivitas premanisme juga ikut menjadi perhatian yang menonjol dalam teks berita ini.</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEDIA FRAME</b></p> <p>SKH Kedaulatan Rakyat mengangkat informasi tentang kinerja Komnas HAM yang tidak adil dan menyudutkan Kopassus dari sudut pandang narasumber yang terpilih, yaitu Wakil Ketua DPR RI, untuk mengarahkan wacana tersebut pada pengangkatan sosok pelaku menjadi positif sebagai aparat keamanan yang menindak premanisme dan keempat tahanan titipan Polda DIY terpojokkan dengan negatif sebagai preman yang meresahkan masyarakat.</p>	

**Analisis Teks Berita 1 (Harian Kompas)**

**Judul : Lapas Sleman Diserang (4 Tahanan Ditembak Derombolan di Depan 31 Tahanan Lain)**

**Edisi : Minggu, 24 Maret 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b> Penyerangan Lapas Sleman oleh gerombolan orang tak dikenal bersenjata lengkap dan menewaskan empat tahanan titipan polisi sebagai sasarannya.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Gerombolan Penyerang Lapas Cebongan</b> Gerombolan orang yang berjumlah 15 orang dengan membawa senjata lengkap dan melakukan aksi penyerangan dalam waktu yang singkat dengan sasaran yang jelas.</li> <li>➤ <b>Empat Tahanan Titipan Polda DIY</b> Tahanan titipan Polda DIY, tersangka pembunuhan Sersan Satu Santosa (anggota Kopassus), yaitu Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan</li> </ul>	<p><b>Jenis Wacana</b> <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada lead berita)</b> Gerombolan orang tak dikenal yang bersenjata lengkap, ..., menyerang Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. ... empat tahanan titipan polisi tewas ditembak ... ..berlangsung dalam waktu singkat dengan sasaran jelas.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> <i>Lead</i> berita ini menunjukkan peristiwa penyerangan Lapas Cebongan yang dilakukan dengan singkat dan sasarannya jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 2)</b> Mereka tercatat sebagai desertir anggota kesatuan Kepolisian Resor Kota Besar Yogyakarta.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 3)</b> ... keempat tahanan asal Nusa Tenggara Timur ini terlibat kasus pembunuhan seorang anggota</li> </ul>	<p><b>Placement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita ini tertulis dalam Harian Kompas edisi Minggu, 24 Maret 2013. Berita yang dimuat sehari setelah peristiwa penyerangan Lapas Cebongan ini terjadi ditempatkan Harian Kompas di halaman ke-2.</li> <li>➤ <b>Judul:</b> Lapas Sleman Diserang (Sub Judul: 4 Tahanan Ditembak Gerombolan di Depan 31 Tahanan Lain).</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Pemilihan judul ini menggambarkan adanya peristiwa penyerangan di Lapas Cebongan, yang mana dalam peristiwa penyerangan tersebut dijelaskan dalam sub judul bahwa ada aksi penembakan terhadap 4 tahanan. Tindakan yang kejam juga tergambar dalam sub judul yaitu penembakan</p>	<p><b>Metaphors</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“gerombolan”</b> Gerombolan memiliki arti kelompok yang lebih mengacu pada hal yang negatif, seperti perusuh, pengacau, dsb. Istilah ini terdapat dalam <i>lead</i> berita yang merujuk pada pelaku penyerbu Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>“sasaran jelas”</b> Istilah ini terdapat pada <i>lead</i> berita yang memiliki arti sebenarnya yaitu target atau tujuan yang jelas. Istilah tersebut menegaskan bahwa penyerbuan terhadap Lapas Cebongan telah memiliki target yang ingin diserang sebagai tujuan dari aksi tersebut.</li> <li>➤ <b>“desertir”</b> Istilah ini memiliki arti sebagai orang yang meninggalkan dinas ketentaraan atau kesatuan keamanan seperti kepolisian. Istilah ini</li> </ul>

<p>Mambait. Empat tahanan ini tercatat sebagai desertir anggota kesatuan Kepolisian Resor Kota Besar Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>31 Tahanan Lain</b> Tahanan Lapas Cebongan di ruangan nomor 5 Blok Anggrek Lapas Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Pihak yang menyaksikan penembakan terhadap empat korban sasaran penyerbuan Lapas Cebongan, karena berada dalam blok sel yang sama.</li> <li>➤ <b>Sersan Satu Heru Santosa</b> Korban penusukan hingga tewas oleh keempat tersangka yang dititipkan Polda DIY di Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Sersan Satu Sriyono</b> Korban pembacokan di Lempuyangan, Yogyakarta, yang mana pelakunya diduga berasal dari kelompok yang sama dengan empat tahanan titipan Polda DIY yang tewas dalam aksi penyerangan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>10 Petugas Sipir Lapas Cebongan</b> Petugas Sipir Lapas Cebongan yang saat kejadian</li> </ul>	<p>TNI AD, Sersan Satu Santosa, ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf)</b> Selang sehari, seorang anggota TNI AD, Sersan Satu Sriyono, juga jadi korban pembancokan ... Pelaku diduga berasal dari kelompok yang sama. <b>FUNGSI:</b> Pada paragraf dua Harian Kompas menuliskan latar belakang empat tahanan titipan Polda DIY. Kemudian paragraf 3 menjelaskan kasus yang dihadapi empat korban penyerangan Lapas Cebongan. Sementara paragraf 4 menginformasikan kasus pembacokan terhadap anggota TNI AD yang lain yang diduga pelaku berasal dari kelompok yang sama dengan empat tersangka pembunuhan Sertu Santosa. Melalui beberapa paragraf di atas, Kompas mengungkapkan kasus-kasus yang diduga terkait dengan terjadinya aksi penyerangan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> ... gerombolan penyerang berjumlah 15 orang yang lengkap membawa senjata api laras panjang, pistol, dan</li> </ul>	<p>dilakukan dihadapan 31 tahanan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyosokan terhadap pelaku penyerangan Lapas Cebongan dalam berita ini tersebar dari paragraf awal hingga akhir.</li> <li>➤ Dari <i>lead</i> berita, paragraf 5 hingga paragraf 10 menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri pelaku penyerangan dan bagaimana cara mereka melakukan aksinya tersebut. Pemaparan dari Kepala Lapas Cebongan yang dimuat Harian Kompas pada paragraf 5 hingga paragraf 10 menggambarkan kekejaman pelaku dalam melakukan aksinya yang mana untuk mencari target sasarannya juga melukai seluruh petugas Lapas Cebongan berjumlah 10 orang yang berjaga dini hari saat peristiwa tersebut terjadi.</li> <li>➤ Sementara pada paragraf 2 hingga paragraf 4, dituliskan mengenai latar belakang dari target sasaran yang menjadi korban penembakan dalam peristiwa penyerangan Lapas</li> </ul>	<p>digunakan pada paragraf 2 untuk menunjukkan identitas dari keempat tahanan yang menjadi korban penyerbuan Lapas Cebongan adalah desertir anggota Kepolisian Resor Kota Besar Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“tak berikutnya”</b> Makna lain yang menggambarkan tak memiliki daya untuk bergerak sedikit pun. Istilah ini terdapat pada paragraf 8 untuk menggambarkan kondisi para Sipir Lapas Cebongan saat penyerbuan terjadi.</li> <li>➤ <b>“komplotan”</b> Sesuai KBBI, kom-plot-an, memiliki arti sebuah sekutu yang mengarah pada kejahatan. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada pelaku penyerbu Lapas Cebongan pada paragraf 9.</li> <li>➤ <b>“menyisir”</b> Kata ini terdapat pada paragraf 9 yang menjelaskan bahwa pelaku penyerbuan mencari 4 tahanan titipan Polda DIY di antara tahanan lainnya di Blok Anggrek, Lapas Cebongan.</li> </ul>
--	---	--	---

<p>penyerangan sedang bertugas menjaga Lapas, namun dalam peristiwa penyerangan tersebut para petugas ini tidak berkulit menghadapi gerombolan penyerang Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Aldrin Pasha</b> Juru Bicara Kepresidenan yang menyatakan keterkejutan Presiden SBY atas peristiwa penyerangan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono</b> Sebagai Kepala Negara RI, melalui juru bicaranya Presiden SBY memerintahkan jajaran keamanan untuk mengusut peristiwa penyerangan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal Hardiono Saroso</b> Pihak TNI yang membantah bahwa pelaku penyerangan Lapas Cebongan adalah anggota Kopassus.</li> <li>➤ <b>Kapten (Inf) Wahyu Yuniartoto</b> Kepala Seksi Intelijen Kopassus Grup-2 dalam wacana ini juga ikut membantah akan adanya</li> </ul>	<p>granat. Mereka berpakaian preman ... memakai penutup muka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 6)</b> ..., sekelompok orang itu mengaku dari Kepolisian Daerah (Polda) DI Yogyakarta ... Mereka mengaku ingin membawa empat tersangka kasus pembunuhan Sersan Satu Santosa di Hugo's Café, Selasa lalu. <b>FUNGSI:</b> Dua paragraf di atas menguatkan informasi bahwa gerombolan bersenjata lengkap ini sudah memiliki target yang jelas dalam aksi penyerangan Lapas Cebongan. Seperti yang ditulis dalam paragraf 6, mereka langsung meminta pada sipir untuk membawa empat tersangka pembunuh Sertu Santosa.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 12)</b> Juru Bicara Kepresidenan ... menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkejut dan memerintahkan jajaran keamanan mengusutnya. <b>FUNGSI:</b> Paragraf ini memperlihatkan reaksi dari Kepala Negara Republik Indonesia atas peristiwa</li> </ul>	<p>Cebongan, yaitu 4 tahanan titipan Polda DIY. Dalam ketiga paragraf tersebut dijelaskan kasus yang sedang dihadapi oleh keempat tahanan serta kasus lain yang diduga terkait dengan kelompok 4 tahanan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada akhir berita ini, pada tiga paragraf terakhir yaitu paragraf 11 hingga paragraf 13, Harian Kompas menutup berita ini dengan sub judul baru yaitu "Pangdam Membantah". Hal ini menarik, karena dalam berita dengan judul besar "Lapas Sleman Diserang" ini, Harian Kompas memuat bantahan dari dua orang pihak TNI bahwa pelaku penyerangan adalah anggota Kopassus. Hal ini menunjukkan adanya kecurigaan bahwa pelaku berasal dari anggota Kopassus, sehingga dimunculkan bantahan tersebut persis setelah dituliskannya reaksi keterkejutan Presiden SBY yang disampaikan oleh juru bicaranya.</li> </ul>	<p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Lapas Cebongan Sleman diserang</b></li> <li>➤ <b>Gerombolan penyerang Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>4 Tahanan titipan Polda DIY tewas</b></li> </ul> <p><b>Visual Images</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Foto yang menggambarkan kegiatan olah tempat kejadian perkara oleh anggota kepolisian di Lapas Cebongan pasca peristiwa penyerangan.</li> </ul>
---	---	--	---

<p>kecurigaan bahwa pelaku penyerangan Lapas Cebongan adalah anggota Kopassus.</p> <p><b>Pelantun Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Wartawan</b> Pihak yang berperan penting dalam mengemas informasi terkait peristiwa penyerangan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Kepala Lapas Cebongan, Sukamto Harto</b> Pimpinan Lapas Cebongan yang memberikan keterangan seputar peristiwa penyerangan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Rio Rama Baskara</b> Kuasa hukum dari keempat tahanan titipan Polda DIY yang menjadi korban dalam peristiwa penyerangan Lapas Cebongan. Dalam wacana ini, Rio menjelaskan pemindahan kliennya beberapa tempat tahanan yang berakhir di Lapas Cebongan dan tewas ditembak.</li> </ul>	<p>penyerangan Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 12 kalimat 2-3)</b> Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal Hardiono Saroso membantah penembakan dilakukan anggota Kopassus. Kepala Seksi Intelejen Kopassus Grup-2 Kapten (Inf) Wahyu Yuniarto juga membantah. <b>FUNGSI:</b> Harian Kompas menuliskan pihak-pihak dari TNI AD yang membantah adanya kecurigaan bahwa pelaku penyerangan Lapas Cebongan adalah anggota Kopassus. Sebab, korban dari aksi penyerangan tersebut merupakan tersangka dari pembunuhan terhadap salah satu anggota Kopassus yaitu Sertu Santosa.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 13)</b> Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, di lapas, berharap penegak hukum mengusutu dan mengungkapkan penyerangan tersebut. <b>FUNGSI:</b> Pada paragraf terakhir dari berita ini, Harian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Selain itu, tanggapan kuasa hukum 4 tahanan yang menjadi korban penembakan juga masuk dalam berita ini, yaitu tanggapan Rio yang menyayangkan adanya peristiwa penembakan itu dengan menjelaskan alur pemindahan kliennya hingga sampai di Lapas Cebongan.</li> </ul>	
--	--	--	--

	<p>Kompas menutupnya dengan harapan dari pihak pemerintah dalam bidang Hukum dan HAM terhadap penegak hukum soal pengungkapan kasus penyerangan tersebut.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Sukamto Harto</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>(pada paragraf 7)</b> “Permintaan mereka ditolak. ... mengancam hendak meledakkan lapas dengan granat jika pintu tak dibuka. ...petugas membukakkan pintu dan belasan orang ... masuk. Mereka menyeret sipir untuk menunjukkan empat tahanan yang dicari,” ungkapnya.</li><li>➤ <b>(pada paragraf 8)</b> “Semua petugas ditodong dengan senjata api serta diancam, diinjak, dan dipukul dengan senjata,” ungkap Sukamto.</li><li>➤ <b>(pada paragraf 9)</b> “Keempat tahanan itu langsung ditembak, tepat dihadapan 31 tahanan lain. Penembakannya tak menggunakan peredam,” papar Sukamto.</li><li>➤ <b>(pada paragraf 10)</b> “aksi ini hanya berlangsung sekitar 15 menit,” paparnya.</li></ul>		
--	--	--	--

	<p><b>FUNGSI:</b> Pemaparan Kepala Lapas Cebongan seputar aksi penyerangan Lapas Cebongan ini menggambarkan betapa kejam dan sadisnya pelaku melakukan aksinya. Untuk mendapatkan target yang diinginkan dengan cepat, pelaku tidak hanya sekedar meminta ditunjukkan lokasi terget, tapi juga melukai seluruh petugas sipir. Pemaparan Sukamto ini sangat jelas ingin menunjukkan bagaimana kejamnya pelaku melakukan aksinya yang dilakukan dengan waktu yang sangat singkat.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Rio Rama Baskara</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 11)</b> “Awalnya, semua tersangka ditahan di Polres Sleman, kemudian dipindah ke tahanan Polda, Rabu lalu, dan Jumat siang, dipindahkan lagi ke Lapas Cebongan. Kami terus mengikuti pemindahan klien kami,” kata Rio.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Dalam wacana ini, Kompas juga menghadirkan</p>	
--	--	--

	<p>informasi dari kuasa hukum empat tersangka titipan Polda DIY yang menjadi korban penembakan. Kuasa hukum empat korban ini menyangkan adanya peristiwa tersebut karena korban dalam pengamanan Polda DIY. Pernyataan Rio dalam paragraf 11 di atas membuktikan bahwa empat tersangka harusnya berada di tahanan Polda DIY, namun sehari sebelum peristiwa penyerangan dipindahkan ke Lapas Cebongan.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Pemaparan dari Kepala Lapas Cebongan Sleman digunakan sebagai dasar dalam mengangkat obyek wacana berita ini yaitu tewasnya 4 tahanan oleh gerombolan dengan senjata yang lengkap. Keterangan dari Kuasa hukum keempat tahanan tersebut digunakan untuk melengkapi informasi kepindahan kliennya, namun berita ini didominasi oleh informasi seputar kronologi peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan yang mengarah pada identitas pelaku.</p>		<p style="text-align: center;"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Informasi yang didominasi oleh kronologi peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan yang mengarah pada pelaku penyerbu membuat berita ini lebih menonjolkan ciri-ciri serta cara pelaku dalam melakukan aksinya untuk mengungkap dugaan pelaku penyerbu Lapas Cebongan tersebut.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEDIA FRAME</b></p> <p>Harian Kompas membingkai berita ini dari sudut pandang yang mengarah pada pengungkapan terhadap pelaku penyerbu Lapas Cebongan berdasarkan informasi seputar kronologi peristiwa yang merujuk pada identitas dan aksi pelaku.</p>			



**Analisis Teks Berita 2 (Harian Kompas)**

**Judul : Pertaruhan Wibawa Hukum (Ungkap Pelakunya, Siapa Pun Mereka! )**

**Edisi : Senin, 25 Maret 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b> Aksi penyerbuan Lapas Cebongan adalah masalah sangat gawat yang mempertaruhkan wibawa penegakan hukum. <b>FUNGSI:</b> Wacana ini muncul pada hari kedua pasca peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan. Berita ini untuk menginformasikan pada publik bahwa aksi penyerbuan Lapas Cebongan adalah suatu masalah gawat yang mempertaruhkan wibawa penegakan hukum di Indonesia.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b> ➤ <b>Gerombolan Pelaku Penyerangan Lapas Cebongan</b> Dalam wacana ini disebutkan gerombolan pelaku penyerbuan Lapas Cebongan sekitar 17 orang bersenjata yang melukai para petugas</p>	<p><b>Jenis Wacana</b> <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b> ➤ <b>(pada lead berita)</b> Penyerbuan ..., merupakan masalah yang sangat gawat. ...penanganan serius. Wibawa penegakan hukum di negeri ini pun dipertaruhkan. <b>FUNGSI:</b> Harian Kompas menuliskan bahwa peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan bukanlah hal yang biasa terjadi dalam kasus hukum, namun sudah termasuk sangat gawat. Informasi ini berupaya membukakan mata masyarakat agar dapat melihat dengan adanya peristiwa penyerbuan ini membuktikan bahwa wibawa penegakan hukum sedang dipertaruhkan untuk mengungkap pelaku penyerbuan tersebut. ➤ <b>(pada paragraf 2 kalimat 2)</b> Mereka melukai dua petugas LP dan menembak mati empat</p>	<p><b>Placement:</b> ➤ Berita ini tertulis dalam Harian Kompas edisi Senin, 25 Maret 2013. Berita ini ditempatkan di bagian atas pada halaman pertama. Berita ini menjadi <i>headline</i> dengan judul yang besar, dilengkapi foto dan gambar grafis cukup mencolok, sehingga membuat berita ini menjadi “<i>point of interest</i>” pada halaman paling depan dari Harian Kompas.  ➤ <b>Judul:</b> Pertaruhan Wibawa Hukum (Sub Judul:Ungkap Pelakunya, Siapa Pun Mereka!) <b>FUNGSI:</b> Pemilihan judul untuk berita lanjutan dari penyerbuan Lapas Cebongan menunjukkan bahwa arah berita ini mengacu pada ranah hukum. Judul berita ini menunjukkan bahwa aksi</p>	<p><b>Metaphors</b> ➤ <b>“pertaruhan”</b> Dalam KBBI, kata ini memiliki makna suatu hal perbuatan bertaruh. Sementara bertaruh biasa digunakan dalam perjudian; suatu permainan; menang kalah. Kata ini lantas digunakan dalam judul seolah ingin menunjukkan bahwa insiden Lapas Cebongan telah membuat wibawa hukum menjadi sebuah pertaruhan atau permainan. ➤ <b>“wibawa penegakan hukum”</b> Kata wibawa bermakna sebagai pembawaan yang menguasai; mempengaruhi; dihormati. Kalimat ini terdapat pada <i>lead</i> berita untuk mengacu pada wibawa atau kehormatan dari penegakan hukum sedang dipertaruhkan. ➤ <b>“gawat”</b> Istilah ini pada paragraf 2 menggambarkan bahwa</p>

<p>sipir dan menembak mati target sasarannya. Pihak kepolisian bersama TNI masih mencari siapa mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Empat Tahanan Titipan Polda DIY</b> Tersangka kasus pembunuhan terhadap Sertu Santosa, dan menjadi korban tembak mati dalam aksi penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Sersan Satu Heru Santosa</b> Anggota Kopassus yang tewas dikeroyok oleh keempat korban penyerbuan Lapas Cebongan beberapa saat lalu di Hugos Café. Kasusnya diduga melatarbelakangi aksi penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Kementerian Hukum dan HAM</b> Instansi pemerintahan yang mendukung kepolisian sepenuhnya untuk menngungkap pelaku penyerangan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Kapolda DI Yogyakarta Brigadir Jenderal (Pol) Sabar Rahardjo</b> Pimpinan Kepolisian tertinggi Polda DI Yogyakarta, dalam wacana ini menjelaskan alasan pemindahan keempat tahanan</li> </ul>	<p>tahanan titipan Polda DI Yogyakarta ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> Penyerangan tersebut memperlihatkan kelemahan mencolok penjagaan oleh aparat negara terhadap tahanan.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 5 kalimat 3)</b> “Buktinya, faktor lemahnya perlindungan atau penjagaan telah dimanfaatkan oleh pelaku,” ujar pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso. <b>FUNGSI:</b> Pada paragraf ke-2, Harian Kompas menunjukkan apa saja yang dilakukan pelaku penyerbuan Lapas Cebongan saat melakukan aksinya. Kemudian pada paragraf ke-5, Harian Kompas menyebutkan hal itu bisa terjadi karena lemahnya penjagaan oleh aparat negara. Untuk menguatkan informasi tersebut, Harian Kompas memuat tanggapan dari seorang ahli hukum yaitu pengajar di Fakultas Hukum UI, Topo Santoso.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 10)</b> Kuasa hukum empat korban tewas,</li> </ul>	<p>penyerbuan Lapas Cebongan akan mempertaruhkan wibawa hukum di Indonesia, sehingga sub judul yang dipilih pun seolah memerintahkan untuk mengungkap pelaku, tanpa pandang bulu siapa pelaku tersebut untuk mempertahankan wibawa hukum agar tetap dihormati oleh seluruh pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dalam wacana ini penyosokan terhadap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan tergambar dari tanggapan beberapa narasumber seperti pada paragraf 2. Sementara untuk 4 tahanan yang menjadi korban hanyalah sebatas kasus yang membelit mereka hingga akhirnya mereka tewas dalam penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ Selebihnya berita ini lebih mengarah pada bidang hukum. Berita ini lebih didominasi pada keadaan hukum di Indonesia saat peristiwa terjadi sampai pasca peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ Pendapat pengajar Fakultas</li> </ul>	<p>penyerbuan Lapas Cebongan adalah suatu masalah yang sangat berbahaya dan perlu dihadapi dengan serius.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“mengelak”</b> Kata ini memiliki arti menghindar; melepaskan diri dari tanggung jawab. Kata ini digunakan pada paragraf 5 yang mengacu pada tulisan wartawan yang menyatakan tidak dapat menolerir langkah aparat negara yang melepaskan tanggung jawabnya karena merasa sudah menjalankan tindakan sesuai prosedur. Padahal peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan membuktikan hal sebaliknya.</li> <li>➤ <b>“prihatin”</b> Kata ini digunakan dalam paragraf 16 untuk menunjukkan kesedihan yang dirasakan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Yogyakarta terhadap kekerasan dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam insiden penyerbuan Lapas Cebongan.</li> </ul>
--	---	---	---

<p>dari Polda DIY ke Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Ajun Komisariss Besar Anny Pudjiastuti</b> Kepala Bidang Humas Polda DI Yogyakarta, yang memberikan informasi terkait 31 selongsong peluru yang tertinggal di TKP.</li> <li>➤ <b>Sultan Hamengku Buwono X</b> Sebagai Gubernur DI Yogyakarta, sebelum peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan merencanakan dialog perdamaian antara kepolisian, TNI, dan perwakilan masyarakat NTT.</li> </ul> <p><b>Pelantun Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Wartawan</b> Pihak yang berperan penting dalam menyusun informasi dan menyajikannya menjadi sebuah berita terkait tentang kelanjutan peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, khususnya tentang pengungkapan motif dan pelaku penyerbuan.</li> <li>➤ <b>Denny Indrayana</b> Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang</li> </ul>	<p>..., mencium ada indikasi pembiaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 11)</b> Apalagi, keempat korban, ..., menjadi tanggung jawab penuh Polda DI Yogyakarta yang ditiptkan di LP Cebongan. <b>FUNGSI:</b> Informasi dari dua paragraf di atas menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan dan pengamanan terhadap tahanan yang ada sehingga menimbulkan anggapan dari kuasa hukum korban bahwa ada indikasi pembiaran. Karena pada faktanya keempat korban adalah tanggung jawab penuh Polda DIY.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 12)</b> Namun, Kapolda DI Yogyakarta ... mengatakan, pemindahan keempat tahanan ke LP Cebongan itu karena ruang tahanan di Markas Polda DI Yogyakarta rusak. <b>FUNGSI:</b> Informasi ini sebagai konfirmasi dari pihak Polda DIY atas kepindahan keempat tahanan Polda DIY ke Lapas Cebongan. Namun sayangnya informasi tersebut tidak menjawab dugaan</li> </ul>	<p>Hukum UI, Topo Santoso, dimasukkan dalam paragraf 5 dan 6 untuk menunjukkan suatu kondisi lemahnya penjagaan aparat negara terhadap tahanan. Serta, menganalisa sebab dari terjadinya peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan dari teori “<i>routine activity</i>”. Analisa dari Topo Santoso menarik untuk diketahui masyarakat tidak hanya dari laporan pihak kepolisian, TNI, pemerintah, maupun aparat negara lainnya tentang usaha pengungkapan kasus, namun juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan hukum yang ada.</p>	<p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Penyerbuan Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>Pengungkapan pelaku penyerbu Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>Pertaruhan wibawa penegakan hukum</b></li> <li>➤ <b>4 tahanan titipan Polda DIY tewas</b></li> <li>➤ <b>Pemaparan dosen Fakultas Hukum UI dari perspektif kriminologi, dan bukti lemahnya panjagaan aparat negara</b></li> </ul> <p><b>Catchprasses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Wibawa penegakan hukum di negeri ini pun dipertaruhkan”</b> Kalimat ini terdapat pada <i>lead</i> berita yang menunjukkan dengan adanya peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, membuat harga diri; kehormatan dari penegakan hukum di Indonesia dipertaruhkan;dipermainkan.</li> <li>➤ <b>“Mereka, kan, tidak pernah dilatih untuk berperang, menghadapi kelompok bersenjata”</b> Kalimat yang dilontarkan Wibowo Joko, Direktur Keamanan dan Ketertiban</li> </ul>
--	---	---	---

<p>dalam wacana ini menyampaikan maksud dan tujuan dari kementeriannya untuk mendukung sepenuhnya dalam pengungkapan pelaku kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Topo Santoso</b> Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang menanggapi peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan ini dari perspektif kriminologi, berdasarkan teori “<i>routine activity</i>”.</li> <li>➤ <b>Tjatur Sapto Edy</b> Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR, menanggapi peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan karena tidak mulusnya komunikasi antaraparat penegak hukum.</li> <li>➤ <b>Wibowo Joko</b> Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Permasalahan, dalam wacana ini menyampaikan kondisi Lapas Cebongan pasca penyerangan sudah mulai membaik normal.</li> <li>➤ <b>Rio Bama Baskara</b> Kuasa hukum empat tahanan titipan Polda DIY yang tewas</li> </ul>	<p>indikasi pembiaran yang dirasakan oleh kuasa hukum keempat tahanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 13)</b> Menurut informasi Kepala Bidang Humas Poda DI Yogyakarta ..., di ruang tahanan tempat penembakan ditemukan 31 selongsong peluru kaliber 7,62 milimeter. Akan tetapi, pihaknya belum bersedia menyebutkan jenis senjata ...</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 14)</b> Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Kolonel (Inf) Widodo Raharjo mengatakan, hingga Minggu belum ada perkembangan soal kasus penembakan itu.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 15)</b> Saat ini, menurut Tjatur, kasus penyerangan itu dalam penyelidikan tim koneksitas TNI-Polri.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 15 kalimat 3)</b> “..., dalam jangka waktu sebulan dari sekarang, kasus ini sudah terungkap dengan jelas,” ujarnya. <b>FUNGSI:</b> Informasi dari ketiga paragraf di atas menunjukkan adanya proses penyelidikan dari TNI-Polri</li> </ul>		<p>Direktorat Jenderal Permasalahan, pada paragraf 9 ini seolah ingin menunjukkan bahwa para petugas Sipir Lapas berhadapan dengan kelompok bersenjata yang sudah terlatih untuk berperang, tidak seperti Sipir Lapas yang dilatih sebatas pada penjagaan rumah tahanan.</p> <p><b>Depiction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“komunikasi antar aparat tidak mulus”</b> Kalimat pada paragraf 7 tersebut digunakan untuk menjelaskan pernyataan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy yang mengungkapkan bahwa adanya komunikasi yang tidak baik antaraparat penegak hukum.</li> </ul> <p><b>Exemplaars</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> Pemaparan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso, terkait lemahnya penjagaan oleh aparat negara terhadap tahanan, menambah perspektif baru dalam kasus ini. Tidak sebatas hanya pada segerombol penyerang menembak mati 4 tahanan, tapi</li> </ul>
---	--	--	---

<p>ditembak dalam peristiwa penyerangan Lapas Cebongan. Pihaknya merasa ada indikasi pembiaran atas peristiwa tersebut.</p> <p>➤ <b>Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro (Inf) Widodo Rahadjo</b> Pihak TNI masih menyelidiki kasus tersebut dan mengungkapkan bahwa masih belum ada perkembangan ke arah pelaku. Namun tetap meyakinkan bahwa tidak ada keterlibatan anggota TNI dalam penyerbuan Lapas Cebongan.</p>	<p>terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan. Kerja sama ini dilakukan untuk dapat segera mengetahui motif dan pelaku penyerbuan. Pernyataan dari Tjatur menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan oleh Polri-TNI agar dalam jangka waktu yang ditentukan, kasusnya sudah terungkap dengan jelas.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 16)</b> Prihatin terhadap kekerasan dan pelanggaran hukum itu, ... Aliansi Masyarakat Yogyakarta menggelar doa dan aksi damai di perempatan Tugu, Minggu malam. Pada waktu yang sama, aksi serupa digelar di Bundaran Hotel Indonesia.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Melalui informasi ini, Harian Kompas ingin menunjukkan ada berbagai elemen masyarakat baik di Yogyakarta maupun di ibukota, Jakarta, yang prihatin dan menganggap peristiwa itu merupakan sebuah kekerasan yang melanggar hukum.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 17)</b> Sebelum peristiwa penembakan,</p>		<p>terkait pada peluang yang didapat pelaku dalam melakukan aksinya dari lemahnya penjagaan aparat negara.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 6)</b> Dosen Fakultas Hukum UI ini juga menambahkan perspektif baru, yaitu dari perspektif kriminologi. Menurutnya kasus penyerbuan Lapas Cebongan terjadi karena berdasarkan pada <i>routine activity teory</i> yang memuat tiga hal yaitu motif tertentu, sasaran yang dianggap lemah, dan kurangnya perlindungan atau penjagaan.</p> <p><b>Visual Images</b></p> <p>➤ <b>Pertama</b>, berita ini dilengkapi dengan <b>foto</b> yang menggambarkan situasi di Bundaran HI Jakarta yang dipenuhi warga yang tergabung dalam Solidaritas Kemanusiaan untuk Korban Pembantaian di Yogyakarta pada hari pertama kasus penyerbuan Lapas Cebongan mencuat ke publik, Minggu 24 Maret 2013.</p> <p>➤ <b>Kedua</b>, berita ini juga dilengkapi dengan sebuah graik yang berisi komentar dari</p>
---	--	--	--

	<p>Gubernur DI Yogyakarta ... sebenarnya merencanakan pertemuan antara perwakilan masyarakat NTT, kepolisian, dan TNI untuk melakukan dialog perdamaian ...</p> <p><b>FUNGSI:</b> Harian Kompas menutup berita ini dengan informasi yang menunjukkan adanya keinginan pemimpin pemerintahan DIY untuk melakukan pertemuan yang sayangnya tidak sempat terlaksana karena adanya aksi penyerbuan Lapas Cebongan ini.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Denny Indrayana</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 2)</b>  “Kementerian Hukum akan <i>full power</i> dan <i>full support</i> agar pelakunya segera terungkap dan dihukum setimpal atas perbuatan keji mereka. Jangan lupa, ... sipir-sipir kami juga jadi korban. Jadi, kami pun punya tanggung jawab mengungkap pelakunya. Siapa pun mereka,” ujar Denny, Minggu (24/3).</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan Wakil</p>		<p>sejumlah pejabat terkait insiden penyerbuan Lapas Cebongan. Komentar yang dimasukkan sebagian besar memandang negatif insiden tersebut sebagai peristiwa yang keji. Kemudian pada bagian bawah dari komentar dituliskan pula masih dalam satu rangkaian grafik dengan komentar-komentar tersebut, kasus-kasus yang terkait dengan Anggota TNI AD di Yogyakarta sebelum terjadi peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan. Hal ini seolah ingin memperlihatkan adanya keterkaitan kasus tersebut dengan insiden yang terjadi di Lapas Cebongan.</p>
--	--	--	---

	<p>Menteri Hukum dan HAM di atas menunjukkan bahwa menurutnya aksi penyerbuan Lapas Cebongan merupakan tindakan yang keji. Pernyataan itu juga menuntut untuk memberikan hukuman yang setimpal tanpa pandang bulu ketika pelakunya terungkap.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>(pada paragraf 4)</b> “Masalah ini akan saya diskusikan, khususnya dengan Polri,” katanya.</li></ul> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan Denny tersebut menunjukkan keseriusannya untuk mengungkap siapa pelaku dan motif penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Topo Santoso</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>(pada paragraf 6 kalimat 2)</b> “Dalam perspektif teori tadi, kalau tiga hal tersebut ketemu, maka terjadi kejahatan,” kata Topo.</li><li>➤ <b>(pada paragraf 6 kalimat 3)</b> “Dalam konteks penyerbuan di LP Cebongan, ketiganya terpenuhi,” katanya.</li></ul> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan Topo di atas, menjelaskan bahwa berdasarkan teori <i>routine</i></p>		
--	---	--	--

*activity*, peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan terjadi karena memenuhi tiga hal yang ada dalam teori tersebut.

**Pelantun Wacana: Tjatur Sapto Edy**

- **(pada paragraf 7)** “Jika komunikasi antaraparat penegak hukum baik, semestinya segala tindakan anarkistis seperti penyerangan ini dapat dicegah atau diminimalisasi dampak atau korbannya,” ujar Tjatur di Temanggung.

**FUNGSI:** Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut menunjukkan bahwa menurutnya peristiwa Lapas Cebongan dengan 4 tahanan menjadi korban penembakan merupakan kesalahan dari ketidakmulusannya komunikasi antaraparat.

**Pelantun Wacana: Wibowo Joko**

- **(pada paragraf 9)** “Nyali mereka memang sempet drop. ... Mereka, kan, tidak pernah dilatih untuk berperang, menghadapi kelompok



	<p>bersenjata,” ujar Wibowo. <b>FUNGSI:</b> Dalam wacana ini, Wibowo menjelaskan keadaan pegawai Lapas Cebongan yang sempat drop pasca kejadian penyerbuan Lapas Cebongan. Namun, pernyataan Wibowo pada kalimat terakhir seolah ingin menunjukkan bahwa lawan dari para petugas sipir saat kejadian yaitu gerombolan bersenjata adalah kelompok senjata yang biasanya terlatih untuk berperang, berbeda dengan petugas sipir yang hanya bertugas dalam penjagaan lapas tanpa pelatihan khusus perang.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Rio Rama Baskara</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 10)</b> “Setelah penyerangan, polisi tidak menutup jalur-jalur keluar Yogyakarta. Padahal, begitu diketahui ..., seharusnya seluruh pintu keluar Yogyakarta dijaga ketat,” katanya.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan kuasa hukum empat tersangka ini menunjukkan kecurigaannya</p>		
--	--	--	--

	<p>terhadap aksi penyerbuan Lapas Cebongan yang menurutnya ada indikasi pembiaran.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Kolonel (Inf) Widodo Raharjo</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 14)</b> “Masih dalam penyelidikan. ... tidak ada anggota TNI terlibat. Penembak bukan anggota Kopassus,” ujar Widodo.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro ini menegaskan bahwa kasus masih dalam penyelidikan dan kembali meyakinkan publik bahwa tidak ada anggota Kopassus yang terlibat dalam penyerbuan Lapas Cebongan.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan merupakan masalah yang ‘gawat’ yang telah mencoreng wibawa penegakan hukum dan memerlukan penanganan yang amat serius. Keterlibatan narasumber dalam berita ini diseleksi untuk membentuk arah wacana yang ditekankan pada wibawa penegakan hukum yang tidak dihargai dari adanya kasus tersebut.</p>		<p style="text-align: center;"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Lemahnya penjagaan aparat negara keamanan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya aksi penyerbuan Lapas Cebongan. Harian Kompas menonjolkan beberapa pendapat serta informasi lainnya terkait pengungkapan pelaku, karena dengan pengungkapan pelaku dan tindakan hukum yang tegas dapat mengembalikan nama baik serta kepercayaan masyarakat pada wibawa penegakan hukum yang telah tercoreng oleh kasus tersebut.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEDIA FRAME</b></p> <p>Harian Kompas menempatkan pelaku penyerbu Lapas Cebongan sebagai pihak yang tidak menghargai penegakan hukum, sehingga kasus yang ‘gawat’ tersebut perlu ditangani oleh aparat keamanan negara dengan serius untuk mengembalikan wibawa penegakan hukum.</p>			

**Analisis Teks Berita 3 (Harian Kompas)**

**Judul : 11 Anggota Kopassus Tersangka (Keterbukaan TNI AD dalam Kasus Penyerbuan LP Cebongan Diapresiasi)**

**Edisi : Jumat, 5 April 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b> Tim Investigasi TNI AD menyampaikan hasil pengungkapan kasus penyerbuan Lapas Cebongan pada masyarakat, yaitu pelaku dan motif penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Berita ini menginformasikan titik terang kelanjutan dari penyelidikan kasus penyerbuan Lapas Cebongan. Jika pada berita edisi sebelumnya kasus ini masih dalam penyelidikan oleh Polri-TNI untuk mengungkap pelaku dan motif penyerbuan, maka edisi kali ini Harian Kompas telah memaparkan informasi dari hasil jumpa pers Tim Investigasi TNI AD yang terbuka pada masyarakat untuk menyampaikan hasil temuannya yaitu mengungkap pelaku pelaku penyerbuan, yaitu adalah 11 anggota Grup 2 Komando</p>	<p><b>Jenis Wacana</b> <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada lead berita)</b> Dalam 17 hari, kasus penyerbuan ..., akhirnya terungkap. Ada 11 anggota Grup 2 Komando Pasukan Khusus Kandang Menjangan tersangka kasus itu, ...</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 3)</b> dijelaskan di sini motif para pelaku adalah ‘setia kawan’ pada alm. Serka Santoso yang tewas diserang beramai-ramai.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Terungkapnya pelaku dan motif menjawab dugaan yang ditulis Harian Kompas dalam berita terkait penyerbuan Lapas Cebongan pada edisi sebelumnya, yang mana pelaku adalah okum yang memiliki motif terkait kasus yang dihadapi 4 tahanan titipan Polda DIY yang menjadi korban penyerbuan Lapas Cebongan.</p>	<p><b>Placement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita ini tertulis dalam Harian Kompas edisi Jumat, 5 April 2013. Berita ini menjadi <i>headline</i> pada halaman pertama dilengkapi dengan foto yang besar. Foto berlangsungnya konferensi pers oleh pihak TNI AD terkait hasil investigasi terhadap penyerbuan Lapas Cebongan sehingga membuat berita ini menjadi “<i>point of interest</i>” pada halaman paling depan dari Harian Kompas edisi ini.</li> <li>➤ <b>Judul:</b> 11 Anggota Kopassus Tersangka (Sub Judul: Keterbukaan TNI AD dalam Kasus Penyerbuan LP Cebongan Diapresiasi). <b>FUNGSI:</b> Pemilihan judul ini menunjukkan terungkapnya pelaku penyerbuan Lapas Cebongan sekaligus menegaskan bahwa 11 anggota</li> </ul>	<p><b>Metaphors</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“tersangka”</b> Kata ini terdapat pada <i>lead</i> berita, yang menunjukkan bahwa pelaku penyerbuan Lapas Cebongan telah terungkap, yaitu 11 anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan.</li> <li>➤ <b>“pengakuan”</b> Menunjukkan bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya, dijelaskan pada pada paragraf 2 tersangka mengakui tindakannya pada Tim Investigasi TNI AD.</li> <li>➤ <b>“setia kawan”</b> Makna dari istilah ini adalah rasa solidaritas;tenggang rasa. Istilah ini dipakai untuk menjelaskan motif pelaku menyerang Lapas Cebongan dijelaskan pada paragraf 3, yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan peduli terhadap pembunuhan yang</li> </ul>

<p>Pasukan Khusus Kandang Menjangan.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Pelaku Penyerangan Lapas Cebongan</b> 11 Anggota Grup 2 Komando Pasukan Khusus Kandang Menjangan yang mengakui tindakannya pada Tim Investigasi TNI AD.</li> <li>➤ <b>Brigjen Rukman Ahmad</b> Kepala Dinas Penerangan TNI AD, dalam wacana ini ikut dalam konferensi pers untuk mengungkap hasil temuan Tim Investigasi TNI AD pada masyarakat.</li> <li>➤ <b>Letkol (Inf) Richard Tampubolon</b> Asisten Intelijen Komandan Jenderal Kopassus Letkol (Inf) Richard Tampubolon adalah salah satu anggota Tim Investigasi TNI AD yang ikut dalam konferensi pers yang diinformasikan dalam wacana ini.</li> <li>➤ <b>Serka Haru Santoso</b> Korban pengeroyokan di Hugos Café oleh 4 tahanan titipan Polda DIY, yang mana kasus pembunuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 8 kalimat 2)</b> Hendardi dari Setara Institute mengatakan, temuan investigasi itu patut diapresiasi walau mengejutkan.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 9)</b> Apresiasi juga disampaikan pengamat militer Andi Widjajanto yang melihat keterbukaan itu sebagai budaya militer baru ...</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 10 kalimat 3)</b> ... Al Araf dari Imparsial ... kasus itu bisa jadi momentum untuk reformasi peradilan militer. <b>FUNGSI:</b> Adapun yang menarik di sini, Harian Kompas mengangkat informasi dari pihak-pihak yang memberikan apresiasi ini yang merupakan orang-orang dari sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pengawasan, penyelidikan, maupun studi yang berkaitan dengan sebuah masalah pelanggaran HAM, serta pihak yang mengerti betul akan dunia militer yaitu pengamat militer.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 12-13)</b> menjelaskan tentang penemuan barang bukti dan</li> </ul>	<p>Kopassus yang menjadi tersangka. Sementara sub judul menunjukkan adanya sebab-akibat, karena adanya keterbukaan maka efeknya yaitu muncul pihak-pihak yang mengapresiasi keterbukaan yang dilakukan TNI AD dalam mengungkapkan kasus tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita ini seolah menjawab dugaan bahwa pelaku memang kelompok bersenjata yang terlatih sehingga dalam melakukan aksinya dalam waktu yang singkat. Selain itu, kaitan kasus yang selama ini dihadapi oleh 4 tahanan yang menjadi korban penembakan juga menjadi motif dari pelaku melakukan aksi penyerbuan terhadap Lapas Cebongan.</li> <li>➤ Penyosokan terhadap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan, yaitu 11 oknum anggota Kopassus, dan empat tahanan titipan Polda DIY yang menjadi korban penembakan, dalam berita ini tidak begitu menonjol. Karena berita ini lebih dominan membahas hal</li> </ul>	<p>dialami rekannya Alm. Serka Santoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“marah”</b> Suatu emosi yang timbul akibat merasa tidak senang menerima perlakuan yang dianggap tidak pantas. Kata ini menggambarkan kondisi pelaku yang melatarbelakangi aksi penyerbuan Lapas Cebongan (pada paragraf 3).</li> <li>➤ <b>“apresiasi”</b> Pada paragraf 8, istilah ini digunakan untuk mengacu pada beberapa pihak yang memberikan penghargaan atas keterbukaan TNI AD mengungkap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan ke publik.</li> <li>➤ <b>“langka”</b> Kata ini dipakai dalam paragraf 8 untuk menunjukkan bahwa pengakuan pelaku terhadap Tim Investigasi TNI AD merupakan suatu peristiwa yang jarang sekali terjadi.</li> <li>➤ <b>“insentif politik”</b> Istilah insentif biasanya mengacu pada penghargaan dalam bentuk material maupun non material yang didapat untuk memotivasi kerja dan</li> </ul>
--	---	---	--

<p>terhadapnya menjadi motif pelaku penyerbuan Lapas Cebongan melakukan aksinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie</b> Dalam wacana ini diinformasikan sebagai pihak yang memiliki kebijakan untuk terbuka pada masyarakat mengenai perihal pengungkapan hasil temuan Tim Investigasi TNI AD tentang pelaku dan motif penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Hendardie dari Setara Institute</b> Setara Institute adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, pluralisme, dan demokrasi. Sebagai Ketua Pengurus Setara Institute, Hendardi dalam wacana ini ikut mengapresiasi hasil temuan Tim Investigasi TNI AD yang menurutnya mengejutkan.</li> <li>➤ <b>Andi Widjanto</b> Pengamat militer yang juga mengapresiasi keterbukaan TNI AD dalam mengungkapkan hasil temuan</li> </ul>	<p>pihak kepolisian (menurut Sutarman) masih mendalami temuannya di Pusat Laboratorium Forensik Polri.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Informasi ini menunjukkan sampai terungkapnya kasus penyerbuan Lapas Cebongan oleh Tim Investigasi TNI AD, namun pihak kepolisian masih terus mendalami temuan barang bukti beberapa butir selongsong peluru yang ditemukan di TKP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 14)</b> Menurut Siti Noor Laila, ... jelas ada indikasi pelanggaran HAM, yaitu hak atas hidup, hak atas rasa aman, dan hak terbebas dari penganiayaan dan perampasan.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Melalui paragraf ini Harian Kompas ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa apa yang terjadi pada kasus penyerbuan Lapas Cebongan terdapat indikasi pelanggaran HAM seperti yang dijelaskan oleh Ketua Komnas HAM pada paragraf di atas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 15)</b> Keterlibatan anggota ...</li> </ul>	<p>lain, seperti motif pelaku, apresiasi beberapa pihak terhadap keterbukaan TNI AD, serta pemaparan dari sosiolog kriminal mengenai bagaimana seharusnya aparat keamanan bertindak dalam kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemaparan analisa oleh Sosisolog Kriminal dari UGM, Yogyakarta, Soeprapto, terkait pelaku yang merupakan aparat keamanan, yaitu anggota Kopassus, memberikan fakta baru pada masyarakat dari pandangan perspektif yang berbeda. Selain itu, analisa Soeprapto terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan ini memberikan sebuah saran yang dapat dijadikan sebuah tanggung jawab oleh aparat keamanan untuk bertindak tegas, terbuka, dan kuat untuk memberikan hukuman yang berat pada anggota kesatuannya yang melanggar hukum.</li> </ul>	<p>mendapat prestasi yang lebih tinggi dalam satu bidang tertentu. Dalam paragraf 8, istilah ini digunakan untuk menjelaskan pendapat Hendardi (dari Setara Institute) terhadap KSAD yang dianggap telah ‘memetik’ penghargaan politik dari harapan publik terhadap kebijakannya yang mengungkap pelaku penyerbu Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“ekspektasi publik”</b> Dalam paragraf 8, istilah ini mengacu pada harapan publik yang tertinggi dalam pengungkapan kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>“pasukan siluman”</b> Dalam paragraf 9, istilah ini mengarah pada 11 oknum anggota Kopassus sebagai pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang disebut sebagai pasukan siluman. Pasukan yang digambarkan seperti siluman; makhluk halus yang menampakkan diri sebagai manusia atau binatang, tersembunyi; tidak terlihat.</li> <li>➤ <b>“impunitas”</b> Dalam paragraf 9, istilah ini</li> </ul>
---	--	---	---

<p>tim investigasinya dari kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>AL Araf dari Imparsial</b> Al Araf perwakilan dari Imparsial, sebuah LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan terhadap sebuah pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam wacana ini Al Araf menilai tindakan TNI membawa pelaku ke pengadilan militer dapat dijadikan sebuah momentum untuk reformasi peradilan militer.</p> <p>➤ <b>Polri</b> Dalam wacana ini, sampai terungkapnya pelaku penyerbuan Lapas Cebongan oleh Tim Investigasi TNI AD, pihak Kepolisian Republik Indonesia masih terus mendalami kasus tersebut, khususnya temuan barang bukti dari TKP yaitu 30 butir selongsong peluru, masih diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri, guna mengetahui jenis senjata yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya.</p> <p>➤ <b>Komnas HAM</b> Komisi Nasional Hak Asasi</p>	<p>sebuah ironi. Sebab, aparat keamanan yang seharusnya memberikan perlindungan ... justru melakukan pelanggaran dan main hakim sendiri.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 17)</b> ... aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, harus menghilangkan sikap <i>right or wrong is my corps</i> (benar atau salah korpsku). Karena itu, setiap kali ... terlibat pelanggaran, ... harus tetap terbuka dan bertindak tegas.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 18)</b> ... dibutuhkan sistem pengadilan yang kuat dan jelas. Anggota kesatuan yang terbukti melanggar ... harus dihukum berat.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Hal yang menarik dari paragraf 15 hingga 18 dalam berita ini ialah Harian Kompas berupaya membuka mata masyarakat untuk melihat ironi yang terjadi, di mana aparat keamanan tidak selalu menjadi pelindung justru meresahkan karena aksi main hakim sendiri untuk membela korpsnya. Hal ini disampaikan pada masyarakat dengan menyajikan pemaparan</p>		<p>memiliki arti yang sebenarnya yaitu suatu kebijakan membiarkan/melindungi pelaku kejahatan dari tanggung jawab dan sanksi kejahatan yang telah dilakukannya. Istilah ini dalam paragraf 9 untuk menunjukkan TNI yang telah mengungkap pelaku penyerbuan lapas Cebongan membuktikan tidak lagi berupaya memperoleh impunitas untuk anggotanya.</p> <p>➤ <b>“transparan dan akuntebel”</b> Kalimat yang bermakna terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalimat ini dalam paragraf 10 untuk menyatakan bahwa selama ini peradilan militer tidak bersifat seperti itu.</p> <p>➤ <b>“reformasi peradilan militer”</b> Dalam paragraf 10, kalimat ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa peradilan hukum militer terhadap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang terbuka pada publik dapat menjadi sebuah perubahan secara drastis dalam peradilan militer ke arah yang lebih baik.</p> <p>➤ <b>“ironi”</b></p>
---	---	--	---

<p>Manusia merupakan lembaga negara yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia pemerintahan. Dalam wacana ini dijelaskan bahwa Komnas HAM berkoordinasi dengan Polri untuk menyelidiki kasus penyerbuan Lapas Cebongan dan berencana menemui Panglima TNI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Siti Noor Laila</b> Selaku Ketua Komnas HAM, dalam wacana ini dijelaskan bahwa ada indikasi pelanggaran HAM dalam kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Komisi III DPR</b> Sebagai badan legislatif pemerintahan RI, Komisi III DPR membidangi sektor hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan. Dalam wacana ini Komisi III DPR RI mengunjungi LP Cebongan dan Hugos Café guna mendapat keterangan seputar peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan.</li> </ul>	<p>dari Sosiolog Kriminal dari UGM, Yogyakarta, yang menganalisa kasus ini dan memberi masukan (pada paragraf 18) dari analisisnya untuk adanya sistem pengadilan yang kuat, jelas, dan hukuman berat bagi anggota kesatuan yang melakukan pelanggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 20)</b> ... indikasi kuat ketidaksiapan Polda DI Yogyakarta sebelum penyerangan. ... tidak disiapkan personel pengamanan ... LP Cebongan ... kurang aman dan tidak siap menghadapi serangan.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Ketidaksiapan Polda DIY dalam melakukan tugas pengamanan terhadap tahanan yang dititipkannya di Lapas Cebongan dituliskan Harian Kompas berdasar hasil kunjungan Komisi III DPR ke Lapas Cebongan.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Brigadir Jenderal Unggul Yudhoyono</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 2)</b> “Para pelaku langsung mengakui tindakan mereka pada hari pertama tim investigasi</li> </ul>		<p>Istilah ini menggambarkan adanya kejadian atau sesuatu yang bertentangan dengan yang diharapkan atau dengan yang seharusnya terjadi. Pada paragraf 15, istilah ini digunakan untuk menjelaskan keterlibatan anggota Grup 2 Kopassus sebagai pelaku penyerbuan Lapas Cebongan; aparat keamanan negara melakukan pelanggaran hukum, sesuatu yang seharusnya tidak demikian terjadi.</p> <p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Penyerbuan Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>11 Anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Tersangka</b></li> <li>➤ <b>Pembunuhan Serka Heru Santoso</b></li> <li>➤ <b>4 Tahanan titipan Polda DIY, tersangka pembunuhan Serka Santoso</b></li> <li>➤ <b>Tim Investigasi TNI AD</b></li> <li>➤ <b>Polri</b></li> <li>➤ <b>Pusat Laboratorium Forensik Polri</b></li> <li>➤ <b>Sosiolog kriminal UGM</b></li> <li>➤ <b>Aparat kemanan negara</b></li> </ul>
---	---	--	--

<p><b>Pelantun Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Wartawan</b> Memiliki peranan yang besar dalam membuat dan menyajikan informasi terkait keterbukaan TNI AD kepada masyarakat atas pengungkapan kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Brigadir Jenderal Unggul Yudhoyono</b> Ketua Tim Investigasi TNI AD yang menjelaskan hasil temuan dalam pengungkapan kasus penyerbuan Lapas Cebongan. Dalam wacana ini, tidak hanya mengungkapkan identitas pelaku namun juga motif pelaku melakukan aksinya.</li> <li>➤ <b>Komisaris Jenderal Sutarman</b> Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dalam wacana ini menjelaskan mengenai barang bukti yang ditemukan di ruang tahanan tempat penembakan 4 tahanan, yaitu terdapat dua jenis peluru yang masih diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri.</li> <li>➤ <b>Sosiolog Kriminal, Soeprapto</b></li> </ul>	<p>bertemu mereka,” kata Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigadir Jenderal Unggul Yudhoyono ...</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaku penyerbuan telah mengakui perbuatannya. Selain itu pernyataan tersebut juga ingin menyebutkan bahwa pelaku tanpa harus melalui proses penyelidikan yang panjang, langsung mengaku pada hari pertama tim investigasi menemui mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 7)</b> “Karena mereka pasukan khusus, geraknya cepat, kesannya banyak,” kata Unggul.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Pada awal munculnya pemberitaan seputar peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, beredar informasi gerombolan pelaku berjumlah di atas 11 orang, ada yang menyebut 15, kemudian 17. Namun saat konferensi pers, Unggul menyebut pelaku berjumlah 11 anggota Kopassus. Pernyataannya di atas ingin meyakinkan bahwa pelaku benar hanya 11 orang, dengan beralih pelaku</p>		<p><b>pelanggar hukum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Pelanggaran HAM</b></li> </ul> <p><i>Catchprasses</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Karena mereka pasukan khusus, geraknya cepat, kesannya banyak”</b> Pernyataan ini dilontarkan oleh Brigadir Jenderal Unggul Yudhoyono, Ketua Tim Investigasi TNI AD, pada paragraf 7. Pernyataan ini ingin menjelaskan alasan tersangka hanya berjumlah 11 orang, padahal pada informasi di berita-berita sebelumnya pelaku berjumlah sekitar 17-20 orang.</li> </ul> <p><i>Depiction</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Dia menilai KSAD telah memetik insentif politik dari ekspektasi publik”</b> Pada paragraf 8, Hendardi, Ketua Setara Institute, menilai KSAD ‘memetik’ keuntungan politik berupa penghargaan dari harapan publik yang tinggi dalam keterbukaan pengungkapan pelaku penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>“budaya militer baru yang tidak lagi menolerir pasukan siluman”</b></li> </ul>
---	---	--	---



<p>Sosiolog kriminal dari Universita Gajah Mada, Yogyakarta, memberikan analisisnya terhadap keterlibatan aparat kewan, dalam hal ini 11 oknum anggota Kopassus yang menjadi tersangka penyerbu Lapas Cebongan.</p>	<p>merupakan pasukan khusus dengan gerakan yang cepat, sehingga terkesan jumlah mereka banyak.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Komisaris Jenderal Sutarman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 11)</b> “Ada dua jenis peluru. . . ., masih diperiksa,” katanya.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di atas menunjukkan bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti di TKP yang masih terus diselidiki meskipun tim investigasi TNI AD telah mengungkap pelaku dan motif penyerbu Lapas Cebongan kepada masyarakat melalui konferensi pers.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Soeprapto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 16)</b> “Tahanan di LP saja bisa terancam, lalu bagaimana jika peristiwa serupa dialami masyarakat di luar LP yang tidak ada pengamanan. Masyarakat akhirnya trauma . . .,” ujar sosiolog kriminal dari UGM . . .</li> </ul>		<p>Kalimat ini terdapat dalam paragraf 9 yang menggambarkan tentang budaya; kebiasaan; aturan dalam sistem militer yang baru tidak lagi memberikan perlindungan (menolerir) adanya pasukan siluman yang bertindak semena-mena; main hakim sendiri; mengacu pada pelaku penyerbu Lapas Cebongan.</p> <p><b>Exemplaars</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemaparan dari Sosiolog Kriminal UGM Yogyakarta, Soepomo, terkait ironi atas terlibatnya aparat keamanan negara dalam aksi pelanggaran hukum yang berat dan kejam. Dari paragraf 15-18.</li> </ul> <p><b>Visual Images</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita ini menggunakan satu buah <b>foto</b> untuk melengkapi <i>visual image</i> nya. Foto tersebut menggambarkan kondisi konferensi pers yang dilakukan pihak Tim Investigasi TNI AD untuk mengumumkan hasil temuannya, yaitu pelaku dan</li> </ul>
---	--	--	---

	<p>➤ <b>(pada paragraf 18)</b> "... tugas utama mereka adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bukan mengancam," ujarnya.  <b>FUNGSI:</b> Tanggapan ini dikeluarkan oleh Soeprpto untuk menanggapi keterlibatan aparat keamanan, dalam kasus ini 11 anggota Kopassus sebagai tersangka, dengan sistem keamanan yang lemah dan dapat mengancam keselamatan masyarakat.</p>		<p>motif penyerbuan Lapas Cebongan pada publik.</p>
<p style="text-align: center;"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Keterlibatan banyak pihak dalam berita ini menunjukkan fakta beragam yang ditekankan oleh Harian Kompas namun memiliki keterkaitan yang erat. Brigjen TNI Unggul berperan dalam sorotan Harian Kompas pada keterbukaan TNI AD dalam pengungkapan kasus Cebongan yang membuahkan apresiasi dari beberapa pihak. Kelanjutan penanganan kasus dari kepolisian yang juga berkoordinasi dengan Komnas HAM menunjukkan isu baru yaitu adanya indikasi pelanggaran HAM. Kemudian pemaparan dari Sosiolog Kriminal UGM menjadi salah satu hal yang disorot untuk mengarahkan wacana tersebut pada perspektif yang lebih kompleks dalam melihat keterbukaan TNI AD pada hasil temuannya.</p>		<p style="text-align: center;"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Dari beragamnya muatan informasi yang disajikan Harian Kompas, keterbukaan TNI AD dan hasil temuannya menjadi fakta yang ditonjolkan dalam berita ini. Pemaparan dari Sosiolog Kriminal UGM terhadap hasil temuan TNI AD yang menunjukkan sebuah ironi, serta perspektif yang menanggapi keterbukaan TNI AD yang tidak hanya patut diberikan apresiasi tapi juga sebuah 'tuntutan' pada institusi bersangkutan agar lebih terbuka dan bertindak tegas dalam menghadapi fakta bahwa anggota kesatuannya melakukan pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEDIA FRAME</b></p> <p>Harian Kompas melihat dan mengemas informasi keterbukaan TNI AD terkait hasil temuan dari investigasi terhadap kasus insiden Cebongan sebagai fakta yang perlu dihadapi bukan dengan sekedar pemberian apresiasi terhadap hasil temuan yang didapat dengan waktu yang terbilang singkat (dalam 17 hari pasca insiden Cebongan), namun lebih jauh dari itu ialah sebuah 'ironi' dari fungsi aparat keamanan negara yang justru mengancam keamanan masyarakat serta perlu tindakan tegas dari institusi bersangkutan berdasarkan kaca mata Sosiolog Kriminal UGM.</p>			

**Analisis Teks Berita 4 (Harian Kompas)**

**Judul : Tegakkan Hukum Seadil-adilnya (Aksi Main Hakim Sendiri Tidak Dapat Dibenarkan)**

**Edisi : Sabtu, 6 April 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b> Tanggapan Kepala Negara RI, Presiden SBY terhadap laporan bahwa tersangka penyerbuan Lapas Cebongan adalah 11 anggota Kopassus. Berdasarkan laporan tersebut Presiden SBY meminta agar hukum ditegakkan dengan adil.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Berita ini dimuat sehari setelah berita pada edisi sebelumnya yang membahas mengenai hasil jumpa pers pihak TNI AD yang mengumumkan pada publik tentang pelaku penyerbuan Lapas Cebongan. Berita ini menanggapi hasil temuan tersebut, di mana Presiden SBY sebagai Kepala Negara tidak membenarkan adanya tindakan aksi main hakim sendiri, dan meminta pada semua pihak agar dapat mendukung untuk menegakkan hukum dengan adil.</p>	<p><b>Jenis Wacana</b> <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada lead berita)</b> ... aksi main hakim sendiri yang dilakukan sejumlah anggota Komando Pasukan Khusus tidak dapat dibenarkan. ... Hukum pun harus ditegakkan seadil-adilnya.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Harian Kompas melalui lead ini ingin menyampaikan pada publik bahwa aksi anggota Kopassus adalah aksi main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan di negara hukum. Namun hal itu disampaikan melalui tanggapan Presiden SBY.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> Presiden berharap semua pihak bisa mendukung proses penegakan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya ...</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 6)</b> Yudhoyono juga menyampaikan dukungannya</li> </ul>	<p><b>Placement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita ini tertulis dalam Harian Kompas edisi Sabtu, 6 April 2013. Berita ini menjadi <i>headline</i> di halaman pertama, dengan judul yang cukup besar dibanding judul berita lainnya pada halaman yang sama. Tidak seperti berita lain yang dijadikan <i>headline</i> pada umumnya diletakkan di bagian atas halaman dan menjadi <i>"point of interest"</i>, tapi berita ini hanya diletakkan di bagian tengah halaman tanpa ada foto ada gambar grafis yang mendukung berita ini pada halaman pertama. Namun, pada halaman 15 sambungan berita ini, terdapat grafik yang berisi data beberapa kasus premanisme di Yogyakarta pada tahun 2013 yang terjadi sebelum adanya aksi penyerbuan Lapas Cebongan.</li> </ul>	<p><b>Metaphors</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ “”</li> <li>➤ “” pada par 2</li> <li>➤ “”</li> <li>➤ <b>“aset negara”</b> Dalam paragraf 12, istilah ini mengacu pada Kopassus yang dinilah Gubernur DKI sebagai suatu harta; kekayaan; yang harusnya dijaga.</li> </ul> <p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>11 Anggota Kopassus tersangka</b></li> <li>➤ <b>Presiden SBY meminta hukum ditegakkan seadil-adilnya</b></li> <li>➤ <b>Premanisme</b></li> <li>➤ <b>Tim Investigasi TNI AD</b></li> <li>➤ <b>Polri</b></li> </ul> <p><b>Catchprasses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“hukum harus ditegakkan seadil-adilnya”</b> Petikan pernyataan Presiden SBY pada paragraf 4 di atas</li> </ul>

<p><b>Pelibat Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>11 Anggota Kopassus, Pelaku Penyerbuan Lapas Cebongan</b> Semenjak diumumkannya hasil temuan Tim Investigasi TNI AD, 11 oknum anggota Kopassus adalah tersangka penyerbuan Lapas Cebongan. Dalam wacana ini, Presiden SBY menilai tindakan mereka mengakui perbuatannya merupakan tindakan yang bersifat ksatria, namun tetap diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan main hakim sendiri.</li> <li>➤ <b>Empat tahanan titipan Polda DIY</b> Tersangka pembunuhan Serka Santoso yang ditembak mati oleh pelaku penyerbuan Lapas Cebongan. Aksi pengeroyokan yang mereka lakukan terhadap Almarhum Serka Santoso dijadikan alasan oleh pelaku penyerbuan Lapas Cebongan melakukan aksinya.</li> <li>➤ <b>Sersan Kepala Heru Santoso</b> Dalam wacana ini dijelaskan latar belakang Serka Santoso pergi ke Hugos Café malam saat kejadian pengeroyokan</li> </ul>	<p>kepada TNI AD dan Polri untuk menegakkan hukum dan keadilan.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Melalui harapan dan dukungan Presiden SBY terhadap TNI AD, Polri, dan semua pihak, Harian Kompas menyampaikan pada masyarakat agar ikut mendukung penegakan hukum yang adil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 7 kalimat 2)</b> Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal Agus Sutomo menyatakan, dirinya sebagai orang yang paling bertanggung jawab.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 8)</b> ... hukum di militer tengah berjalan untuk memproses para tersangka itu.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 10 kalimat 2)</b> Jika ada lagi yang berani melanggar, sanksinya akan tegas.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Tiga paragraf di atas dituliskan Harian Kompas, seolah untuk menanggapi harapan dan permintaan Presiden SBY dalam penegakan hukum seadil-adilnya. Pihak Kopassus dalam tiga paragraf</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Judul:</b> Tegakkan Hukum Seadil-adilnya (Sub Judul: Aksi Main Hakim Sendiri Tidak Dapat Dibenarkan). <b>FUNGSI:</b> Pemilihan judul berita ini menunjukkan bahwa adanya tuntutan agar hukum ditegakkan atas terungkapnya pelaku penyerbuan Lapas Cebongan. Sub judul yang dipilih mendukung judul yang menjadi <i>headline</i> Harian Kompas pada edisi ini, agar hukum ditegakkan atas tindakan aksi main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.</li> <li>➤ Berita ini memperlihatkan respon dari Kepala Negara Republik Indonesia Presiden Susilo Bambang Yuudhoyono yang menuntut agar hukum ditegakkan terhadap aksi pelaku penyerbu Lapas Cebongan, meskipun Presiden SBY tahu dan dapat memahami alasan pelaku melakukan aksinya. Namun baginya, di artikel ini pada paragraf dua hingga paragraf empat disebutkan bahwa</li> </ul>	<p>merupakan permintaan tegas Kepala Negara pada para penegak hukum untuk menjalankan fungsinya dengan adil dan maksimal terkait kasus penyerbuan Lapas Cebongan yang telah mencoreng harga diri aparaturnya keamanan Negara Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Harga dirinya kena”</b> Pernyataan yang dilontarkan Danjen Kopassus pada paragraf 11 ini ingin menunjukkan bahwa pelaku penyerbuan Lapas Cebongan melakukan aksinya karena merasa harga dirinya telah diremehkan oleh para kelompok yang disebut sebagai ‘preman’ melalui kasus pengeroyokan yang menewaskan salah satu anggota Kopassus.</li> <li>➤ <b>“Tegakkan hukum dengan tegas, siapa pun pelaku kekerasan dihukum, dan berikan jaminan keamanan bagi seluruh warga”</b> Kalimat ini tertulis dalam paragraf 15. Wartawan Harian Kompas melalui data kekerasan yang dimiliki mencoba mengaitkan</li> </ul>
--	--	---	---

<p>terhadapnya adalah untuk melatih kemampuannya sebagai personel sandi yudha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Joko Widodo</b> Gubernur DKI Jakarta yang tengah mengunjungi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kopassus. Dalam kesempatan itu angkat bicara soal terlibatnya 11 oknum anggota Kopassus dalam kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Tim Investigasi TNI AD</b> Pihak TNI AD yang telah mengungkap pelaku penyerbuan Lapas Cebongan, dan dalam wacana ini dijelaskan bahwa akan melanjutkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Bambang Widodo Umar, Haris Azhar, Chairul Imam, MM Billah, dan Erwin Partogi</b> Koalisi masyarakat sipil yang peduli akan pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi di Indonesia, dalam wacana ini mereka menemui Menko Politik Hukum dan Kemanan,</li> </ul>	<p>di atas dijelaskan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pihak TNI AD pun telah melaksanakan proses hukum militer untuk menindak tersangka penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 15)</b> Jika ditelusuri, tindakan anggota Kopassus tersebut tak lepas dari peristiwa sebelumnya yang menewaskan Santoso ... .., pemerintah diminta serius untuk menutup ruang bagi tumbuhnya premanisme di masyarakat. Tegakkan hukum dengan tegas, siapa pun pelaku kekerasan dihukum, dan berikan jaminan bagi seluruh warga. <b>FUNGSI:</b> Melalui paragraf ini Harian Kompas secara tidak langsung menyampaikan pendapatnya tentang peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan yang dikaitkan dengan peristiwa kekerasan lainnya yang telah terjadi.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 16)</b> Hal itu disebabkan oleh kepemimpinan yang lemah dalam menggerakkan fungsi aparat keamanan dan</li> </ul>	<p>Presiden SBY tidak dapat menolerir tindakan main hakim sendiri oleh kesebelas tersangka yang merupakan anggota Kopassus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada paragraf 7 hingga paragraf 11 dijelaskan bahwa pihak Kopassus menghormati akan jalannya proses peradilan militer dan Komandan Kopassus ikut bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya. Pemaparan dalam 5 paragraf ini menanggapi tuntutan Presiden SBY agar semua pihak termasuk TNI AD mampu menegakkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan.</li> <li>➤ Dalam berita ini, meski dituliskan oleh Harian Kompas bahwa Presiden SBY menganggap kesebelas anggota Kopassus yang menjadi tersangka penyerbuan Lapas Cebongan memiliki jiwa ksatria, karena telah berani mengakui dan bertanggung jawab terhadap tindakannya, namun pelaku</li> </ul>	<p>kasus-kasus tersebut dengan aksi penyerbuan Lapas Cebongan. Kalimat tersebut seolah menunjukkan harapan Harian Kompas pada pemerintahan untuk bergerak dengan serius dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelanggaran hukum agar dapat menjamin keamanan warga negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Permanisme harus diberantas dengan cara tegakkan hukum bagi mereka yang melanggar hukum. Tidak bisa dibiarkan pemberantasan preman dengan cara membunuh mereka seperti dilakukan oknum Kopassus di Cebongan”</b> Pernyataan yang dilontarkan Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial (paragraf 17) menguraikan bagaimana seharusnya bertindak dalam pemberantasan premanisme. Menegakkan hukum bagi pelanggaran hukum adalah cara yang paling tepat, karena aksi penyerbuan Lapas Cebongan adalah sama saja dengan aksi</li> </ul>
---	--	---	--

<p>guna menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan TNI AD, dan meminta adanya tim pencari fakta independen.</p> <p>➤ <b>Djoko Suryanto</b> Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang dalam wacana ini dijelaskan bahwa Djoko Suryanto ditemui oleh koalisi masyarakat guna membicarakan tentang hasil temuan Tim Investigasi TNI AD dalam kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p><b>Pelantun Wacana:</b></p> <p>➤ <b>Wartawan</b> Pihak yang memiliki peranan penting dalam mengemas informasi terkait tanggapan Presiden SBY dan beberapa pihak lainnya atas hasil temuan Tim Investigasi TNI AD yang mengungkap bahwa pelaku penyerbu Lapas Cebongan adalah 11 oknum anggota Kopassus.</p> <p>➤ <b>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono</b> Kepala Negara Republik Indonesia yang dalam wacana ini menyampaikan tanggapannya terhadap fakta</p>	<p>ketertiban. Hukum penuh ketidakpastian karena kerap diperalat kelompok berkuasa dan pemodal.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Wacana dalam paragraf ini dituliskan Harian Kompas setelah adanya analisis dari pengajar psikologi sosial UI yang mengamati penyebab maraknya premanisme di Indonesia, Bagus Takwin. Pada paragraf di atas, informasi yang ditulis Harian Kompas tersebut mempertegas maksud dari analisa Bagus terhadap fungsi aparat keamanan negara.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 19)</b> Kemarin, Hendardi ... bertemu Menko Politik Hukum dan Keamanan ... Koalisi Masyarakat Sipil itu mengapresiasi pengakuan TNI dan meminta ada tim pencari fakta independen agar tidak terulang kasus Tim Mawar yang kemudian lenyap ditelan waktu.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Harian Kompas menutup berita ini dengan paragraf terakhir yang menginformasikan tentang adanya Koalisi Masyarakat Sipil yang tangga terhadap</p>	<p>penyerbu Lapas Cebongan tetaplah pelanggar hukum. Penyosokan terhadap mereka dalam Harian Kompas, khususnya dalam berita ini tidak lantas berubah menjadi sosok pahlawan yang telah memberantas preman yang ditakuti masyarakat, namun tetaplah sebagai salah satu aparat keamanan negara yang melakukan tindak kekerasan dengan main hakim sendiri tanpa memandang hukum yang ada.</p> <p>➤ Berita ini lebih menonjolkan sisi hukum dari peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ Harian Kompas memuat pemikiran dari pengajar psikologi sosial UI pada paragraf 16 dari 19 paragraf untuk menjelaskan penyebab meningkatnya premanisme di Indonesia. Analisa dari Bagus Takwin ini menarik karena menambah perspektif berbeda dari peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, yaitu tidak berjalannya fungsi keamanan</p>	<p>premanisme yang melanggar hukum.</p> <p><b>Depiction</b></p> <p>➤ <b>“Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam negara hukum meskipun saya mengetahui tindakan itu terjadi, yakni karena ada jiwa korsa”</b> Petikan pernyataan Presiden SBY yang terdapat pada paragraf kedua dari berita ini menunjukkan sikap tegas seorang Kepala Negara terhadap aksi penyerbuan Lapas Cebongan yang dinilainya sebagai tindakan main hakim sendiri. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa Negara Indonesia adalah negara yang memiliki dasar hukum yang di atur dalam sebuah Undang-Undang sehingga tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan yang melanggar hukum dan harus ditindak tegas menggunakan aturan hukum yang berlaku.</p> <p>➤ <b>“Bahkan, dalam banyak kasus , premanisme dijadikan alat pemukul oleh</b></p>
--	--	---	--

<p>yang menyatakan bahwa 11 oknum anggota Kopassus sebagai tersangka kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Mayor Jenderal Agus Sutomo</b> Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus yang menyatakan diri ikut bertanggung jawab atas tindakan main hakim sendiri yang telah dilakukan anggotanya dalam kasus penyerbuan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Jenderal (Pol) Timur Pradopo</b> Pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan tentang hal penyerahan penanganan kasus penyerbuan Lapas Cebongan sepenuhnya kepada pihak TNI setelah adanya hasil temuan Tim Investigasi TNI AD.</li> <li>➤ <b>Bagus Takwin</b> Pengajar Psikologi Sosial Universitas Indonesia yang menyampaikan analisisnya mengenai penyebab maraknya premanisme yang terjadi di Indonesia.</li> <li>➤ <b>Poengky Indarti</b> Direktur Eksekutif Imparsial,</li> </ul>	<p>kasus seperti penyerbuan Lapas Cebongan ini menemui Menko Polhukam untuk menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan TNI, sekaligus meminta adanya tim pencari fakta independen. Harian Kompas ingin mengembalikan ingatan masyarakat terhadap kasus Tim Mawar beberapa tahun silam yang lenyap ditelan waktu melalui permintaan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Menko Polhukam ini.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Presiden Susili Bambang Yudhoyono</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 2)</b> “Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam negara hukum meskipun ..., ... ada jiwa korsa, ada perilaku dari sekelompok orang, di luar sana disebut kelompok preman, yang dengan sadis melakukan pembunuhan kepada seorang bintang Kopassus,” ucap Presiden ...</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan Presiden SBY di atas menunjukkan sikapnya yang tidak mendukung aksi 11</p>	<p>negara.</p>	<p><b>oknum polisi dan militer”</b> Pernyataan dari Hendardi, Direktur Setara Institute, yang dimuat dalam paragraf 18 menggambarkan keberadaan premanisme bagi lingkungan oknum kepolisian dan militer. Premanisme dimanfaatkan sebagai suatu alat untuk menindak suatu pelanggaran hukum tertentu.</p> <p><b>Exemplaars</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Analisis Dosen Psikolog Sosial UI, Bagus Takwin, terhadap penyebab maraknya aksi premanisme pada paragraf 16, menambah perspektif baru dari insiden Lapas Cebongan, yaitu adanya kelompok berkuasa dan pemodal yang menggunakan jasa pengamanan swasta akibat menurunnya tingkat keamanan dari aparat negara.</li> </ul> <p><b>Visual Images</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Grafik</b>, berupa tabel yang berisi data kasus premanisme yang terjadi di Yogyakarta sebelum peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan. Tabel tersebut ditempatkan pada</li> </ul>
---	---	----------------	---

<p>yang menanggapi soal pemberantasan premanisme. Sebagai Direktur dari sebuah LSM yang bergerak dalam bidang mengawasi dan menyelidiki sebuah pelanggaran HAM, tentu melihat peristiwa Cebongan dari sudut pandang hak asasi manusia. Sehingga Poengky tidak mendukung aksi anggota Kopassus di Cebongan untuk memberantas premanisme dengan cara membunuh empat tahanan tersebut.</p> <p>➤ <b>Hendardi</b> Direktur Setara Institute dalam wacana ini mengungkapkan pandangannya bahwa premanisme seperti dibiarkan oleh polisi.</p>	<p>anggota Kopassus dalam penyerbuan Lapas Cebongan untuk alasan apapun. Meskipun mengetahui latar belakang 11 anggota Kopassus yang melakukan aksi penyerbuan Lapas Cebongan, namun Presiden SBY tetap tidak dapat membenarkan tindakan tersebut yang dinilainya main hakim sendiri, karena menurutnya tindakan tersebut salah di negara Indonesia yang memiliki aturan hukum.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 4)</b> “Bagi saya, hal itu melegakan karena merupakan sifat ksatria, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. ... pembelajaran yang baik, itulah prajurit sejati, bahwa mereka bertanggung jawab. Setelah itu, tentu hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” ujarnya.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> “Dengan demikian, kehidupan kita makin tertib dan makin teratur,” katanya.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 6)</b> “Saya meminta pula dukungan masyarakat untuk memberikan</p>		<p>halaman yang berisi sambungan berita ini yaitu halaman 15. Tabel ini mengingatkan masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Yogyakarta sebelum terjadinya peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan.</p>
--	---	--	---



	<p>kesempatan dan ruang kepada mereka agar dapat bekerja secara profesional,” katanya.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pengakuan 11 oknum anggota Kopassus pada Tim Investigasi TNI AD, bagi Presiden SBY adalah sebuah tindakan ksatria yang menunjukkan mereka adalah prajurit sejati karena berani bertanggung jawab. Meski mengapresiasi keberanian pelaku tersebut, Presiden SBY tetap mengingatkan agar proses hukum ditegakkan seadil-adilnya agar kehidupan berjalan tertib dan teratur. Pernyataan Presiden SBY tersebut seolah tidak ingin terlalu memojokkan pelaku atas kesalahan yang dibuatnya dengan memuji pelaku yang dianggap berjiwa ksatria. Meskipun begitu sebagai Kepala Negara tetap mendukung dan memotivasi seluruh pihak aparat keamanan dan hukum juga masyarakat agar hukum di negara yang dipimpinnya adil dan berjalan dengan profesional.</p>		
--	---	--	--

	<p><b>Pelantun Wacana: Mayor Jenderal Agus Sutomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>(pada paragraf 8)</b> “Kopassus itu ada komandannya. Sayalah orangnya, ... yang paling bertanggung jawab,” kata Agus, ... <b>FUNGSI:</b> Pernyataan ini diungkapkan oleh Komandan Jenderal Kopassus guna menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pimpinan tertinggi di Kopassus atas tindakan yang diperbuat oleh kesebelas anak buahnya.</li><li>➤ <b>(pada paragraf 9)</b> “Grup sudah maksimal dengan langkah-langkah pencegahan sesuai petunjuk komandan,” kata Agus.</li><li>➤ <b>(pada paragraf 11)</b> “Harga dirinya kena,” katanya. <b>FUNGSI:</b> Pernyataan Agus ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku melakukan penyerbuan Lapas Cebongan bersifat spontan. Sebagai komandan, melalui pernyataan ini menunjukkan sikapnya yang mengerti akan latar belakang anak buahnya menyerbu Lapas Cebongan yang merasa harga dirinya tercoreng oleh</li></ul>		
--	--	--	--

	<p>tewasnya rekan mereka yang dinilai keji di tangan keempat tahanan tersebut.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Jenderal (Pol) Timur Pradopo</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 14)</b> “Kami akan serahkan barang bukti kaitan dengan hasil laboratorium forensik ke penyidik militer. Semua kaitan dengan saksi-saksi akan dilimpahkan semua,” ujar Timur ...</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan Kapolri ini menginformasikan bahwa akan menyerahkan proses penyelidikan serta penyidikan terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan ke pihak TNI yaitu berupa seluruh temuan barang bukti serta keterangan para saksi. Hal ini dilakukan setelah TNI AD mengungkapkan hasil temuan Tim Investigasi TNI pada masyarakat.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Bagus Takwin</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 16)</b> “Premanisme marak karena fungsi keamanan negara tidak</p>		
--	---	--	--

	<p>jalan. Orang akhirnya mengandalkan jasa pengamanan swasta,” kata pengajar psikologi sosial Universitas Indonesia Bagus Takwin.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan ini merupakan analisa dari seorang pengajar psikologi sosial UI, yang melihat penyebab meningkatnya aksi premanisme.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Poengky Indarti</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 17)</b> “Premanisme harus diberantas dengan cara tegakkan hukum bagi mereka yang melanggar hukum. Tidak bisa dibiarkan pemberantasan preman dengan cara membunuh mereka seperti dilakukan oknum Kopassus di Cebongan,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan Poengky di atas tidak membenarkan aksi pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang banyak dianggap sebagai pemberantasan premanisme. Pernyataan tersebut ingin menyampaikan pada beberapa</p>		
--	--	--	--

	<p>pihak yang menganggap aksi penyerbuan Lapas Cebongan sebagai aksi pemberantasan premanisme bahwa memberantas premanisme bukanlah dengan cara membunuh seperti yang dilakukan preman, namun dengan menegakan hukum yang ada.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Hendaridi</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 18)</b> “Bahkan, dalam banyak kasus, premanisme dijadikan sebagai alat pemukul oleh oknum polisi dan militer,” katanya.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan ini menurut pandangan Direktur Setara Institute bahwa dalam beberapa kasus, oknum polisi dan militer kerap menjadikan premanisme sebagai alat untuk menindak sebuah pelanggaran hukum. Hendaridi ini ingin menginformasikan pada masyarakat mengenai fakta yang diketahuinya tentang premanisme dalam lingkup aparat keamanan negara yaitu kepolisian dan militer.</p>		
<p align="center"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Memberi sorotan pada tanggapan presiden SBY yang minta penegakan</p>		<p align="center"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Tindakan main hakim sendiri adalah pelanggaran hukum yang perlu</p>	

hukum seadil-adilnya terhadap pelaku yang dinilai main hakim sendiri, reaksi Kopassus, pandangan Dosen Psikologi UI yang dilengkapi oleh pernyataan Poengky dan Hendardi.

ditindak melalui penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum menjadi fakta utama yang ditonjolkan untuk menghadapi kasus Cebongan agar tidak tumbuh lagi ruang bagi premanisme.

**MEDIA FRAME**

Penyerbuan Lapas Cebongan harus ditindak dengan penegakan hokum yang adil dan tegas bagi siapa pun pelakunya.

**Analisis Teks Berita 5 (Harian Kompas)**

**Judul : Polisi Serahkan ke TNI (Warga Yogyakarta Serukan Berantas Aksi Premanisme)**

**Edisi : Minggu, 7 April 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b> Barang bukti serta hasil penyidikan oleh pihak kepolisian terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan segera diserahkan kepada polisi militer. Hal itu menandakan penanganan kasus akan dilanjutkan oleh penyidik TNI AD, dan 11 anggota Kopassus tersangka penyerbu Lapas Cebongan akan mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan militer. <b>FUNGSI:</b> Berita ini sebagai lanjutan dari tindakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh 11 anggota Kopassus tersangka penyerbu Lapas Cebongan setelah mengakui perbuatannya dan diumumkan ke publik oleh pihak Tim Investigasi TNI AD.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b> ➤ <b>11 Anggota Kopassus, Pelaku Penyerbu Lapas Cebongan</b> Sebagai tersangka pelaku</p>	<p><b>Jenis Wacana</b> <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b> ➤ <b>(pada lead berita)</b> ... kepolisian pun menyerahkan penanganan kasus itu kepada TNI. ➤ <b>(pada paragraf 2)</b> ... polisi segera menyerahkan seluruh barang bukti dan hasil penyelidikan kasus tersebut kepada polisi militer. <b>FUNGSI:</b> Paragraf pembuka dalam berita ini menegaskan kebenaran adanya informasi pasca pengungkapan hasil temuan Tim Investigasi TNI AD ke publik bahwa polisi akan menyerahkan kasus sepenuhnya pada TNI AD. ➤ <b>(pada paragraf 3)</b> Direktur Imparsial Al Araf ..., sangat mungkin ke-11 tersangka itu diadili di pengadilan umum, bukan pengadilan militer. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI</p>	<p><b>Placement:</b> ➤ Berita ini tertulis dalam Harian Kompas edisi Minggu, 7 April 2013. Berita ini ditempatkan pada halaman kedua dalam Rubrik Nasionak tanpa ada tambahan foto maupun gambar grafis lainnya yang mendukung berita tersebut.  ➤ <b>Judul:</b> Polisi Serahkan ke TNI (Sub Judul: Warga Yogyakarta Serukan Berantas Aksi Premanisme). <b>FUNGSI:</b> Pemilihan judul ini menunjukkan adanya fakta bahwa kasus penyerbuan Lapas Cebongan yang telah diselidiki oleh pihak kepolisian akan diserahkan pada polisi militer pasca terungkapnya pelaku penyerbu Lapas Cebongan oleh Tim Investigasi TNI AD.</p>	<p><b>Metaphors</b> ➤ <b>“seruan pemberantasan premanisme”</b> Dalam paragraf 9, kalimat ini menunjukkan adanya ajakan dengan keras untuk memberantas tindakan kejahatan, kekerasan, dan berbagai tindakan pelanggaran hukum yang termasuk dalam golongan premanisme. ➤ <b>“kecaman”</b> Menurut KBBI, ke-cam-an berarti teguran yang keras, kritikan; celaan. Penggunaan kata tersebut dalam paragraf 10, menunjukkan adanya teguran keras yang dikeluarkan masyarakat Yogyakarta melalui media spanduk, SMS, dan jejaring sosial lainnya terhadap kejahatan premanisme yang terjadi belakangan di Yogyakarta.</p>

<p>penyerbu Lapas Cebongan, 11 anggota Kopassus ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam proses hukum. Setelah Polri menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada penyidik TNI, maka 11 anggota Kopassus akan diadili dalam peradilan hukum militer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Empat Tahanan Titipan Polda DIY</b> Sebagai tersangka pembunuhan terhadap salah satu anggota Kopassus, Serka Santoso, telah tewas ditembak mati dalam aksi penyerbuan Lapas Cebongan oleh 11 anggota Kopassus. Dalam wacana ini kematian keempat tahanan dalam peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan dianggap oleh sebagian warga Yogyakarta sebagai aksi pemberantasan premanisme.</li> <li>➤ <b>Tim Investigasi TNI AD</b> Tim dari pihak TNI AD yang menyelidiki hingga mengungkap pelaku penyerbu Lapas Cebongan. Dalam berita ini</li> </ul>	<p>membuka peluang untuk itu.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Menarik sekali pendapat dari Direktur Imparsial AL Araf dituliskan Harian Kompas dalam berita ini pada paragraf 4 hingga paragraf 5 setelah informasi penyerahan kasus oleh kepolisian ke pihak TNI AD. Harian Kompas ingin menunjukan pada pembaca bahwa masih ada perdebatan mengenai proses hukum yang harus dilalui ke-11 anggota Kopassus tersangka penyerbuan Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 4) ...</b> (Komnas HAM) tetap melanjutkan penyelidikan meski Tim Investigasi TNI AD telah memaparkan hasilnya. Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Nurkholis, ... fokus untuk mencari siapa yang bertanggung jawab di balik insiden ...</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Setelah memuat pendapat Al Araf terkait proses hukum yang seharusnya bisa dijalani tersangka di pengadilan umum, Harian Kompas kemudian menuliskan tentang</p>	<p>Sementara sub judul berita ini menunjukkan fakta lainnya yang menggambarkan adanya reaksi warga Yogyakarta yang menyerukan pemberantasan aksi premanisme pasca terungkapnya pelaku penyerbu Lapas Cebongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pasca terungkapnya pelaku penyerbu Lapas Cebongan, Harian Kompas fokus memberitakan tentang proses hukum yang akan dihadapi ke-11 anggota Kopassus sebagai tersangka. Seperti halnya pada pemberitaan ini, Harian Kompas menonjolkan perdebatan yang terjadi antara beberapa pihak tentang peradilan hukum militer atau sipil (pengadilan umum) yang semestinya dijalani tersangka dengan berbagai alasan dan dasar yang cukup kuat.</li> <li>➤ Dari <i>lead</i> berita hingga paragraf ke-3, Harian Kompas menempatkan informasi tentang penyerahan kasus Lapas Cebongan dari pihak kepolisian kepada TNI AD di pembukaan berita ini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“heroik”</b> Dalam KBBI, he-ro-ik memiliki makna bersifat pahlawan. Kata ini terdapat pada paragraf 11 yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Yogyakarta memandang aksi penyerbuan Lapas Cebongan sebagai sebuah tindakan seorang pahlawan yang dianggap memberantas premanisme.</li> <li>➤ <b>“mencederai”</b> Dalam paragraf 14, kata ini digunakan untuk memaknai peristiwa Lapas Cebongan sebagai peristiwa yang telah menorehkan luka pada rasa kebangsaan di negeri Indonesia yang memiliki beragam nilai.</li> </ul> <p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Penyerbuan Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>Polri hentikan penyelidikan kasus Cebongan</b></li> <li>➤ <b>Polri serahkan kasus ke penyidik TNI AD</b></li> <li>➤ <b>11 oknum anggota Kopassus tersangka</b></li> </ul>
--	---	---	--



<p>diinformasikan bahwa tim ini akan menerima barang bukti serta keterangan penyelidikan lainnya atas kasus penyerbuan Lapas Cebongan dari pihak Kepolisian RI, dan akan melanjutkan penanganan kasus tersebut berdasarkan UU Peradilan Militer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Komnas HAM</b> Lembaga negara yang bergerak dalam bidang mengawasi, mengkaji, meneliti segala hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam wacanan ini diberitakan terus melanjutkan penyelidikan mendalam terhadap kasus penyerbuan Lapas Cebongan meski kasusnya telah dilimpahkan sepenuhnya dan akan ditangani oleh pihak TNI AD dengan peradilan hukum militer.</li> <li>➤ <b>Warga Yogyakarta</b> Sebagian warga Yogyakarta menyerukan aksi berantas premanisme melalui spanduk-spanduk di jalan,</li> </ul>	<p>Komnas HAM yang terus mendalami kasus penyerbuan Lapas Cebongan meski Tim Investigasi TNI AD telah mengungkap pelaku penyerbu Lapas Cebongan. Harian Kompas seakan ingin masyarakat tahu bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak begitu saja langsung menerima pengungkapan kasus penyerbuan Lapas Cebongan oleh pihak TNI AD, namun masih perlu ditelusuri siapa dalang dibalik insiden penyerbuan Lapas Cebongan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 9)</b> ... justru dilihat sebagai bentuk ketegasan penindasan aksi premanisme.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 10)</b> Kecamatan terhadap aksi premanisme ... .., terpasang spanduk bertuliskan “Sejuta Preman Mati, Rakyat Jogja Tidak Rugi”. ... juga bermunculan lewat pesan singkat SMS dan jejaring sosial. <b>FUNGSI:</b> Melalui dua paragraf di atas Harian Kompas menginformasikan pada masyarakat tentang</li> </ul>	<p>Pada paragraf 3 terdapat pernyataan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar yang menegaskan fakta bahwa pelanggaran pidana yang dilakukan oknum TNI akan menjadi tanggung jawab penyidik militer dalam penanganan kasusnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemudian pada paragraf selanjutnya yaitu paragraf ke-4 hingga ke-5, Harian Kompas menuliskan pendapat dari Direktur Imparsial Al Araf yang memaparkan pendapatnya bahwa pelaku penyerbu Lapas Cebongan bisa diadili di pengadilan umum dengan dasar UU No 34 Tahun 2004.</li> <li>➤ Sementara pada paragraf ke-7 hingga 8, terdapat penjelasan Denny Indrayana tentang kasus hukum yang ada dalam peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan. Dalam penjelasannya Denny membenarkan masih adanya perdebatan mengenai proses peradilan yang harus dijalani</li> </ul>	<p><b>penyerbuan Lapas Cebongan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Perdebatan peradilan militer atau peradilan umum</b></li> <li>➤ <b>Pemberantasan premanisme</b></li> <li>➤ <b>Penegakan hukum</b></li> </ul> <p><i>Catchprasses</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Sejuta Preman Mati, Rakyat Yogya Tidak Rugi”</b> Tulisan yang ada pada spanduk di perempatan Gondomanan, Yogyakarta (pada paragraf 10) menunjukkan sikap masyarakat Yogyakarta yang justru memandang kasus penyerbuan Lapas Cebongan sebagai aksi tegas memberantas premanisme.</li> </ul> <p><i>Depiction</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang besar ini telah dikerdilkan hanya untuk kepentingan mikro”</b> Petikan komentar dari Ketua Forum Rektor Indonesia 2013 Laode M Kamaluddin (pada paragraf 14) menggambarkan bahwa</li> </ul>
---	---	---	--

<p>SMS, bahkan jejaring sosial, pasca terungkapnya pelaku penyerbuan Lapas Cebongan. Hal yang mereka lakukan seolah menganggap tindakan 11 anggota Kopassus adalah aksi heroik memberantas preman-preman di Yogyakarta.</p> <p><b>Pelantun Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Wartawan</b> Berperan sebagai pihak yang mengemas fakta menjadi sebuah informasi terkait penyerahan penanganan kasus penyerbuan Lapas Cebongan dari pihak kepolisian kepada TNI AD untuk diusut dalam peradilan militer.</li> <li>➤ <b>Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar</b> Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, dalam wacana ini menjelaskan tentang rencana akan diserahkan penanganan kasus penyerbuan Lapas Cebongan dengan menyerahkan barang bukti dan seluruh keterangan saksi pada polisi militer, TNI AD.</li> <li>➤ <b>Al Araf</b></li> </ul>	<p>unculnya kecaman melalui berbagai media (Spanduk, SMS, dan jejaring sosial) terhadap aksi premanisme pasca pengungkapan pelaku penyerbu Lapas Cebongan. Meski Harian Kompas terus berusaha menginformasikan jalur hukum yang semestinya dihadapi para tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dengan bijaksana Harian Kompas tidak begitu saja menghilangkan ketimpangan fakta berbeda dari proses hukum yaitu adanya sebagian warga Yogyakarta yang sepertinya malah mendukung aksi ke-11 anggota Kopassus dengan dasar memberantas premanisme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 11)</b> ... ketidakpastian hukum selama ini membuat masyarakat akhirnya menganggap serangan anggota Kopassus ... di LP Cebongan sebagai aksi yang seolah-olah heroik. Padahal, persoalan utamanya adalah kerinduan masyarakat akan suasana ketertiban.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 13)</b> ... kasus</li> </ul>	<p>pelaku, namun ia menegaskan bahwa melalui peradilan apapun, hukum akan ditegakkan dengan adil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dari <i>lead</i> berita hingga paragraf 8 di atas, jelas Harian Kompas menampilkan sebuah informasi yang masih menjadi perdebatan oleh beberapa pihak. Namun Harian Kompas tetap menekankan pada penegakan hukum atas perbuatan pelaku yang ditulis dalam paragraf 7 dari pernyataan yang disampaikan oleh Denny Indrayana.</li> <li>➤ Sementara itu, 6 paragraf selanjutnya dari total 14 paragraf yang ada dalam berita ini membahas tentang sub judul yang diangkat, yaitu adanya sebagian warga Yogyakarta yang menyerukan pemberantasan aksi premanisme pasca terungkapnya pelaku penyerbu Lapas Cebongan. Pada paragraf 10 dijelaskan berbagai media yang</li> </ul>	<p>tindak penyerbuan Lapas Cebongan, di mana pelakunya adalah aparat keamanan yang seharusnya menjaga ketertiban dan menegakkan hukum negara, telah merendahkan nilai-nilai kebangsaan yang beragam yang dimiliki Indonesia demi kepentingan segelintir kelompok yang tidak sepadan dengan besarnya nilai kebangsaan negeri ini.</p> <p><b>Exemplaars</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Perlu diperjelas, jika pelaku pelanggaran pidana adalah TNI, yang berhak menjadi penyidikny adalah jajaran militer, yaitu polisi militer”</b> Pernyataan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar (<b>paragraf 3</b>) di atas adalah untuk menjelaskan mengenai siapa yang berhak melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum TNI.</li> <li>➤ <b>Pada paragraf 4 hingga 5,</b> Harian Kompas menuliskan pemaparan dari Al Araf,</li> </ul>
--	--	---	--

<p>Sebagai Direktur Imparsial, sebuah organisasi masyarakat yang peduli terhadap hak asasi manusia. Dalam wacana ini ikut memberi tanggapan dalam penyerahan kasus penyerbuan Lapas Cebongan dari kepolisian kepada TNI. Menurutnya, bisa saja kasus ini diproses melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 65 Ayat 2 UU No 34/2004.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Denny Indrayana</b> Wakil Menteri Hukum dan HAM ini dalam acara wisuda mahasiswa Universitas Flores di Kabupaten Ende, NTT, memberikan orasi ilmiah. Dalam kesempatan ini, Denny menjelaskan kondisi hukum yang harus dihadapi 11 anggota Kopassus, pelaku penyerbu Lapas Cebongan yang harus diproses sesuai UU Peradilan Militer.</li> <li>➤ <b>Heru Nugroho</b> Sosiolog dari UGM menjelaskan pemikirannya atas ketidakpastian hukum dari kepolisian sebagai penyebab adanya warga Yogyakarta yang</li> </ul>	<p>penyerangan LP Cebongan harus benar-benar diletakkan pada konteksnya. ... aksi kekerasan aparat dan merupakan persoalan keamanan penegakan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 14)</b> Bagaimanapun penyerbuan LP Cebongan telah mencederai rasa kebangsaan.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Sangat menarik melihat tindakan Harian Kompas yang menutup berita ini dengan menuliskan pendapat dari beberapa Sosiolog UGM dan Ketua Forum Rektor Indonesia 2013 yang melihat fenomena kecaman masyarakat terhadap aksi premanisme dan menganggap ke-11 anggota Kopassus adalah <i>hero</i> pemberantas aksi premanisme pada dua paragraf di atas setelah paragraf sebelumnya membahas tentang kecaman tersebut. Pemikiran dua Sosiolog asal UGM dan pendapat Ketua Forum Rektor Indonesia 2013 tentang insiden ini seolah meluruskan apa yang seharusnya menjadi kecaman warga Yogyakarta yang</p>	<p>digunakan warga untuk mengancam adanya aksi premanisme, yaitu melalui spanduk, SMS, dan jejaring sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Langkah yang bijaksana dilakukan oleh Harian Kompas. Meskipun dengan lantang menyuarakan proses hukum yang sepatutnya dijalani pelaku penyerbu Lapas Cebongan dengan pilihan narasumber yang mendukung, namun Harian Kompas dalam berita ini tetap menampilkan adanya ketimpangan fakta diluar penegakan hukum yaitu pembelaan terhadap aksi ke-11 anggota Kopassus oleh sebagian warga Yogyakarta yang dianggap sebagai pahlawan pemberantas premanisme. Informasi tentang kecaman masyarakat terhadap aksi premanisme melalui berbagai media ini ditulis dalam paragraf 9 sampai 10.</li> <li>➤ Sementara menanggapi adanya kecaman tersebut,</li> </ul>	<p>Direktur Imparsial, yang menyebutkan bahwa ada kemungkinan ke-11 oknum anggota Kopassus tersangka penyerbuan Lapas Cebongan diadili di pengadilan umum berdasarkan Pasal 65 Ayat 2 UU No 34 Tahun 2004. Al Araf memaparkan bila dalam UU tersebut telah mengatur jika oknum TNI (prajurit) melakukan pelanggaran hukum pidana umum maka dapat diadili dalam pengadilan umum. Kemudian Al Araf pada paragraf 5 menambahkan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memerintahkan Kapolri agar memproses oknum Kopassus tersangka penyerbuan Lapas Cebongan di peradilan umum. Selain itu juga didukung adanya asas <i>lex posteriori derogat legi priori</i>, di mana hukum baru mengesampingkan hukum lama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Pada paragraf 11 -12,</b> memuat pemaparan dari Sosiolog ada UGM Yogyakarta , Heru Nugroho,</li> </ul>
--	---	---	--

<p>menganggap tindakan pelaku penyerbu Lapas Cebongan sebagai aksi yang heroik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Arie Sudjito</b> Sosiolog dari UGM, yang menyampaikan pendapatnya agar masyarakat tidak terjebak dalam provokasi atas peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan yang sudah semestinya dilihat sebagai kekerasan aparat dan persoalan keamanan penegakan hukum yang kurang baik.</li> <li>➤ <b>Laode M Kamaluddin</b> Ketua Forum Rektor Indonesia 2013 ini melihat peristiwa penyerbuan Cebongan telah merusak nilai-nilai Bangsa Indonesia demi kepentingan mikro, serta bukti dari kegagalan para elite pemimpin di Indonesia.</li> </ul>	<p>yang perlu dituntut atas terjadinya peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, yaitu kehidupan yang kembali damai dan tertib serta adanya pelanggaran kekerasan oleh aparat keamanan yang seharusnya menjadi penegak hukum bukan pelanggar hukum.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 2)</b> “Nanti kami akan mengumumkan proses penyerahan seluruh barang bukti dan hasil penyelidikan kasus itu, dari kepolisian ke penyidik militer (polisi militer),” tutur ... Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar ...</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 3)</b> “Perlu diperjelas, jika pelaku pelanggar pidana adalah TNI, yang berhak menjadi penyidiknya adalah jajaran militer, yaitu polisi militer,” kata Boy.</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar pada paragraf dua adalah guna menegaskan bahwa memang</p>	<p>Harian Kompas memuat pemikiran dari dua Sosiolog asal UGM. Menariknya pemikiran para sosiolog ini memandang kecaman masyarakat dalam perspektif yang berbeda, yaitu sebagai kerinduan masyarakat akan ketertiban yang membawa kedamaian dan kenyamanan di wilayah Yogyakarta. Sehingga untuk mewujudkan ketertiban tersebut dibutuhkan penegasan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum. Perspektif ini dapat menjadi alternatif masyarakat untuk memandang kasus penyerbuan Lapas Cebongan bukan sebagai aksi heroik namun aksi kekerasan oleh aparat keamanan yang melanggar hukum dan perlu ditindak dalam penegakan hukum yang tegas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita ini ditutup oleh pandangan Ketua Forum Rektor Indonesia 2013 yang berbeda pendapat dengan masyarakat dijelaskan pada paragraf 9 melihat aksi</li> </ul>	<p>yang menyebutkan bahwa ketidakpastian hukum menjadi alasan masyarakat Yogyakarta menganggap penyerbuan Lapas Cebongan sebagai suatu tindakan pemberantasan premanisme dan seolah menempatkan pelaku sebagai <i>hero</i>. Dalam hal ini pihak kepolisian yang harus bertindak lebih tegas sebagai aparat penegak hukum pada lini pertama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Pada paragraf 13, memuat pemaparan Sosiolog dari UGM Yogyakarta, Arie Sudjito,</b> yang kembali menegaskan tentang penegakan hukum dan penciptaan soliditas masyarakat sebagai upaya pemberantasan premanisme, bukan seperti tindakan yang terjadi di Cebongan. Pemaparan ini memiliki maksud untuk membuka pikiran masyarakat agar menempatkan peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan pada konteksnya, yaitu pelanggaran hukum, bukan sebagai aksi pemberantasan premanisme.</li> </ul>
---	--	---	---

	<p>akan ada penyerahan kasus sepenuhnya dari pihak kepolisian ke penyidik militer (polisi militer). Kemudian penjelasannya pada paragraf tiga adalah menjelaskan faktor dilimpahkannya kasus tersebut kepada pihak polisi militer, yaitu karena pelaku adalah berasal dari kesatuan TNI AD. Penjelasannya tersebut menggambarkan adanya penegasan mengenai hal pelimpahan kasus kepada TNI karena masih ada perdebatan tentang pelimpahan penanganan kasus tersebut.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Al Araf</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 4)</b> “Prajurit tunduk kepada kekuasaan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> “Presiden tinggal memerintahkan Kepala Polri agar kasus ini diproses melalui peradilan umum. Dasarnya ya pasal itu. ..., lex posteriori derogat legi priori.</li> </ul>	<p>penyerbuan Lapas Cebongan sebagai bentuk ketegasan penindasan aksi premanisme. Laode M Kamaluddin memandang peristiwa ini sebagai insiden yang telah mencederai rasa kebangsaan, mengerdilkan nilai-nilai kebangsaan yang besar, serta bukti kegagalan teladan para elite pemimpin Indonesia. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan warga Yogyakarta yang menyerukan pemberantasan aksi premanisme yang diangkat sebagai sub judul berita ini, seolah sebagai kesimpulan yang seharusnya diserap oleh masyarakat dari informasi yang disajikan Harian Kompas dalam 14 paragraf ini.</p>	
--	--	--	--

	<p>Hukum yang baru mengesampingkan UU yang lama. Dan yang paling penting adalah konstitusi menyatakan semua warga negara memiliki kesamaan di depan hukum, seperti tercantum dalam Pasal 27 dan 28 UUD 1945,” ungkapnya.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan Al Araf dalam dua paragraf di atas cukup detail disampaikan dalam menanggapi adanya penyerahan kasus dari kepolisian kepada penyidik militer. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keinginan agar pelaku penyerbu Lapas Cebongan diadili di pengadilan umum bukan di pengadilan militer atas dasar UU yang disebutkannya dan asas hukum baru mengesampingkan UU yang lama. Serta persamaan semua warga negara di depan hukum. Hal yang sangat rinci dan berdasar pada UU tersebut menunjukkan bahwa pihaknya masih belum menerima adanya rencana yang hampir menjadi keputusan yang <i>fix</i></p>		
--	--	--	--

	<p>atas proses hukum yang harus dihadapi oleh pelaku adalah peradilan hukum militer.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Denny Indrayana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 7)</b> “Hukum tetap harus ditegakkan dan mereka akan menjalani pengadilan militer. Ini memang terjadi perdebatan, ... pengadilan sipil atau militer. Dalam Tap MPR dan Undang-Undang TNI sudah diarahkan anggota TNI ... tindak pidana diproses dalam peradilan umum,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 8)</b> “Namun, untuk pelaksanaannya harus disesuaikan dengan UU Peradilan Militer. Untuk proses sekarang, yang mempunyai kewenangan adalah peradilan militer,” kata Denny ...</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan Denny Indrayana dalam dua paragraf di atas menunjukkan memang betul adanya perdebatan tentang proses peradilan yang</p>		
--	--	--	--

harus dijalani ke-11 anggota Kopassus tersangka penyerbuan Lapas Cebongan. Pada paragraf 7 Denny mengungkapkan sebuah fakta yang mana telah ada aturan yang mengarahkan pelaku seharusnya melalui proses dalam peradilan umum. Namun pada paragraf 8, Denny memaparkan bahwa kondisinya tetap harus disesuaikan dengan UU Peradilan Militer. Hal itu diungkapkan untuk menanggapi perdebatan yang ada, namun dari penjelasan Denny, jelas menunjukkan bahwa menurutnya dengan proses peradilan apapun, hukum akan tetap berjalan dan ditegakkan atas perbuatan penyerbu Lapas Cebongan.

**Pelantun Wacana: Heru Nugroho**

- **(pada paragraf 12)** “Suasana kemajemukan di Yogyakarta tidak masalah asal ada kepastian hukum. ... kepolisian adalah aparat penegak hukum pertama yang



	<p>harus bergerak memberikan kepastian hukum,” kata Heru.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Sebagai Sosiolog asal UGM Yogyakarta, memandang fenomena kecaman masyarakat terhadap aksi premanisme sebagai suatu kerinduan masyarakat terhadap suasana yang damai dan tertib di Yogyakarta. Sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas dari aparat kepolisian agar tercipta kembali Yogyakarta yang aman, nyaman, dan tertib.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Arie Sudjito</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 13)</b></p> <p>“Masyarakat tak perlu terjebak provokasi dan upaya adu domba. Semua memang harus melawan premanisme, tetapi bukan dengan menciptakan teror-teror baru, melainkan mempertegas penegakan hukum dan mendapatkan soliditas masyarakat,” ujar Arie.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan dari seorang Sosiolog UGM Yogyakarta ini ingin</p>		
--	--	--	--

menyampaikan pada masyarakat agar membuka pikirannya agar tepat dalam menempatkan kasus penyerbuan Lapas Cebongan, bukan sebagai aksi yang heroik. Karena menurutnya memberantas premanisme bukan dengan cara seperti itu. Seolah mempertegas pendapat dari rekannya sesama Sosiolog UGM, Heru Nugroho, Arie pun kembali menegaskan bahwa dengan mempertegas penegakan hukum dapat memberantas aksi premanisme.

**Pelantun Wacana: Laode M Kamaluddin**

➤ **(pada paragraf 14)**

“Nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang besar ini telah dikerdilkan hanya untuk kepentingan mikro. Hal ini juga bukti kegagalan teladan para elite pemimpin di negeri ini,” kata Ketua Forum Rektor Indonesia 2013 ...

**FUNGSI:** Pernyataan Laode M Kamaluddin di atas menunjukkan sebuah pendapat keras terhadap aksi

	<p>penyerbuan Lapas Cebongan yang menurutnya hanya untuk kepentingan mikro yang tak sebanding dengan besarnya nilai kebangsaan Indonesia. Pernyataan ini juga sebagai bentuk teguran untuk para elite pemimpin Indonesia yang dinilai gagal dalam memberi teladan pada anggotanya.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Penyerahan penanganan kasus Cebongan oleh kepolisian kepada TNI menimbulkan perdebatan dari beberapa pihak. Al Araf sebagai pihak yang menguraikan peluang TNI untuk mengadili tersangka dalam peradilan umum, dikuatkan dengan adanya pendapat Denny Indrayana dengan penjelasan Tap MPR dan UU TNI. Namun Denny juga berperan dalam menengahi perdebatan tersebut. Kemudian munculnya seruan pemberantasan premanisme oleh masyarakat atas terungkapnya pelaku, ditanggapi oleh 2 narasumber dari Sosiolog asal UGM secara teoritis yang mengangkat 'penegakan hukum' sebagai solusi, serta Ketua Forum Rektor Indonesia 2013 yang menegaskan tentang konteks penyerbuan Lapas Cebongan sebagai perusak nilai kebangsaan.</p>		<p style="text-align: center;"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Perdebatan yang muncul dari penyerahan kasus oleh polisi kepada TNI ditonjolkan untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa masih ada aturan hukum yang bisa digunakan untuk membawa kasus Cebongan dalam peradilan umum, meskipun pada pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan peradilan militer. Penegakan hukum dengan proses apapun baik militer atau pun umum juga ditonjolkan untuk menghadapi kasus Cebongan sebagai tindakan pelanggaran hukum bukan sebagai aksi heroik memberantas premanisme, yang terurai dalam pendapat dua sosiolog dan Ketua Forum Rektor Indonesia 2013.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEDIA FRAME</b></p> <p>Perdebatan terkait penanganan kasus Cebongan yang dilimpahkan kepolisian kepada TNI menunjukkan bahwa terdapat aturan yang sebenarnya bisa digunakan untuk mempertahankan kasus tersebut tetap ditangani oleh kepolisian dan diadili dalam pengadilan umum. Poin dari perdebatan tersebut adalah penegakan hukum yang adil untuk menghadapi kasus Cebongan, bukan dengan 'seruan' yang seolah menganggap aksi tersebut adalah pemberantasan premanisme.</p>			

**Analisis Teks Berita 6 (Harian Kompas)**

**Judul : Profesionalisme Prajurit Ditantang (HUT Ke-61 Kopassus)**

**Edisi : Rabu, 17 April 2013**

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
Srtuktur Skriptural	Struktur Tematis	Struktur Sintaksis	Struktur Retoris
<p><b>Obyek Wacana:</b>                      Dalam peringatan HUT ke-61 Kopassus, para prajurit diingatkan kembali untuk menjadikan kasus penyerangan ke Lapas Cebongan menjadi pelajaran agar lebih profesional tidak hanya dari keahliannya sebagai kesatuan elite, tapi juga kepatuhannya kepada negara hukum dan konstitusi.  <b>FUNGSI:</b> Berita ini sebenarnya mengangkat tentang Hari Ulang Tahun Kopassus ke-61. Namun, karena peringatan HUT ke-61 Kopassus, 16 April 2013, masih berdekatan dengan insiden penyerangan Lapas Cebongan, maka beberapa pihak mengaitkan peringatan hari ulang tahun Kopassus dengan kasus hukum yang masih harus dilalui oleh 11 oknum anggota Kopassus.</p> <p><b>Pelibat Wacana:</b>                      ➤ <b>Kopassus</b>                      Komando Pasukan Khusus</p>	<p><b>Jenis Wacana</b>  <b>Pelantun Wacana: Wartawan</b>                      ➤ <b>(pada lead berita) ...</b>                      Profesionalisme Kopassus tak hanya dilihat dari keahliannya sebagai kesatuan elite, tetapi juga dilihat sebagai kepatuhannya kepada negara hukum dan konstitusi.                      ➤ <b>(pada paragraf 2) ...</b>,                      profesionalisme Kopassus harus sejalan dengan tugas pokok TNI sesuai Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 7, ... harus menghormati konstitusi dan negara hukum.  <b>FUNGSI:</b> Dari <i>lead</i> berita sampai paragraf dua di atas menunjukkan informasi berupa sebuah harapan terhadap profesionalisme Kopassus. Harian Kompas mengangkat pendapat dari Al Araf yang disebutkan dalam paragraf dua untuk</p>	<p><b>Placement:</b>                      ➤ Berita ini tertulis dalam Harian Kompas edisi Rabu, 17 April 2013. Berita ini ditempatkan di halaman 5 dengan dilengkapi satu foto yang mendukung isi dari berita yaitu peringatan HUT Ke-61 Kopassus.                      ➤ <b>Judul:</b> Profesionalisme Prajurit Ditantang (Sub Judul: HUT Ke-61 Kopassus).  <b>FUNGSI:</b> Judul yang dipilih seolah menjadi tuntutan bagi Kopassus agar pada hari ulang tahunnya ke-61 seperti yang ada pada sub judul, Kopassus dapat bersikap profesional di tengah kasus yang sedang dihadapi oleh 11 oknum anggota Kopassus yang melakukan penyerangan Lapas Cebongan dan pihak TNI AD sebagai penyidik yang akan memproses hukum</p>	<p><b>Metaphors</b>                      ➤ <b>“profesionalisme Kopassus”</b>                      Pada paragraf 1, kalimat ini menunjukkan sikap profesional anggota Kopassus harus mencakup semua hal, baik keahliannya sebagai kesatuan elite, juga kepatuhannya pada negara hukum dan konstitusi.                      ➤ <b>“hukuman yang setimpal”</b>                      Kalimat tersebut terdapat pada paragraf 4 untuk menegaskan hukuman yang diterima 11 oknum anggota Kopassus tersangka penyerbuan Lapas Cebongan harus sepadan; sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukannya.                      ➤ <b>“agenda reformasi peradilan militer”</b>                      Dalam paragraf 4, kalimat ini menunjukkan akan adanya sebuah perencanaan</p>

<p>yang merupakan kesatuan elite terdepan Tentara Nasional Indonesia. Dalam wacana ini memperingati HUT ke-61 pada 16 April 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Joko Widodo</b> Gubernur DKI Jakarta yang juga hadir dalam acara peringatan HUT Ke-61 Kopassus di Cijantung, Jakarta.</li> <li>➤ <b>Mayor Jenderal (Purn) Sutiyoso</b> Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus, juga sebagai mantan Gubernur DKI, hadir dalam peringatan HUT Ke-61 Kopassus. Dalam wacana ini Sutiyoso mengingatkan agar Kopassus selalu berdasar pada hukum dalam melakukan tindakan apapun. Pada kesempatan yang sama juga meminta agar pengadilan terhadap 11 oknum anggota Kopassus dilakukan dengan adil.</li> <li>➤ <b>11 Anggota Kopassus, Pelaku Penyerbu Lapas Cebongan</b> Sebagai tersangka penyerbu Lapas Cebongan yang tengah</li> </ul>	<p>memberikan pendapat mengenai bagaimana seharusnya profesionalisme prajurit Kopassus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 4)</b> ... memulihkan Kopassus dari oknum pelanggar hukum dengan cara memberikan hukuman yang setimpal ... ..</li> </ul> <p><b>FUNGSI:</b> Dalam paragraf di atas, Harian Kompas mengangkat himbauan dari Al Araf yang mengaitkan pelanggaran hukum yang belum lama terjadi sebelum peringatan HUT ke-61 Kopassus dilakukan oleh 11 anggotanya, untuk Kopassus tidak perlu berupaya melindungi anggotanya dalam peradilan militer, agar hukum berjalan dengan adil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 7)</b> Agus berpesan, kasus penyerangan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, ... hendaknya dijadikan pelajaran. ... harus selalu hadir sebagai tentara rakyat yang dicintai dan bukannya malah ditakuti.</li> <li>➤ <b>(pada paragraf 8)</b> ... selalu dekat dengan rakyat sebagai tentara pejuang.</li> </ul>	<p>kesebelas tersangka tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dalam berita ini, penyosokan terhadap 11 oknum Kopassus digambarkan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Komandan Jenderal Kopassus, yang ditulis Harian Kompas dalam paragraf 5 dan 7-8.</li> <li>➤ Tidak jauh berbeda dari berita edisi sebelumnya, Harian Kompas dalam berita ini pun lebih mengangkat proses hukum yang harus dihadapi pelaku penyerbu Lapas Cebongan. Seperti pada paragraf 3, Harian Kompas menempatkan pernyataan Al Araf pada paragraf tersebut untuk menginformasikan pada masyarakat bahwa ada pihak yang menghimbau secara khusus di hari peringatan HUT ke-61 Kopassus, agar penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum oleh oknum Kopassus tidak lantas dilindungi oleh institusi Kopassus sendiri.</li> <li>➤ Sementara penyosokan 4</li> </ul>	<p>reformasi; koreksi; perubahan ke arah yang lebih baik dari peradilan militer terkait memproses kasus Cebongan yang akan dilaksanakan secara terbuka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“resistensi”</b> Pada paragraf 4, kata ini digunakan untuk mengacu pada suatu sikap perlawanan, atau menentang. Hal ini ditujukan untuk TNI agar tidak memberikan perlawanan terhadap suatu perubahan atau reformasi peradilan militer.</li> <li>➤ <b>“solusi”</b> Istilah ini merujuk pada pemecahan suatu masalah. Pada paragraf 5, dituliskan pendapat Danjen Kopassus yang menyebut Kopassus sebagai agen yang selalu menjadi sebuah pemecah masalah atau memperbaiki suatu keadaan yang amat rumit menjadi terselesaikan dengan baik dan benar.</li> <li>➤ <b>“secara tradisional”</b> Kalimat yang terdapat pada paragraf 8 ini bermaksud untuk menggambarkan Kopassus dari masa lalu,</li> </ul>
---	--	---	---

<p>menjalani proses hukum di peradilan militer untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam wacana ini, ke-11 prajurit Kopassus yang melakukan aksi main hakim sendiri dijadikan teguran bagi rekan-rekannya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.</p> <p><b>Pelantun Wacana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Wartawan</b> Pihak yang berperan penting dalam mengemas informasi terkait HUT ke-61 Kopassus berkaitan dengan insiden penyerangan Lapas Cebongan.</li> <li>➤ <b>Al Araf</b> Direktur Program Imparsial yang selalu mengikuti perkembangan proses hukum 11 oknum anggota Kopassus. Pada kesempatan peringatan HUT Ke-61 Kopassus, AL Araf berpendapat tentang Kopassus harus sejalan dengan tugas pokok TNI yang menghormati negara hukum dan konstitusi agar Kopassus tidak melindungi anggotanya dari hukuman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>(pada paragraf 9)</b> ..., dalam negara demokrasi semua dilakukan berdasarkan hukum. ..., hukum harus menjadi patokan. Tak bisa dengan cara main hakim sendiri, termasuk dengan alasan memberantas preman. <b>FUNGSI:</b> Dalam dua paragraf di atas, Harian Kompas menuliskan tentang pesan dari Komandan Jenderal Kopassus (paragraf 7 dan 8) dan Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal (Purn) Sutiyoso (paragraf 9) yang disampaikan pada hari peringatan HUT Ke-61 Kopassus. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan HUT Kopassus ke-61 tersebut merupakan peringatan yang dijadikan momentum untuk mengingatkan para prajurit Kopassus berkaitan dengan peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, yaitu dalam tugasnya sebagai seorang tentara yang dekat dengan rakyat harusnya patuh pada negara hukum.</li> </ul>	<p>tahanan yang menjadi korban penyerbuan Lapas Cebongan dalam berita ini tidak dibahas dengan rinci. Hanya saja pada paragraf 9, Harian Kompas menuliskan pendapat Mayor Jenderal (Purn) Sutiyoso, yaitu tidak boleh lagi ada yang main hakim sendiri meskipun dengan alasan memberantas preman. Hal ini cukup menyiratkan bahwa issue penyerbuan Lapas Cebongan sebagai tindakan tegas memberantas preman sangat kuat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berita yang tersusun dari 11 paragraf ini ditutup dengan permintaan Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus dalam paragraf 9 hingga 11, agar penegakan hukum oleh polisi militer terhadap oknum Kopassus pelaku penyerbu Lapas Cebongan dilakukan dengan adil. Tiga paragraf yang menutup berita ini seolah dijadikan Harian Kompas sebagai kesimpulan dari berita edisi ini yang mana pada hari peringatan HUT ke-61 Kopassus sebagai hari</li> </ul>	<p>suatu kebiasaan, jika Kopassus adalah tentara pejuang bagi masyarakat.</p> <p><b>Keywords</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Penyerbuan Lapas Cebongan</b></li> <li>➤ <b>Hut ke-61 Kopassus</b></li> <li>➤ <b>Profesionalisme prajurit Kopassus</b></li> <li>➤ <b>Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal Agus Sutomo</b></li> </ul> <p><b>Catchphrases</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“lebih baik pulang nama daripada gagal menjalankan tugas (<i>die before dishonor</i>)”</b> Pada paragraf 8 untuk menjelaskan pedoman Kopassus, yang harus lebih baik kembali ke kampung halaman dengan nama baik sebagai seorang pejuang (telah tewas di medan perang), daripada pulang dengan membawa kekalahan dalam bertugas.</li> </ul> <p><b>Depiction</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>“Kopassus hadir untuk menjaga <i>eksistensi</i> Negara</b></li> </ul>
---	--	--	---

<p>atas kasus pelanggaran hukum yang dilakukan, penyerangan Lapas Cebongan.</p> <p>➤ <b>Mayor Jenderal Agus Sutomo</b> Sebagai Komandan Jenderal Kopassus, pimpinan tertinggi dalam kesatuan tersebut, dalam peringatan HUT Ke-61 Kopassus, Mayor Jenderal Agus Sutomo mengingatkan para prajuritnya agar belajar dari kejadian Penyerangan Lapas Cebongan, untuk menjadi tentara yang tidak ditakuti tapi harus melindungi rakyat dan eksistensi NKRI.</p>	<p>➤ <b>(pada paragraf 10)</b> ... penegak hukum mendapatkan pelajaran ... masyarakat masih berusaha percaya kepada penegakan hukum.</p> <p>➤ <b>(pada paragraf 11)</b> ... mendesak agar pengadilan 11 prajurit Kopassus itu dilakukan dengan adil. <b>FUNGSI:</b> Harian Kompas menutup berita ini dengan harapan Sutiyoso agar penegak hukum dalam kasus penyerbuan Lapas Cebongan belajar dari peristiwa tersebut dan sekaligus segera menyelesaikan proses pengadilan dengan adil. Harapan ini seolah dijadikan kesimpulan dari peringatan HUT Ke-61 Kopassus yang waktunya tidak jauh dari peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, sebagai aksi pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Kopassus sendiri.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Al Araf</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 3)</b> “Kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oknum anggota</p>	<p>untuk mengingatkan seluruh prajurit dan para elite pemimpin Kopassus Kopassus dalam ujiannya sebagai tentara rakyat yang memiliki profesionalisme yang tinggi.</p> <p>➤</p>	<p><b>Kesatuan Republik Indonesia”</b> Pernyataan ini diungkapkan Danjen Kopassus (pada paragraf 5) dalam pemberian sambutan di acara peringatan HUT ke-61 Kopassus. Kutipan pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Kopassus adalah tentara yang menjaga ‘keberadaan’ NKRI.</p> <p><b>Visual Images</b></p> <p>➤ <b>Foto</b> yang menggambarkan anggota Kopassus membawa tumpeng buah di Markas Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura, Jawa Tengah, dalam rangka perayaan HUT ke-61 Kopassus.</p>
---	--	--	---

	<p>Kopassus sudah semestinya jangan sampai menjadi beban institusi dengan melindungi mereka dari hukuman atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan,” kata Al Araf ...</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan ini disampaikan Al Araf tepat di hari peringatan HUT Ke-61 Kopassus. Pernyataan ini untuk mengingatkan Kopassus agar menjaga profesionalismenya dalam menghormati hukum yang ada dengan tidak melindungi anggotanya yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan.</p> <p><b>Pelantun Wacana: Mayor Jenderal Agus Sutomo</b></p> <p>➤ <b>(pada paragraf 5)</b> “Kopassus ada untuk rakyat. Kopassus adalah tentara rakyat. Kopassus hadir untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.</p> <p><b>FUNGSI:</b> Pernyataan ini diungkapkan Komandan</p>		
--	---	--	--



	<p>Jenderal Kopassus saat peringatan HUT Ke-61 Kopassus. Pernyataan ini seolah menjadi teguran keras dari pimpinan tertinggi Kopassus pada prajuritnya karena peristiwa Penyerangan Lapas Cebongan menunjukkan bahwa Kopassus bukan lagi menjadi tentara rakyat seperti yang disebutkannya. Sehingga dalam peringatan HUT tersebut. Komandan Jenderal Kopassus kembali harus menyebutkan fungsi keberadaan mereka di tengah negeri ini agar prajuritnya dapat memahami dan selalu sadar bahwa Kopassus adalah solusi bukanlah permasalahan bagi bangsa.</p>		
<p align="center"><b>FRAME SELEKSI</b></p> <p>Momentum HUT Kopassus ke-61 dipilih Harian Kompas untuk menampilkan narasumber yang mengangkat wacana tentang profesionalisme prajurit Kopassus.</p>		<p align="center"><b>FRAME SALIANSI</b></p> <p>Profesionalisme Prajurit Kopassus dapat dibuktikan dengan taat pada hukum bercermin dari kasus Cebongan sebagai pembelajaran.</p>	
<p align="center"><b>MEDIA FRAME</b></p> <p>Melalui berita ini, Harian Kompas menggiring masyarakat untuk melihat bahwa penegakan hukum yang adil dan tegas dalam penanganan kasus Cebongan akan menjadi bukti profesionalisme Kopassus.</p>			

## ***INTERVIEW GUIDE***

1. Biodata narasumber (wartawan SKH KR dan Harian Kompas) yang diwawancarai, seperti: latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sebelum bergabung dalam media masing-masing, sejak kapan bekerja di media, alasan bekerja di media cetak, serta organisasi lain yang pernah atau sedang diikuti.
2. Sebelum merujuk pada topik penelitian, bagaimana system dan prosedur kerja di organisasi media (SKH KR dan Harian Kompas), proses pra dan paska pengemasan berita?
3. Bagaimana kebijakan redaksional yang berlaku di organisasi media (SKH KR dan Harian Kompas) terkait aturan-aturan dalam kinerja para pekerja media pada proses pengemasan berita?
4. Bagaimana rutinitas organisasi media dalam proses pengemasan berita (pra dan paska peliputan berita)?
5. Bagaimana sistem rapat redaksi dalam organisasi media dan posisi wartawan dalam rapat tersebut?
6. Pada umumnya media dipengaruhi berbagai pihak kepentingan, pihak mana yang paling berpengaruh? Seberapa besar pengaruhnya (seperti *influence* dari *owners*, pengiklan, masyarakat, maupun pemerintah) dalam proses peliputan hingga pengemasan berita?
7. Sebagai wartawan yang bersentuhan langsung dengan suatu peristiwa di lapangan, fakta seperti apa yang dicari dan dipilih untuk diliput, serta apa yang biasanya lebih ditonjolkan dalam penulisan beritanya (terkait pemilihan narasumber, penentuan judul, *lead* berita)? Siapa yang menentukan, apakah dari bagian redaksi atau otoritas wartawan?
8. Terkait peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, apakah ada pihak kepentingan yang berpengaruh dalam proses pengemasan berita? Kepentingan apa saja dan seperti apa pengaruhnya?
9. Dalam pemenuhan aspek 5W+1H (selama proses peliputan berita), apa yang biasanya dilakukan wartawan untuk mendapatkan berita dengan informasi yang mendalam?
10. Selama proses peliputan berita peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan, fakta seperti apa dan siapa narasumber yang jadi fokus peliputan?

11. Apakah ada arahan atau kebijakan dari bagian redaksi yang mengatur dalam proses peliputan berita peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan? Arahan atau kebijakan seperti apa? Bagaimana pengaruhnya dengan kekritisian wartawan dalam proses peliputan berita?
12. Dalam proses peliputan berita (seperi pemilihan narasumber, fakta, judul, *lead* berita), apa yang menjadi pertimbangan wartawan atau redaksi dalam hal tersebut?
13. Selama penulisan berita, siapa yang lebih berwenang menentukan judul, *lead* berita, narasumber? Bagaimana kriteria sebuah berita yang layak diangkat menjadi *headline*?
14. Apakah ada *frame* tertentu yang dibentuk media (SKH KR dan Harian Kompas) dalam pemberitaan peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan?
15. Bagaimana posisi media dan wartawan pribadi (SKH KR dan Harian Kompas) dalam “melihat” peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan?
16. Sebagai media cetak lokal – media cetak nasional, pandangan dan *frame* seperti apa yang diberikan media pada masyarakat melalui pemberitaan peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan?
17. Apakah ada kendala selama proses peliputan berita? Bagaimana menyikapinya?
18. Untuk SKH KR, mengapa dari hasil analisis teks enam berita yang dianalisis peneliti menunjukkan *frame* yang cenderung ‘membela’ oknum Kopassus? Mengapa dari enam berita didominasi oleh pihak dari TNI dan pihak yang pro terhadap tindakan oknum Kopassus?
19. Untuk Harian Kompas, mengapa dari hasil analisis teks enam berita yang dianalisis peneliti menunjukkan *frame* yang cenderung mengarah pada penonjolan aspek penegakan hukum? Mengapa beritanya didominasi oleh narasumber dari para pengamat yang juga komentarnya mengarah pada *frame* yang terbentuk dalam pemberitaan pada Harian Kompas?
20. Apakah menurut wartawan, berita yang ditulis dan disebarkan telah mempengaruhi masyarakat dalam memandang peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan? Darimana ukuran/patokan yang menentukan hal tersebut?

**Transkrip Wawancara dengan Wahyu Priyanti (Ayu/ Wartawan Kedaulatan Rakyat – desk Hukum dan Kriminal)**

**Pewawancara : Meissara Jovie Rosiana**

**Tanggal, pukul : 10 Desember 2013, 09.25 WIB**

**1 April 2014, 10.00 WIB**

Eca	Sebelum masuk ke pembahasan tentang kasus Cebongan, boleh diceritakan gimana awalnya Mbak Wahyu bisa menjadi wartawan Kedaulatan Rakyat?
Ayu	Jadi dulu ya awalnya karena saya tertarik di bidang jurnalistik, kemudian saya bekerjalah menjadi wartawan. Padahal saya kuliahnya sih s1 hukum mbak, di Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta. Kalau di KR saya sejak tahun 2007 mbak.
Eca	Memangnya sebelum di KR pernah bekerja di media lain Mbak?
Ayu	<i>Nggak</i> kerja juga sih Mbak, mungkin itu lebih tepatnya seperti magang ya sebelum di KR, saya di Harian Meteor Jogja, (Jawa Pos Grup) di desk hukum dan kriminal. Pas pindah ke KR juga di desk yang sama Mbak sampai sekarang belum dipindah-pindah. Padahal udah mau pindah Mbak, udah capek.
Eca	Ohh gitu, capek kenapa Mbak? Kan udah cukup lama yah sampai sekarang pasti udah hafal betul sistem kerjanya, apa nanti <i>nggak</i> takut keteteran kalau coba desk lain?
Ayu	Justru karena saya udah ngerti jadi saya mau pindah sebenarnya. Mungkin bisa dibilang bosan ya, mau cari suasana baru aja Mbak.
Eca	Nah, karena Mbak Wahyu sudah terbilang cukup lama di KR, bisa cerita <i>nggak</i> Mbak bagaimana sistem dan prosedur bekerja di KR?
Ayu	Ini sebatas pengalaman saya selama ini aja ya Mbak. Rata-rata sih setiap koran itu ya sama sistemnya. Sebelum kami, para wartawan ini terjun ke lapangan untuk melakukan peliputan ya biasanya selalu ada rapat redaksi. Dalam rapat itu biasanya ada para redaktur pelaksana, pemimpin redaksi juga ada, dan kami para wartawan. Terus kalau sudah dapat berita di lapangan biasanya kami tulis lalu kami berikan ke bagian redaksi ya. Nah kalau sudah diberikan ke sana itu ya udah bukan wewenang kami lagi. Nanti masih diseleksi berita kami, kemudian di kasih ke desk halaman yang disitu nanti ada proses <i>editing</i> . Terus redaktur juga akan mempertimbangkan layak atau tidak untuk dimuat, setelah itu baru oke Mbak. Kemudian baru ditentukan berita yang paling menarik dan ingin ditonjolkan dalam edisi itu untuk jadi <i>headline</i> -nya. Setelah udah <i>fix</i> beritanya, baru <i>finishing</i> . Biasanya masih diperiksa lagi

	<p>sama redaktornya layak atau tidak, karena kemungkinan kalau masih ada yang kurang datanya menurut redaktur, wartawan itu dipanggil lagi untuk melengkapi data biar beritanya <i>fit to print</i>. Biasanya sih wartawan baru, <i>newbie</i> gitu Mbak yang diperiksa lagi, kalau kaya Saya ya masih, tapi jarang sekali ya. Jadi gitu itu ya biar KR juga bagus ya mbak, wajib lengkap data beritanya. Makanya sekarang setiap hari ada <i>meeting</i> juga untuk membicarakan data-data apa saja yang dibutuhkan dari isu yang ada atau yang ingin diangkat. Tapi kalau seperti saya kan di <i>desk</i> hukum dan kriminal ya <i>nggak</i> bisa mbak menentukan isu yang diangkat, karena saya <i>nggak</i> mungkin kan merencanakan kejahatan apa di luar sana yang akan terjadi. Jadi kalau ada laporan atau informasi biasanya dari teman-teman kepolisian ya saya langsung aja terjun ke TKP, baru besok paginya misalnya di dalam rapat saya sampaikan. Kalau malam juga ada rapat, tapi per-divisi aja untuk membicarakan apa yang ingin diliput keesokan harinya atau ada data-data yang kurang lengkap atau sebagai kelanjutan dari hasil evaluasi berita yang telah terbit untuk dicari keesokan harinya. Terus ada juga rapat yang khusus untuk para pemimpin redaksi juga tiap malam menentukan tampilan dan berita yang dimuat di halaman pertama mba, khususnya juga <i>headline</i> jadi bagian paling penting yang dirundingkan. Begitu kurang lebihnya mbak.</p>
Eca	<p>Kemudian untuk isu yang akan diliput sendiri, biasanya kan beberapa media punya isu tertentu untuk diangkat. Kalau untuk KR isu seperti apa yang diangkat mbak?</p>
Ayu	<p>Isu macam-macam ya mbak. Semua wartawan kan punya isu masing-masing biasanya dibahas tuh dalam rapat. Tapi kalau saya tadi sudah saya jelaskan di <i>desk</i> hukum dan krimina itu kadang bingung juga mau bahas isu apa dalam rapat, karena kalau seperti saya ini kan situasional. Tergantung kondisi di lapangan seperti apa. Tapi kalau temen-temen lain ya pasti ada isunya, bahkan mereka sendiri bisa membuat isu ya khususnya yang dalam bidang politik, ekonomi, atau kebudayaan juga bisa. Tapi ya semua yang punya nilai berita mbak, berita yang berbobot berguna untuk kepentingan publik juga mencerdaskan masyarakat mbak. Kaya ideologi KR itu sebenarnya “berguna bagi masyarakat”. Jadi KR juga ada untuk wadah aspirasi rakyat.</p>
Eca	<p>Kalau tadi mbak sampaikan ada rapat redaksi setiap hari, itu prosesnya seperti apa dan bagaimana posisi wartawan dalam rapat itu mbak?</p>
Ayu	<p>Rapat redaksi itu setiap hari mbak, dari jam 08.30 WIB pagi, sampai selesai. Kaya tadi kan saya mengikuti rapat dulu baru bisa bertemu Mbak Eca. Jadi wartawan wajib hadir, kecuali memang ada liputan mendadak dan waktunya bentrok ya itu wajar dan pasti dimaklumi. Terlebih saya kan wartawan <i>desk</i> hukum dan kriminal, jadi peristiwa</p>

	<p>yang diliput tidak bisa dirancang, dan seringnya tidak terduga. Dalam rapat itu wartawan berkesempatan mengajukan isu seperti yang tadi saya bilang, isu yang didapat dari pengamatan di lapangan. Setidaknya kami lebih tahu peristiwa apa saja yang terjadi untuk dapat dijadikan isu pemberitaan karena kami terjun langsung ke lapangan. Selain itu juga sekaligus biasanya diberikan penugasan dari pimpinan redaksi untuk meliput. Misalnya ada redaktur yang mendapat informasi ada kejadian penggrebekan narkoba, misalnya. Nah saya ditugaskan. Sekaligus juga dalam rapat mengevaluasi berita yang sudah terbit tadi misalnya nanti diberikan evaluasi langsung mungkin bisa dari pemred ada yang kurang tepat angle atau seperti apa itu disampaikan dalam rapat. Kami juga membandingkan berita-berita kami dengan media lain, misalnya <i>headline</i> yang KR angkat dengan koran lokal maupun nasional misalnya. Untuk tahu apa kekurangan atau pun kelebihan kita dalam menyajikan beritanya kepada masyarakat khususnya masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya. Karena KR kan koran ‘wangi’, yang beritanya jarang memuat kontroversial yang tajam, menyesuaikan dengan masyarakatnya. Makanya dalam rapat selalu dibandingkan dengan berita pada koran lainnya.</p>
Eca	<p>Setiap media biasanya dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ya mbak, kalau KR sendiri kepentingan mana yang paling berpengaruh?</p>
Ayu	<p>Emmm.. kepentingan terbesar ya dari iklan mbak. Hehe.. kapitalis ya. Iklan itu berpengaruh paling besar mbak. Misalnya ada berita jelek nih tentang pengiklan KR yang beriklan beratus-ratus juta, ya <i>nggak</i> akan dimuat. Itulah kadang bikin kita <i>dongkol</i> juga mbak, berita udah dibuat ternyata bentrok sama iklan ya kita <i>nggak</i> bisa apa-apa mbak.</p>
Eca	<p>Kalau dari pemilik mbak? Ada kebijakan yang mempengaruhi <i>nggak</i> dalam mbak melakukan peliputan berita biasanya?</p>
Ayu	<p>Sebenarnya ada ya mbak. Pemilik saham terbesar. Kaya baru-baru kemarin ini kan pemegang saham itu tergabung dalam satu partai merah, saya <i>nggak</i> usah sebut nama ya mbak. Nah saya tulis berita menyangkut kampanye yang kisruh kan dengan kata-kata “simpatisan partai merah”. Besoknya diberitanya muncul udah diganti tuh mbak sama editornya. Istilahnya diperhalus ya biar ga jelek yaa kesannya dalam berita itu, diganti jadi “massa yang mengikuti kampanye partai merah ini”. Gitu mbak, jadi selain iklan ya pemilik saham terbesar itu.</p>
Eca	<p>Kalau denger dari cerita mbak tadi, berita yang mbak tulis lalu diganti pada bagian editor. Apakah itu berarti kebijakan atau kepentingan seperti itu lantas tidak mempengaruhi kekritisannya mbak ya sebagai wartawan KR?</p>
Ayu	<p>Ya jelas <i>nggak</i> Mbak. Mungkin karena saya juga bisa dibilang wartawan</p>

	<p>senior ya mbak. Jadi saya tuliskan berita sesuai fakta yang saya lihat dan pahami di lapangan. Saya kritisi sesuai dengan kaedah jurnalistik yang berlaku umumnya ya mbak. Namun memang setelah berita itu akhirnya diserahkan ke kantor ya sudah bukan wewenang saya lagi.</p>
Eca	<p>Kalau masalah pemilihan judul, narasumber, maupun fakta yang diangkat mbak, ada kebijakan dari redaksional atau otoritas wartawan?</p>
Ayu	<p>Seperti yang tadi saya cerita mbak, misalnya dalam rapat wartawan mengajukan isu itu biasanya sudah menentukan narasumber, tapi bagian redaksi mungkin memberikan masukan atau punya permintaan untuk mewawancarai narasumber tertentu. Tapi setelah peliputan di lapangan disesuaikan dengan keadaan, kalau narasumber dari redaksi bisa diwawancara akan kami wawancara tapi kalau tidak ya kami punya otoritas untuk mencari yang lain karena kami yang tahu bagaimana kondisi di lapangan. Biasanya hal itu akan dikordinasikan lagi dengan redaktur pada rapat redaksi yang malam hari per divisi. Biasanya sih <i>newbie</i>, wartawan baru mbak yang diarahkan harus begini begitu sama redaksi. Tapi kalau kayak pengiklan, dan pemegang saham terbesar tadi ya pinter-pinternya wartawan mbak. Yang pasti setelah berita kami tulis dan kami berikan ke kantor, bagian editor, kami udah <i>nggak</i> punya wewenang untuk mengatur judul, <i>lead</i> berita, dsb. Karena judul kita bisa saja dirubah. Paling ya besoknya pas udah terbit saya protes dikit mbak, nanti dijelaskan alasannya kenapa harus diganti, seperti itu.</p>
Eca	<p>Untuk masalah ideologi mbak, selain tadi di awal mbak bilang kalau KR ideologinya itu “berguna untuk masyarakat”, seperti wadah aspirasi dan mencerdaskan rakyat. Kalau mbak sendiri gimana? Apakah ideologi tersebut juga turut berpengaruh dalam peliputan dan penulisan berita mbak?</p>
Ayu	<p>Hehe ideologi saya apa ya Mbak?! Ya saya memberitakan apa yang ada di lapangan aja sih mbak dengan tujuan menginformasikan pada masyarakat. Oh iya mbak, KR itu adalah koran yang “<i>wangi</i>”. Jadi pemberitaannya itu jarang yang keras, atau mengkritik keras, sesuatu yang kontroversial sekali jarang yah, kalau pun ada ya diperhalus tadi, karena ya itu mbak wangi tadi. Mengkritik tokoh misalnya, ya dengan halus, ga dengan bahasa-bahasa yang tajam. Gitu mbak. Menyesuaikan juga yah mbak masyarakat Yogyakarta ini kan orangnya lembut, halus, <i>nggak</i> suka kekerasan gitu ya mbak. Tapi kalo ideologi KR dikaitkan dengan peliputan berita yang mungkin ada yang tidak sesuai ya dengan beritanya ya <i>nggak</i> akan berpengaruh besar mbak, yang berpengaruh ya iklan tadi. Ideologinya sudah dibeli sama iklan mbak. Hehe.. berita yang seharusnya diketahui masyarakat tentang pengiklan besar ini tadi misalnya, jadinya mungkin masyarakat tidak tahu karena pengiklan</p>

	tidak ingin diangkat, atau bahkan pemilik saham tadi mbak. Hati-hati sekali bagian redaksi kalau masalah mereka mbak.
Eca	Dalam peliputan dan penulisan berita, selain 5W+1H, sebagai wartawan KR khususnya di <i>desk</i> mbak nih, apalagi yang mejadi bahan pertimbangannya mbak?
Ayu	Ya 5W+1H yang diutamakan. Selain itu mungkin tadi kan yang dipertimbangkan berita menyangkut pemilik saham terbesar tadi sama pengiklan ya harus diperhalus bahasanya ya sebagai contoh. Sama yang pasti yang menarik mbak, dalam arti “menjual”. Berita kita harus menjual, menarik pembaca untuk membeli koran kita. Itu sih mbak.
Eca	Terkait dengan <i>desk</i> mbak hukum dan kriminal yang sudah hampir 7 tahun <i>nggak</i> dipindah-pindah ya mbak, kasus pembunuhan atau perkosaan, dan tindak kriminal lainnya sudah jadi makanan mbak sehari-hari lah ya. Nah, biasanya fakta atau narasumber seperti apa yang mbak tonjolkan dalam penulisan berita?
Ayu	Situasional ya mbak, kalau saya di TKP ya fakta tentang kejadiannya seperti apa mbak, misal penganiayaan ya tentang bagaimana terjadinya mbak, bagaimana keadaan korban, pelakunya siapa, dsb. Narasumber yang pasti adalah yang berada di TKP, polisi misalnya, atau mungkin korban penaganiayaan, itu kalau korban masih hidup ya mbak. Hehe.. kalau <i>nggak</i> ya kerabat terdekat korban misalnya. Tapi kalau sudah di luar TKP ya misalnya rekan korban, rekan pelaku mungkin sudah ada dugaan. Seperti itu mbak.
Eca	Jika dikaitkan dengan kasus Cebongan mbak. Apakah fakta yang diangkat maupun narasumbernya juga sama dengan kasus-kasus yang biasa mbak beritakan, mengingat ini kasus yang menggemparkan tidak hanya masyarakat lokal tapi sampai nasional dan bahkan dilihat dalam dunia internasional, karena pelaku pelanggar hukum adalah aparat hukum? Apa untuk kasus ini tetap mbak yang berinisiatif sendiri dalam peliputan, atau ada arahan semacam kebijakan redaksional yang mengatur?
Ayu	Emmmmh, kasus Cebongan ini bener tadi mbak bilang jadi perhatian ya karena ini pertama kalinya terjadi mbak, aparat hukum menyerang tahanan dan melakukan pelanggaran hukum. Biasanya kan yang terjadi adalah tahanannya yang berontak, tapi ini tahanannya dibunuh ya di dalam sel. Ya saya meliput seperti biasa mbak. Saya kan selalu <i>stand by</i> di Lapas Cebongan waktu itu, hampir satu bulan mbak, tapi ada rekan saya namanya Saiful yang mem- <i>back up</i> saya kalau saya capek. Saya mengangkat fakta yang terjadi <i>kok</i> mbak sesuai yang ada di lapangan. Memang sebelum kejadian isu penyerangan sudah kuat sekali beredar kabar mbak khususnya di kalangan wartawan kalau akan ada



	penyerangan ke Lapas Cebongan, karena kita kan ada rekan-rekan intel yang bekerja sama seperti itu. Jadi pas peristiwa berlangsung saya <i>nggak</i> begitu kaget dan langsung aja ke TKP subuh waktu kejadian. Karena saya bidangnya kriminal dan hukum jadi ya narasumber saya kebanyakan memang dari Polda DIY mbak.
Eca	Ini kan kasus yang bisa dibilang sensitif ya mbak karena melibatkan aparat hukum, apa tidak ada arahan dari kebijakan redaksional, atau ada semacam <i>mapping</i> dalam peliputan berita ini?
Ayu	Arahan itu ya ada sih Mbak. Tapi rahasia perusahaan mbak, saya <i>nggak</i> berani buka di sini ya, hehe.. Kalau <i>mapping</i> kayaknya <i>nggak</i> ada mbak, ngikutin aja apa yang terjadi di sana dan fakta apa yang didapat selama <i>stand by</i> di Lapas Cebongan, kemudian dituliskan.
Eca	Jadi arahan itu juga apakah membentuk <i>frame</i> yang diinginkan KR dalam berita ini?
Ayu	Ehmmm.. iya sih mbak. Memang ada <i>frame</i> yang ingin dibentuk, tapi ya itu sesuai fakta yang ada di lapangan aja, dan tetap mengacu pada nilai berita juga kepentingan masyarakat. Tidak jauh lah dari fakta yang ada, kami tetap mengungkapkan apa yang terjadi di lapangan dalam berita yang kami terbitkan mbak. Kaya yang mbak baca, ya itulah yang terjadi mbak. Karena ini kan kasus yang melibatkan para aparat penegak hukum ya mbak, jadi kita <i>nggak</i> bisa sembarangan. Bahkan mbak pihak kepolisian aja sangat berhati-hati dalam mengeluarkan <i>statement</i> . Dalam kasus ini kan <i>nggak</i> cuma saya yang meliput tapi ada kerja sama dari <i>desk</i> lain, sehingga beritanya informatif dan variatif juga mbak, <i>nggak</i> sebatas pada informasi dari penanganan kasus oleh pihak kepolisian yang menjadi fokus saya.
Eca	Untuk pemilihan narasumber dan penulisan judulnya sendiri terkait kasus Cebongan apakah ditentukan dari rapat redaksi, misalnya dari redaktur pelaksana mbak?
Ayu	Ada yang ditentukan, ada yang kami kemudian pilih sendiri ketika kami sudah terjun ke lapangan. Yang ditentukan itu ya tetap harus disesuaikan pada kondisi di lapangan mbak, <i>nggak</i> bisa dipaksakan juga. Kalau saya fokus pada kepolisian ya mbak, dalam kasus Cebongan ini informasinya langsung dari Kabid Humas Polda DIY mbak. Kalau judul, ya saya tulis sendiri, tapi sama seperti berita lainnya nanti akan dipilih yang paling menarik <i>angle</i> nya oleh bagian redaksi, dan jika dirasa judul saya kurang menarik maka akan diganti oleh <i>editor</i> sesuai perintah redaktur maupun pemred. Tapi kalau <i>lead</i> berita kebanyakan berita saya tetap dari apa yang saya tuliskan mbak.
Eca	Kalau kembali lagi pada rutinitas media, seperti yang mbak ceritakan di awal, terkait kasus Cebongan ini, dengan adanya rapat redaksi setiap

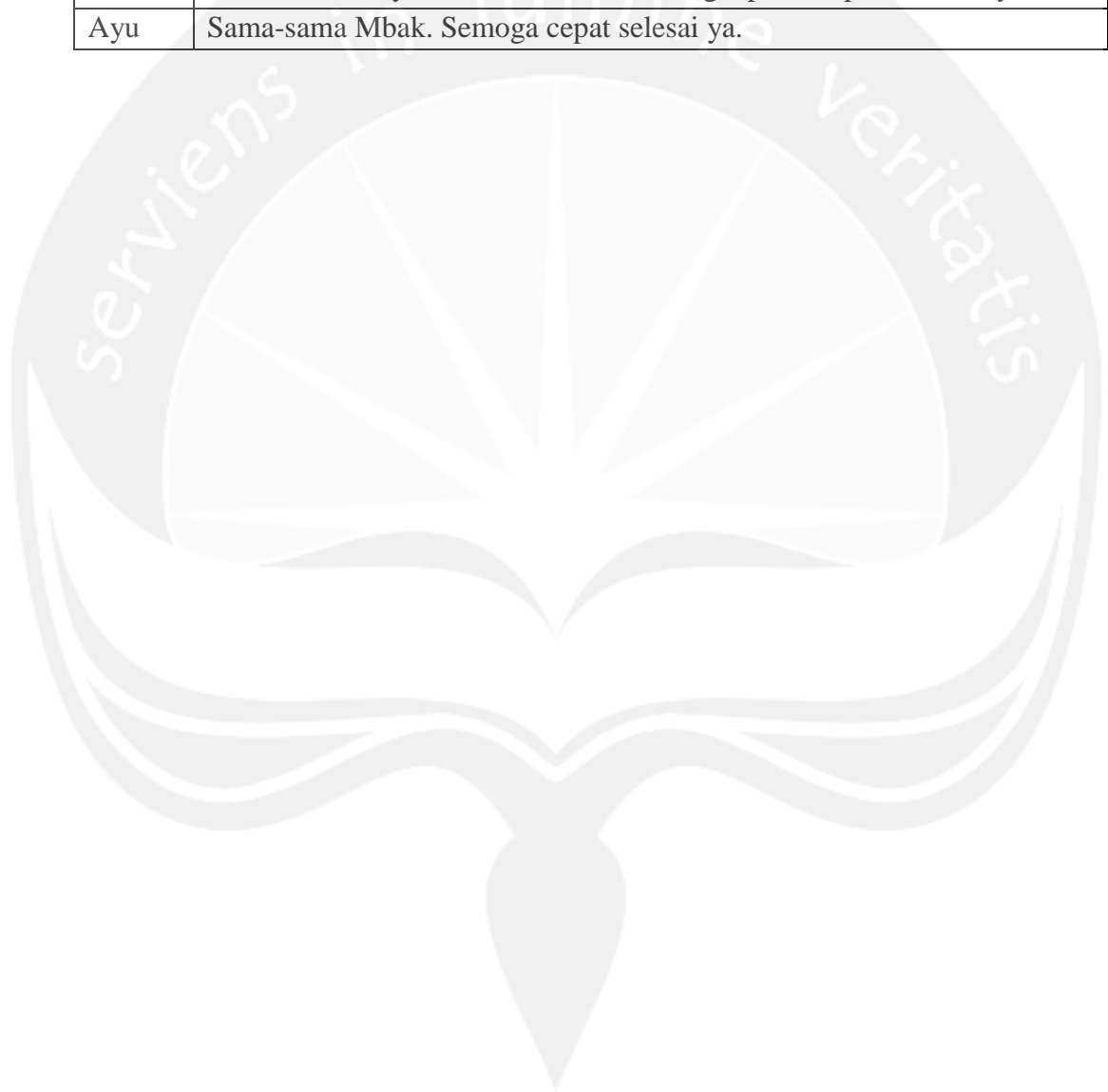
	hari dan proses berita yang melalui beberapa tahapan sampai akhirnya diterbitkan, apakah mempengaruhi kekritisannya mbak dalam meliput berita Cebongan ini?
Ayu	Rutinitas seperti itu tidak mempengaruhi kekritisannya saya kok mbak dalam meliput dan menulis berita. Ya saya masih merasa cukup bebas ya dalam melakukan peliputan, tidak ada yang terlalu mengekang. Karena ya kembali lagi mbak saya memang menyajikan beritanya kan berdasarkan fakta yang ada di lapangan seperti apa.
Eca	Dari hasil analisis teks saya terhadap 6 berita Cebongan di SKH KR, antara lain “4 Tahanan Tewas”, “31 Peluru di Tubuh 4 Korban”, “Penyerang Lapas Siap Tanggung Jawab”, “7 Penganiaya Santoso Masih Bebas”. Nah 4 dari 6 berita yang saya sebut itu saya liat yang menulis berita adalah mbak ya inisial penulisnya “Ayu”. Dari berita itu nampak bahwa KR dari judul, isi berita, dan pengutipan pernyataan narasumber sepertinya menyudutkan 4 tahanan titipan itu dan pelaku menjadi pihak yang bisa dikatakan dibela atau disosok dengan nada yang positif, hal itu kenapa seperti itu ya mbak?
Ayu	Nah itu sebenarnya mbak sudah dapat ya <i>frame</i> nya. Sebenarnya begini mbak, kami itu, KR ya, mengikuti kemauan masyarakat yang sudah merasa gerah. Jadi <i>frame</i> yang ada itu ya memang mengikuti maunya “pasar” mbak, masyarakat yang sudah resah dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Diki Cs itu mbak. Jadi masyarakat membela oknum Kopassus tadi. Nah kami pun, menjual berita itu.
Eca	Memangnya selain mengikuti maunya “pasar” seperti yang mbak bilang tadi, <i>nggak</i> ada kepentingan dari pihak lain yang menekan KR mbak sehingga terlihat sekali beritanya mendukung satu pihak yaitu oknum Kopassus?
Ayu	Ehhmmm.. gimana ya mbak, saya <i>nggak</i> berani komentar banyak kalau masalah itu menyangkut internal perusahaan kami mbak. Kalau yang pasti sih memang karena pasar tadi mbak, masyarakat mengelu-elukan Kopassus, ya kami menjual berita yang diinginkan masyarakat yang sudah resah tadi terhadap kejahatan Diki Cs ya mbak.
Eca	Tapi <i>frame</i> berita KR sebelum dan sesudah terungkapnya pelaku seperti ada sikap yang berubah ya mbak? Awalnya Mbak Ayu mencoba menunjukkan ketegangan yang ada di lapas saat peristiwa, lalu berita kedua juga berusaha menggiring masyarakat agar mengetahui pelaku seperti kabar yang sudah mbak dengar sebelumnya. Tapi saat pelaku diungkap oleh TNI, saya melihat KR mengangkat <i>frame</i> yang seperti saya tanyakan tadi mbak, apa yang membuat adanya perubahan sikap itu mbak khususnya mbak sebagai penulis berita?
Ayu	Waktu sebelum terungkap kan kepolisian hati-hati sekali ya mbak. Saya

	<p>juga walaupun tahu pelakunya dari kabar yang beredar sebelum kejadian kan <i>nggak</i> bisa juga di awal itu langsung memberitakan pada masyarakat bahwa pelakunya adalah Kopassus. Makanya awal-awal ya <i>frame</i> nya memang seperti yang mbak lihat, tidak secara sengaja juga membentuk <i>frame</i> seperti itu. Saya berusaha menuliskan fakta yang saya tahu saja di lapangan, kan kenyataannya memang ada beberapa narasumber yang mau bercerita seperi SUMBER KR itu tentang peristiwa, dari situ kan bisa kelihatan mbak pelakunya, masyarakat pun saya rasa sudah cukup pintar dengan membaca berita saya. Kemudian saat pelaku terungkap ya tidak ada perbedaan sikap sebenarnya, saya menuliskan fakta yang ada bahwa memang benar pelakunya adalah oknum Kopassus kan. Dan berita yang kami beritakan selanjutnya ya sesuai dengan fakta yang kami dapat di lapangan, tidak membela siapa-siapa karena memang kenyataannya Kopassus sudah berani mengakui perbuatannya kan hebat mbak, daripada <i>nggak</i> jujur. Dan kenyataannya juga empat tahanan itu ya seperti yang dikatakan Ketua Tim Investigasi TNI kan, memang dikenal sebagai preman. Jadi tidak ada sikap yang berbeda, berita yang saya tulis ya dari fakta yang saya lihat.</p>
Eca	<p>Kalau menurut pandangan mbak nih, dari <i>frame</i> yang dibentuk dalam berita KR atau mungkin mbak sendiri sebagai orang yang mengemas fakta-fakta di lapangan menjadi sebuah berita, bagaimana sih posisi KR dalam memandang kasus Cebongan ini?</p>
Ayu	<p>Saya rasa ya sama ya mbak dengan masyarakat. Memang salah ketika aparat hukum melakukan pelanggaran hukum, di dalam rumah tahanan lagi kan mbak. Tapi <i>flashback</i> lagi kejahatan yang dilakukan Diki Cs sebelumnya itu juga sudah sangat meresahkan ya mbak. Jadi ya seperti itu, tapi kami tetap mengangkat fakta yang ada, dengan narasumber yang ada, bukan dibuat-buat ya mbak. Apa yang terjadi di lapangan ya kami tulis, seperti banyaknya dukungan terhadap Kopassus dari masyarakat, itulah yang kami tulis. KR saya rasa berusaha netral dengan menuliskan apa yang sebenarnya terjadi.</p>
Eca	<p>Kalau mbak Wahyu pribadi memandang kasus Cebongan, dikaitkan dengan pelanggaran HAM seperti apa? Karena isu tentang pelanggaran HAM ini juga diangkat KR dalam berita “Bukti Proyektil diserahkan ke TNI” dan “Komnas HAM Tumpul Hadapi Preman”. Dari berita tersebut nasrasumber yang diambil adalah narasumber yang “membenarkan secara moral” tindakan oknum Kopassus ya mbak. Bagaimana dari pandangan Mbak pribadi?</p>
Ayu	<p>Saya kan selama ini <i>nongkrongnya</i> di Polda DIY terus ya mbak, atau di polsek-polsek khususnya daerah Sleman untuk dapat isu yang bisa dijadikan topik dalam berita saya setiap harinya. Jadi saya kurang lebih</p>

	<p>tahu lah <i>track record</i>-nya Diki Cs itu gimana dalam catatan kriminal mereka mbak. Mereka itu penguasa kehidupan malam. Membuat onar, banyak melakukan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat Yogyakarta, misalnya dulu pernah merusak rumah-rumah warga sekitar Tambak Bayan, Babarsari, melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan banyak lagi yang lain mbak. Kejahatan mereka itu sudah bikin masyarakat resah. Ya saya seperti berita yang saya tulis ya mbak, memang saya mendukung juga apa yang dilakukan oknum Kopassus itu mbak. Oknum Kopassus itu memang melanggar HAM ya mbak, tapi Diki Cs itu juga lebih banyak melanggar HAM masyarakat selama mereka hidup itu mbak. Jadi ya walaupun salah memang secara hukum, tapi ya saya setuju aja mbak sama tindakan Kopassus itu memberantas mereka itu yang dibidang preman kan sama masyarakat. Bahkan ni ya mbak, pasca kejadian Cebongan itu, teman-teman Polisi itu cerita ke saya kalau laporan kejahatan yang dulunya hampir setiap hari ada dengan pelaku dari orang-orang Indonesia bagian timur, nah pasca kejadian Cebongan itu nihil mbak. Sama sekali <i>nggak</i> ada. Terus teman saya Saiful, yang meliput di kepolisian kota juga menginformasikan hal yang sama, menurun hingga 70% apa 80% gitu mbak kejahatan secara umum ya, <i>nggak</i> Cuma dari orang Indonesia bagian Timur itu mbak kalau di wilayah kota.</p>
Eca	<p>Selain itu saya juga menemukan satu hal lagi mbak yang menonjol dari pemberitaan kasus Cebongan dalam KR ini, beritanya kok setelah pengakuan oknum Kopassus itu, kebanyakan narasumbernya adalah TNI. Bahkan berita “7 Penganiaya Santoso Masih Bebas” itu kan menginformasikan tentang penanganan kasusnya Santoso oleh polisi, tapi kok yang menerangkan malah pihak TNI ya mbak bukan kepolisian langsung? Apakah KR memiliki hubungan erat dengan TNI yang juga mempengaruhi pembentukan <i>frame</i> tadi mbak?</p>
Ayu	<p>Ehmm.. <i>nggak</i> juga sih mbak. Tapi memang setelah pengungkapan kasus itu, kepolisian sangat berhati-hati mbak berkomentar tentang kasus ini dan kasus Santoso yang berkaitan dengan motif dari penyerangan ke Cebongan. Karena polisi tidak mau ada semacam “<i>clash</i>” sama TNI mbak. Kan TNI yang sudah punya kewenangan menangani kasus Cebongan tersebut. Makanya untuk kasus terkait pun seperti kasus Santoso juga pihak TNI yang angkat bicara.</p>
Eca	<p>Ohh jadi dalam berita kedua yang judulnya “31 Peluru Di Tubuh 4 Korban” mbak tulis sebagai SUMBER KR itu pihak polisi?</p>
Ayu	<p>Iya mbak betul, tapi kan saya sembunyikan identitasnya, agar aman dan tentu untuk menjaga hubungan antara TNI dan Polisi, agar tidak timbul konflik. Kan memang sebenarnya sudah tahu bahwa akan ada</p>

	penyerbuan, jadi ya <i>nggak</i> kaget dan pernyataan yang saya tulis tentang ciri-ciri pelaku itu ya dari polisi juga.
Eca	Sebelum terungkapnya pelaku mbak memang menyajikan berita yang mengarahkan masyarakat untuk berpikir pada pelaku ya mbak? Dari pernyataan SUMBER KR yang mbak tuliskan terakhir “Jelas terlihat kalau kelompok adalah terlatih dan profesional”.
Ayu	Iya mbak, semua pernyataan dari SUMBER KR itu saya tuliskan apa adanya memang seperti itu yang dia katakan. Dan yang “terlatih dan profesional” memang saya taruh di akhir, kan dari situ masyarakat bisa menebak harusnya. Saya juga menuliskan kasus Diki Cs yang bunuh anggota Kopassus itu lengkap dengan grupnya kan mbak. Kan itu bagian yang menarik mbak, dan bisa dijual ke masyarakat sekaligus bisa membuat masyarakat berpikir ke arah pelaku.
Eca	Pengalaman mbak meliput berita ini sampai proses pengadilan itu, pernah dapat <i>complain</i> <i>nggak</i> mbak?
Ayu	Ohh <i>nggak</i> pernah mbak. Aman-aman aja.
Eca	Dengan pelakunya sendiri mbak pernah dapat kesempatan wawancara?
Ayu	Iya mbak, saya pernah wawancara yah sama Ucoknya sendiri waktu itu saat sudah mulai sidang digelar.
Eca	Jadi kasusnya sekarang sudah sampai pada tahap banding kan mbak ya. Sudah ada putusannya belum?
Ayu	Iya mbak banding, tapi belum ada kelanjutannya tuh mbak, paling nanti lenyap sendiri mbak kasusnya. Apalagi Ucok pelakunya itu kan mbak Kopassus, yah pasti TNI melindungi anak buahnya mbak.
Eca	Bisa tahu gitu mbak?
Ayu	Iya saya kan temenan bbm sama Ucok, tapi komunikasi terakhir cuma sampai vonisnya dijatuhkan. Setelah itu hilang <i>nggak</i> ada kabar. Saya rasa sudah bebas sih mbak, sepertinya dilindungi atasannya mbak. Kan <i>nggak</i> ada lagi beritanya sekarang.
Eca	Kasus Cebongan ini kan kek kita bilang tadi di awal sudah menyedot perhatian tidak hanya masyarakat lokal, nasional, bahkan internasional. Nah, KR sebagai koran lokal, memberitakan kasus ini apakah kemudian ada hal-hal yang dipertimbangkan dengan matang oleh redaksi misalnya, atau bagaimana mbak?
Ayu	Memang sih mbak menyedot perhatian di mata dunia ya mbak, tapi kami, KR tetap mementingkan kepentingan lokal, kepentingan pasar lokal. Ya seperti tadi yang saya bilang, berita Cebongan ini sebagian besar mengarah pada pembelaan terhadap Kopassus karena kami mengikuti maunya pasar seperti apa, pendapat masyarakat seperti apa. Berita kami itu mewakili dan merepresentasikan suara rakyat. Kalau nasional kan mereka bisa membeli koran nasional, Kompas misalnya

	mbak, atau mungkin Tempo ya yang lebih tajam dalam pemberitaannya.
Eca	Apakah berarti suara masyarakat itu juga juga jadi <i>influence</i> mbak dalam menulis berita?
Ayu	Iya dong mbak, suara masyarakat itu bisa jadi <i>background</i> untuk mengemas fakta di lapangan. Misalnya orang tua saya kan asli Yogyakarta, seneng banget waktu ada kasus ini bilanganya biar aman gitu dari preman.
Eca	Ok Mbak Wahyu makasih banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saya informasi untuk melengkapi hasil penelitian saya.
Ayu	Sama-sama Mbak. Semoga cepat selesai ya.



**Transkrip Wawancara dengan Aloysius Budi Kurniawan (ABK/ Wartawan Harian Kompas)**

**Pewawancara : Meissara Jovie Rosiana (Eca)**

**Tanggal, pukul : 6 Desember 2013, 08.25 WIB**

**1 Maret 2014, 08.20 WIB**

Eca	Sebelum masuk pada topik, boleh diceritakan bagaimana dulu akhirnya Mas ABK bisa bergabung menjadi wartawan Harian Kompas?
ABK	Saya mulai bergabung dengan Kompas sejak tahun 2007, dulu itu awal mulanya saya melamar dan kerja pertama di Jakarta. Tapi <i>nggak</i> lama kemudian dipindahkan dari Jakarta ke Bandung sampai 2008. Lalu dari 2008 dipindahkan lagi ke Surabaya sampai dengan 2011. Sekarang ada di Yogyakarta, dari 2011 itu sampai sekarang ya sudah sekitar 7 hampir 8 tahun ya. Tapi kalau untuk di Yogyakarta ini ya dari 2011 sampe sekarang ya tiga tahunan ya.
Eca	Bisa dibilang sudah cukup lama ya Mas berkecimpung di dunia jurnalistik, dulu kuliahnya berkaitan dengan dunia jurnalistik juga ya Mas?
ABK	Haha.. Malah <i>nggak</i> Mbak. Saya dulu kuliahnya malah Theologi di Sadhar. Jadi S1 Fakultas Filsafat dan Theologi Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta.
Eca	Ohh justru <i>nggak</i> ada <i>basic</i> jurnalistik tapi bisa bertahan sampai 7 tahun ya Mas. Apa yang membuat Mas awalnya tertarik berprofesi sebagai wartawan dan cara mas menyesuaikan diri dengan dasar pendidikan mas akhirnya masih bertahan sampai sekarang di Harian Kompas? Sebelumnya pernah bekerja di media lain mungkin?
ABK	Saya sih awalnya mencoba bekerja di Kompas sebagai wartawan ya karena tuntutan pekerjaan saja. Sebelumnya saya sempat bekerja di Divisi Marketing Penerbit dan Percetakan Kanisius. Nah kemudian saya coba mengadu nasib ke Kompas, diterima, kemudian ada pelatihannya ya. Ada diklat satu tahun dulu sebelum diterjunkan jadi wartawan Kompas ya jadi <i>nggak</i> sembarangan langsung ditugaskan peliputan gitu ya tentu tidak. Tetap diajarkan pastinya yang berkaitan dengan jurnalistik kurang lebihnya. Kalau masalah saya betah hampir 7 tahunan ini bertahan di Kompas ya alasannya, satu, <i>salary</i> cukup, lalu kami sebagai wartawan diberi kebebasan berekspresi dalam bidang jurnalistik secara optimal, dan juga banyak kesempatan liputan di berbagai bidang baik di dalam maupun di luar negeri.
Eca	Nah, kan sudah terbilang cukup lama Mas mengabdikan diri sebagai wartawan Harian Kompas. Boleh Mas berikan informasi pada saya tentang sistem dan prosedur kerja di Harian Kompas?
ABK	Selama pengalaman saya di Jakarta kemudian berpindah-pindah akhirnya sampai di Yogyakarta, prinsipnya hampir sama. Misalnya sekarang saya berada di Yogyakarta, seperti yang saya katakan tadi, kami sebagai wartawan diberikan kebebasan berekspresi, itu artinya

	<p>diberikan keleluasaan untuk mencari berita apapun. Saya bisa meng-cover berita ekonomi, politik, olah raga, bisnis, hampir semua ya dipelajari dan diliput untuk wilayah DIY ini. Dengan keleluasaan tersebut tentu saja wartawan dalam memilih berita akan memilih yang tingkat pengaruhnya pada publik kuat dan memiliki <i>news value</i>, yang tentunya berkaitan dengan kepentingan nasional ya, karena kita kan sebagai media nasional. Setiap harinya, setelah mendapat berita, wartawan langsung mengirimkan <i>listing</i> ke Jakarta. <i>Listing</i> nya itu yang kira-kira berisi poin berita apa yang akan diangkat atau ditulis hari itu. <i>Listing</i> dirapatkan di Jakarta setiap sore untuk diputuskan layak naik atau tidak, jadi <i>headline</i> atau tidak, dsb. Biasanya wartawan kirim aja sebelum <i>deadline</i> sekitar pukul 18.00-19.00 WIB. Kalau di Yogyakarta sendiri tidak ada rapat redaksi, karena rapat langsung dilakukan oleh redaksi bagian pusat ya di Jakarta.</p>
Eca	<p>Kemudian untuk proses penulisan berita sampai berita itu diterbitkan, alurnya seperti apa mas?</p>
ABK	<p>Setelah <i>listing</i> berita dikirimkan ke Jakarta, beritanya di sini saya tulis lengkap dengan judul dan <i>lead</i> berita. Kemudian beritanya tersebut saya kirim ke Jakarta, lalu di sana diedit. <i>Editing</i>-nya melalui proses yang berlapis-lapis. Pertama beritanya diedit oleh editor <i>desk</i> Nusantara. Kalau <i>editor</i> ini mengedit beritanya berkaitan dengan konten, udah bener apa belum kontennya, <i>lead</i> beritanya bagus apa <i>nggak</i>, detail dan lengkap <i>nggak</i> datanya. Kemudian setelah diedit oleh <i>editor</i> tadi, diserahkan dan diteliti oleh Penyelaras Bahasa, yang meneliti soal tanda baca seperti koma, titik, soal kata baku atau tidak baku gitu aja, jadi lebih tekhnis. Setelah selesai diteliti oleh penyelaras bahasa, beritanya kembali ke <i>editor</i> lagi untuk <i>finalisasi</i> disesuaikan dengan <i>space</i> halaman korannya untuk kemudian diterbitkan pada Harian Kompas.</p>
Eca	<p>Apakah ada kebijakan redaksional Harian Kompas yang mengatur wartawannya dalam hal peliputan berita?</p>
ABK	<p>Tidak ada kebijakan khusus. Wartawan bebas memilih berita apapun, prinsipnya layak diberitakan dan memiliki nilai berita. Tentu saja semua proses pemberitaan harus dilandasi dengan norma atau etika jurnalistik. Harian Kompas adalah media yang menerapkan kebijakan yang menjunjung tinggi etika jurnalistik. Makanya saya bangga dengan Harian Kompas yang hingga sekarang masih dipercaya sebagai media yang kredibel dan mempertahankan mutu.</p>
Eca	<p>Tadi mas katakan di awal, kalau mas bisa meng-cover semua berita, baik ekonomi, politik, olahraga, budaya, dll. Lalu kalau tidak ada kebijakan redaksional khusus, lantas apa yang jadi patokan atau acuan mas dalam menentukan isu apa yang ingin diangkat dan dianggap penting untuk diliput kemudian <i>listing</i>-nya dikirimkan ke Pusat? Apakah mungkin ada rutinitas dari Harian Kompas yang mempengaruhi mas sebagai wartawan dalam meliput dan menulis sebuah berita?</p>
ABK	<p>Karena keterbatasan jumlah wartawan, maka setiap wartawan Kompas di daerah harus jeli memilih berita yang akan diangkat. Patokannya, berita tersebut harus berskala nasional. Berskala nasional itu ya seperti</p>



	<p>memiliki tingkat pengaruh yang luas, berkaitan dengan kebijakan publik, memiliki nilai humanistik yang tinggi, menyangkut kredibilitas negara, mempengaruhi harkat dan martabat rakyat banyak, berkaitan dengan tokoh yang kuat, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Sebagai contoh: maling ayam ditangkap polisi tentu saja kadar <i>news value</i>-nya tidak sebanding dengan serombongan anggota Kopassus yang menyerbu Lapas Cebongan. Berita penyerbuan ke Lapas Cebongan ini tentu lebih kuat karena adanya tindak pelanggaran hukum yang dilakukan aparat hukum di dalam sebuah Lapas sebagai simbol “rumah negara”. Jika ada peristiwa kuat atau besar, kantor Pusat biasanya juga memberikan penugasan. Tapi pada prinsipnya, wartawan di daerah juga harus peka terhadap peristiwa-peristiwa besar. Contoh kedua juga seperti kasus pembunuhan anggota Kopassus Serka Santoso di Hugos sebelum kejadian Cebongan ini, saya <i>nggak</i> liput beritanya, karena kasus pembunuhan seperti itu tidak ada kepentingannya bagi publik secara nasional ya. Banyak peristiwa lainnya di Yogyakarta saat itu, atau peristiwa besar di daerah lain yang lebih kuat dan berskala nasional dibanding pembunuhan di Hugos tersebut. Namun, saya sebagai wartawan tentu tidak boleh acuh begitu saja, saya tetap mengikuti perkembangan kasusnya dari media lokal misalnya yang secara signifikan memberitakan kasus itu, karena kan bagi masyarakat Yogyakarta itu informasi penting untuk diketahui. Namun bagi masyarakat luas, misalnya masyarakat di Sumatra, Sulawesi, atau Jakarta saja belum tentu kasus di Hugos tersebut penting untuk mereka ketahui dari Harian Kompas sebagai media nasional yang tidak hanya dibaca oleh masyarakat Yogyakarta.</p>
Eca	<p>Apa yang jadi kriteria untuk kelayakan suatu isu dapat dijadikan <i>headline</i> dan kriteria untuk pemilihan judul dan <i>lead</i> berita?</p>
ABK	<p>Kembali ke atas tadi, berita layak menjadi <i>headline</i> atau paling tidak layak tayang jika berskala luas (nasional bahkan internasional), memiliki tingkat pengaruh yang luas, berkaitan dengan kebijakan publik, memiliki nilai humanistik tinggi, menyangkut kredibilitas negara, mempengaruhi harkat dan martabat rakyat banyak, berkaitan dengan tokoh yang kuat, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. <i>Headline</i> itu sendiri ditentukan rapat redaksi di Jakarta. Kalau soal pemilihan judul dan <i>lead</i> berita adalah <i>point interest</i> dari berita itu apa, di situlah yang ditonjolkan untuk ditampilkan di bagian paling atas sebagai <i>lead</i> juga ditarik judul beritanya. Untuk pemilihan judul dan <i>lead</i> berita itu adalah kewenangan wartawan, kebebasan berpikir wartawan dalam menentukan itu.</p>
Eca	<p>Umumnya, sebuah media dipengaruhi berbagai kepentingan. Untuk Harian Kompas sendiri pihak mana saja yang paling berpengaruh dan sebesar apa pengaruhnya?</p>
ABK	<p>Tidak ada kepentingan sama sekali. Saya tegaskan, tidak ada kepentingan sama sekali. Apa yang kami beritakan merupakan tragedi bangsa yang harus menjadi pembelajaran bersama, itu saja. Tak ada kepentingan lain. Fungsi media adalah memberikan informasi yang</p>

	mencerahkan masyarakat sekaligus memberikan pembelajaran bagi publik. <i>That's the point!</i>
Eca	Terkait dengan kasus Cebongan, apakah pihak redaksional bagian Pusat memiliki arahan atau kebijakan tertentu untuk Mas ABK meliput kasus tersebut? Misalnya ada hal yang boleh atau tidak boleh untuk diliput, pemilihan narasumber yang ditentukan Redaksi Pusat, atau ada fakta yang harus ditonjolkan atau bahkan disembunyikan?
ABK	Tak ada sama sekali arahan harus memilih narasumber ini atau itu, larangan ini atau itu. Tidak ada penentuan isu khusus dalam peliputan dan penulisan berita ini. Tidak ada instruksi apapun dari Pusat untuk menyetir saya sebagai wartawan untuk membuat berita terkait kasus Cebongan itu.
Eca	Kalau tidak ada arahan atau kebijakan redaksional seperti yang mas katakan, lantas apa yang menjadi patokan mas saat peliputan berita Cebongan itu? Apa fakta dan narasumber yang jadi fokus pencarian dan Mas ABK pertimbangkan dalam meliput berita Cebongan?
ABK	Faktanya sesuai dengan yang terjadi dalam peristiwa penyerbuan Lapas Cebongan itu. Untuk pemilihan narasumber untuk berita apapun (tidak hanya kasus Cebongan) landasannya simpel sekali. Narasumber adalah orang yang memiliki atau mengetahui informasi kuat atau terpercaya terkait suatu hal, orang yang terlibat atau dekat dengan peristiwa tertentu, atau orang yang kompeten memahami persoalan tertentu. Di situlah wartawan diuji untuk bisa menyajikan informasi terpercaya. Asalkan memiliki landasan informasi dan data yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan.
Eca	Selain 5W+1H, apa yang menjadi pertimbangan mas lainnya dalam pemilihan fakta dan pengemasan berita, khususnya yang terkait dengan kasus Cebongan?
ABK	Semuanya tentu berdasarkan 5W+1H, tidak hanya pada kasus Cebongan saja. Tapi semua harus selalu <i>diverifikasi</i> dengan prinsip <i>cover all side</i> . Penyerangan terhadap Lapas Cebongan oleh Kopassus ini kan sebenarnya isunya sudah beredar kuat sekali di kalangan wartawan, isu itu beredar lewat grup bbm, sms, dari teman-teman intel. Kita pun tahu bahwa kejadian itu dilatarbelakangi oleh kasus pembunuhan yang dilakukan keempat tahanan Polda DIY terhadap Serka Santoso. Makanya waktu awal beritanya muncul kan Kompas sudah mengeluarkan bantahan dari Pangdam Diponegoro Mayjen Hardiono Saroso itu ya bahwa bukan Kopassus pelakunya. Terus saya juga sudah tuliskan senjatanya AK-47 dari saksi yang jadi korban yaitu petugas Lapas Cebongan, itu kan untuk perang, terus saya tulis ciri-ciri mereka yang menunjukkan identitas mereka. Jadi walaupun kita sudah punya anggapan, kita sudah punya dugaan, tapi kalau kita belum punya bukti yang kuat dan belum punya pernyataan yang kuat dari siapa gitu terkait dugaan tersebut, ya kita tidak bisa beritakan. Dugaan itu tidak bisa kita masukan dalam berita, harus ada indikasi kuat dan pernyataan, kita harus melakukan verifikasi ulang. Berita kita tidak hanya <i>cover both sides</i> ya, tapi prinsipnya <i>cover all sides</i> , kita melakukan verifikasi

	terhadap semua pihak yang berkaitan, tidak hanya dua pihak saja kan.
Eca	Apa yang Mas ABK lakukan sebagai wartawan untuk mendapatkan berita mendalam terkait kasus Cebongan? Pihak mana saja yang mas libatkan dalam pemberitaan yang mas tulis dan bagaimana cara mas agar mereka mau memberikan keterangan atau komentar yang mas cari?
ABK	Bertanya dengan pihak manapun yang secara logis berkaitan dengan kasus ini. Cara pendekatannya macam-macam, tergantung kreativitas kita sebagai wartawan. Bisa lewat wawancara langsung, jumpa pers, persidangan di pengadilan, atau menjangring informasi di masyarakat.
Eca	Apakah ada <i>frame</i> tertentu yang ingin dibentuk Harian Kompas terkait berita kasus Cebongan untuk dihadirkan kepada publik?
ABK	Tidak ada! Saya juga tentunya Harian Kompas tidak mengarahkan kasus ini kemana-mana, saya hanya melihat fakta yang ada aja. Ini bukan sekedar kasus pembunuhan biasa, atau bukan sekedar balas dendam. Ada banyak kepentingan di dalam kasus ini. Ini pembunuhan luar biasa di sebuah rumah tahanan sebagai tempat penegakan hukum. Itu sama dengan pelaku, yaitu oknum TNI tidak menghormati kaedah-kaedah hukum negara. Itu lah fakta yang kita lihat dan kita angkat, faktanya memang seperti itu, jadi tidak diarahkan kemana-mana. Kalau umumnya kan teman-teman wartawan dari media lain untuk mengangkat satu berita sudah punya <i>frame</i> berita, kalau saya itu ya kumpulkan dulu faktanya, kemudian dari fakta-fakta itu saya tulis berita sesuai dengan apa yang saya lihat, saya nilai, baru muncullah <i>frame</i> berita itu. Jadi bukan berarti dari awal sudah sengaja membentuk suatu <i>frame</i> untuk kepentingan tertentu misalnya, ya tentu tidak ada. Karena kami kan sebagai media nasional memberitakan untuk kepentingan masyarakat luas, menginformasikan tentang Cebongan ini pada masyarakat untuk memberikan pembelajaran bagaimana seharusnya suatu penegakan hukum itu dihargai bukan dengan main hakim sendiri.
Eca	Eca melakukan analisis teks pada berita: 1) Lapas Sleman diserang; 2) Pertaruhan Wibawa Hukum (yang menjadi <i>headline</i> edisi 25 Maret 2013); 3) 11 Anggota Kopassus Tersangka ( <i>headline</i> 5 April 2013); 4) Tegakkan Hukum Seadil-adilnya ( <i>headline</i> 8 April 2013); 5) Polisi Serahkan ke TNI; 6) Profesionalisme Prajurit Ditantang. Dari hasil analisis keenam teks berita tersebut Harian Kompas terlihat sekali lebih menekankan pada aspek hukum, penegakan hukum, juga terlihat menyosokkan pelaku sebagai pihak yang mencoreng penegakan dan negara hukum. Selain itu dalam setiap berita ada narasumber seperti sosiolog kriminal UGM, dosen hukum UI, psikologi sosial UI, dan pendapat mereka selalu berkaitan dengan hal yang menjadi hasil analisis teks yang eca sebutkan di atas. Apakah hal itu telah menjadi kebijakan Harian Kompas sehingga mas dan rekan wartawan lainnya menulis dan memilih narasumber seperti itu?
ABK	Sekali lagi saya tegaskan ya Ca, tidak ada <i>by design</i> dalam pemberitaan kasus ini dari pihak redaksi atau pun saya sebagai wartawan yang meliput. Semua pemberitaan berdasarkan peristiwa dan perkembangan kasusnya. Saya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian melalui

	<p>fakta itu saya membuat berita yang mencoba membuka pikiran masyarakat untuk melihat peristiwa ini dari kacamata yang lebih lengkap dan lebih luas. Saya khawatir, pengalihan isu seputar premanisme yang banyak beredar setelah pengakuan Kopassus hanya akan mengalihkan perhatian masyarakat dari soal peristiwa kekejian di rumah tahanan, adanya tindakan tidak menghormati hukum, menjadi pemberantasan premanisme. Jadi tidak ada kebijakan, kepentingan, ataupun <i>frame</i> yang sengaja dibentuk, ini <i>real</i> berdasarkan berbagai fakta yang saya kumpulkan. Mengapa aspek hukum yang berulang kali muncul ya karena kasus ini jelas sekali berkaitan dengan pelanggaran hukum di Indonesia yang ironisnya dilakukan oleh aparat keamanan yang semestinya menjadi pihak penegak hukum. Kasus pelanggaran hukum dalam kasus ini sangat terlihat jelas karena terjadi di tempat penegakan hukum yaitu Lapas dan dilakukan oknum yang semestinya menjadi salah satu penjamin fungsi keamanan negara yaitu penegakan hukum. Karena itulah, pengamat-pengamat yang dipilih untuk mengomentari kasus ini ya pengamat yang menurut saya kompeten dalam persoalan hukum. Logikanya sangat sederhana.</p>
Eca	<p>Bagaiman posisi Mas ABK sendiri dalam memandang kasus Cebongan ini?</p>
ABK	<p>Soal posisi saya dalam kasus ini, sangat netral senetral-netralnya. Saya tidak punya kepentingan apapun dalam peristiwa dan pemberitaan saya. Prinsipnya tegakkan hukum seadil-adilnya. Opini itu pasti ada ya dari seorang wartawan, tapi opini kan kita membangunnya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bukan berarti kita punya opini duluan, baru kita menilai sesuatu. Dan opini itu sendiri tidak bisa serta-merta kita masukan ke dalam berita, tapi opini kita yang bisa disebut hipotesa sementara harus kita buktikan melalui fakta-fakta yang sudah diverifikasi dan klarifikasi berulang-ulang, sehingga data yang kita tampilkan itu punya dasar yang kuat dan akurat, benar sesuai dengan fakta. Atau ada <i>frame</i> khusus terlebih dulu, baru saya menuliskan berita, itu tidak seperti itu. Tapi faktanya dulu saya kumpulkan, barulah <i>frame</i> berita itu terbentuk dengan sendirinya dari fakta-fakta yang saya masukan dalam berita. Dalam kasus apapun seorang wartawan harus bersikap netral, memandang kasus secara obyektif. Kalaupun ada orang atau sekelompok orang melakukan tindak kriminal ya harus diproses sesuai hukum yang berlaku, bukannya dieksekusi sendiri oleh oknum tanpa melalui proses hukum, seperti yang dilakukan oknum Kopassus terhadap tahanan tersangka yang membunuh anggota Kopassus Serka Santoso. Bagi saya kasus Cebongan ini adalah bukti di mana hukum tidak dihargai, tidak dihormati. Kalau semua orang punya senjata, dan bertindak main hakim sendiri kan repot. Lalu apa artinya kita memiliki hukum kalau aksi main hakim sendiri dibiarkan?</p>
Eca	<p>Ehmmm, iya mas (nyengir ^-^ ) Lalu apa kendala mas selama proses peliputan berita kasus Cebongan itu?</p>
ABK	<p>Informasinya terbatas, narasumber cenderung tertutup karena ada tegangan antara Polisi, TNI, dan para pendukung Kopassus. Seperti</p>

	<p>yang saya katakan di atas tadi bahwa sebenarnya sebelum kejadian kan kita sudah tahu bahwa ada serombongan Kopassus akan melakukan penyerangan ke Lapas Cebongan. Isu itu sudah kuat sekali beredar di kalangan wartawan dari teman-teman intel. Tapi kita kan tidak bisa langsung beritakan hal itu waktu awal kejadian, kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu, tapi kan susah melakukan verifikasi terhadap TNI itu informasinya sangat tertutup. Polisi pun sebagai pihak yang menangani kasusnya juga tertutup, karena ini kan menyangkut TNI kan. Lagipula kasus ini sangat rumit karena ditunggangi berbagai macam kepentingan.</p>
Eca	<p>Kepentingan seperti apa maksudnya mas?</p>
ABK	<p>Rumit dijelaskan. Tapi ini garis besarnya ya, dibalik kasus Cebongan da tarik-menarik kekuasaan internal Pakualaman, ada juga tarik-menarik kepentingan TNI dan Polri. Sebagai <i>background</i> berita OK, tapi dalam pemberitaan kadang sulit untuk dikupas karena informasi yang tertutup tadi karena ini berkaitan dengan TNI. Diki Cs kan pengawalnya Anglingkusumo, yang sempat mengangkat diri sebagai Paku Alam tandingan Paku Alam IX yang sekarang bertahta. Lha pendukung Paku Alam IX kemarin ikut mendukung Kopassus di sidang-sidang itu karena Kopassu telah menghabisi Diki Cs, musuh mereka. Adanya masyarakat yang mendukung Kopassus dengan menyuarakan pemberantasan premanisme ini seperti ada sebuah nilai politisasi. Kasus Cebongan ini kalau saya pribadi menyimpulkan, dari segi lokalitas Yogyakarta, ada orang-orang yang berkepentingan terhadap kasus ini. Tapi dari tingkat nasional juga ada kepentingan politis, bahwa ya ini untuk mengangkat citra TNI yang menyelamatkan masyarakat dengan menggunakan ‘premanisme’ walaupun dengan cara-cara yang kurang tepat. Jadi dilihat dari situ, kasus ini mengandung kepentingan yang berlapis-lapis, ada yang kepentingan lokal, juga ada kepentingan nasional.</p>
Eca	<p>Apa ada kendala atau kejadian yang terjadi terhadap mas pribadi saat proses peliputan Kasus Cebongan? Terus apa yang mas lakukan menghadapi kejadian itu, apakah ada perubahan dalam mas menulis berita tentang kasus Cebongan atau tetap pada arah wacana yang telah terbentuk yang mungkin kurang berkenan bagi pihak tertentu seperti TNI tersebut?</p>
ABK	<p>Saya sempat dicari-cari oleh TNI karena saya pernah memberitakan saat sidang untuk para tersangka, ada satu paragraf kalau tidak salah yang berisi “tidak terbukti bahwa ada pemukulan terhadap Ucok”, pelaku penembakannya itu, karena tidak ada saksi yang memberikan kesaksian seperti itu, jadi saya tulis begitu. Nah sepertinya berita itu tidak bisa diterima oleh pihak TNI dan saya dicari, tapi kebetulan saya ambil cuti ke Jakarta. Jadi solusinya waktu itu Kepala Biro Harian Kompas Yogyakarta, Pak Pujo, kemudian berdialog dengan pihak TNI karena kebetulan saya sedang ada tugas di Jakarta. Kemudian ya Beliau memberikan klarifikasi kecil dalam pemberitaan sebelumnya. Memang dalam berita ada kata-kata yang bisa dipersepsikan ambigu sehingga kemudian diklarifikasi. Meski demikian, hal ini tak mempengaruhi</p>

	pemberitaan selanjutnya. Kami tetap bebas membuat berita sesuai kebebasan berpikir kami.
Eca	Menurut Mas ABK sendiri, apakah berita-berita yang diterbitkan Harian Kompas sudah mempengaruhi masyarakat?
ABK	Saya yakin mempengaruhi. Salah satu indikasinya, setelah muncul pemberitaan tentang teror terhadap sejumlah wartawan peliput kasus Cebongan oleh oknum tertentu, ada banyak lembaga atau elemen masyarakat memberi dukungan. Kemudian aksi-aksi teror dari sejumlah oknum tidak muncul lagi. Indikasi lainnya adalah setiap harinya lebih dari 400.000 eksemplar koran Kompas habis terjual, artinya banyak masyarakat masih membaca dan membutuhkan Kompas. Jika satu koran saja dibaca rata-rata oleh 3 orang, misalnya bapak, ibu, dan anak, maka setiap hari ada sekitar 1,2 juta orang pembaca Kompas. Jika tidak ada pengaruhnya, saya rasa setiap hari tidak akan terjual koran sebanyak itu, hehe
Eca	Ohh gitu mas.. Sipp, makasih Mas ABK sudah meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan yang eca butuhkan untuk melengkapi data skripsi. Hehe
ABK	Iya Ca.. Demikian jawabanku Ca, thanks ya atas ujian 4 sks-nya, haha